



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 6 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2023-2043**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Nunukan Tahun 2023-2043;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2023-2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
5. Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri Unggulan dan utama di Daerah.
6. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Nunukan Tahun 2023-2043 yang selanjutnya disebut RPIK Tahun 2023-2043 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan Industri Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berasaskan:

- a. keadilan;
- b. manfaat;
- c. pemerataan persebaran;
- d. tata ruang;
- e. pembangunan berkelanjutan;
- f. kearifan lokal; dan
- g. kondisi kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mendorong percepatan kemajuan pembangunan Industri di Daerah secara terencana, sistematis, dan terpadu; dan
- b. memperkuat dan memperjelas peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan Industri di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Industri Unggulan Daerah;
- b. jangka waktu;
- c. pelaksanaan;
- d. laporan pelaksanaan; dan
- e. pembiayaan.

BAB II INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 5

Industri Unggulan Daerah yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Daerah dan merupakan komoditi unggulan Daerah.

BAB III JANGKA WAKTU

Pasal 6

RPIK Tahun 2023-2043 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB IV LAPORAN PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah membuat laporan pelaksanaan RPIK Tahun 2023-2043 kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap program pembangunan Industri Daerah.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pertumbuhan Industri;
 - b. kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto;
 - c. penyerapan tenaga kerja sektor Industri;
 - d. realisasi investasi sektor Industri dan ekspor produk Industri; dan
 - e. permasalahan dan langkah penyelesaian sektor Industri.

BAB V
RPIK

Pasal 8

Sistematika RPIK Tahun 2023-2043 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2023 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA: 98/6/2023

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,



HASRUNI, S.H., M.A.P
NIP. 19710608 200212 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
NUNUKAN TAHUN 2023-2043

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan industri ke depan ditujukan agar Sektor industri dapat tumbuh lebih cepat sehingga dapat berperan lebih besar dalam perepatan nilai tambah yang berujung pada peran Sektor industri pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan pertumbuhan dan peran Sektor industri tersebut akan dapat dicapai apabila berbagai permasalahan yang dihadapi saat ini dapat diatasi, yaitu masih lemahnya daya saing industri nasional belum kuat dan belum dalamnya struktur industri nasional, masih terkonsentrasinya kegiatan industri di Pulau Jawa dan belum optimalnya regulasi pemerintah dalam mendukung kemajuan industri.

Undang-Undang nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian disusun dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Undang-Undang tersebut memberikan peran yang lebih besar kepada Pemerintah dalam mendorong kemajuan Sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan Sektor industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri nasional.

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan riil dan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan mengusahakan terjadinya pergeseran kegiatan ekonomi dari Sektor primer ke Sektor sekunder dan tersier.

Industri Kecil dan Menengah (IKM) sangat besar perannya dalam perkembangan perrekonomian. Demikian juga sumbangan pada Produk Domestik Bruto (PDRB) juga besar, lebih dari separuh ekonomi didukung oleh produksi IKM. Hal tersebut dapat dilihat pada pertumbuhan industri kecil dan menengah Kabupaten Nunukan pada tahun 2017-2021 mencapai 75,27 % dengan jumlah IKM sampai dengan tahun 2021 sebanyak 783. Hal ini mendukung penyediaan lapangan pekerjaan, maka dari itu diperlukan pedoman untuk dapat dijadikan acuan dalam pembangunan dan pengembangan industri di Kabupaten Nunukan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Nunukan tahun 2022-2042, antara lain:

1. Undang Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
3. Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri;

6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK);
7. Peraturan Daerah provinsi Kalimantan Utara No. 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2038
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No. 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033;
10. (Draft) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2022-2042;
11. Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/488/X/2021 Tahun 2021 Tentang Penetapan Produk Unggulan, Produk Andalan dan Produk Potensial Kabupaten Nunukan.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada laporan ini terdiri dari lima bab yang terdiri atas, Pendahuluan, Gambaran Umum Kabupaten Nunukan Terkait Pembangunan Industri, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Nunukan, Strategi dan Program Pembangunan Industri Kabupaten Nunukan, dan Penutup. Berikut penjabaran mengenai sistematika penulisan laporan ini:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II Gambaran Umum Kabupaten Nunukan Terkait Pembangunan Industri

Bab ini berisi tentang kondisi daerah, sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, serta pemberdayaan IKM.

BAB III Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Nunukan

Bab ini berisi tentang kebijakan pembangunan industri, visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pengembangan industri.

BAB IV Strategi dan Program Pembangunan Industri Kabupaten Nunukan

Bab ini berisi penjelasan mengenai strategi dan program pembangunan industri.

BAB V Penutup

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari keseluruhan laporan dan saran/rekomendasi yang ditujukan kepada pihak pemerintah, lembaga maupun instansi terkait lainnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

3.1. Kondisi Daerah

2.1.1. Kondisi Geografi

2.1.1.1. Administrasi Wilayah

Kabupaten Nunukan yang terletak antara 115°33'00" sampai dengan 118°03'55" Bujur Timur dan antara 3°15'00" sampai dengan 4°24'55" Lintang Utara yang merupakan wilayah paling utara dari Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Nunukan yang termasuk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara, dikenal sebagai wilayah perbatasan dan menjadi tempat transit dan keluar masuknya Tenaga Kerja Indonesia. Selain itu Kabupaten Nunukan telah memiliki pelabuhan lintas batas negara yang secara tidak langsung mengantarkan Kabupaten Nunukan sebagai kawasan perdagangan dan jasa serta merupakan jalur strategis yang menghubungkan regional di Tengah dan Timur.

Adapun batas wilayah Kabupaten Nunukan terdiri dari,

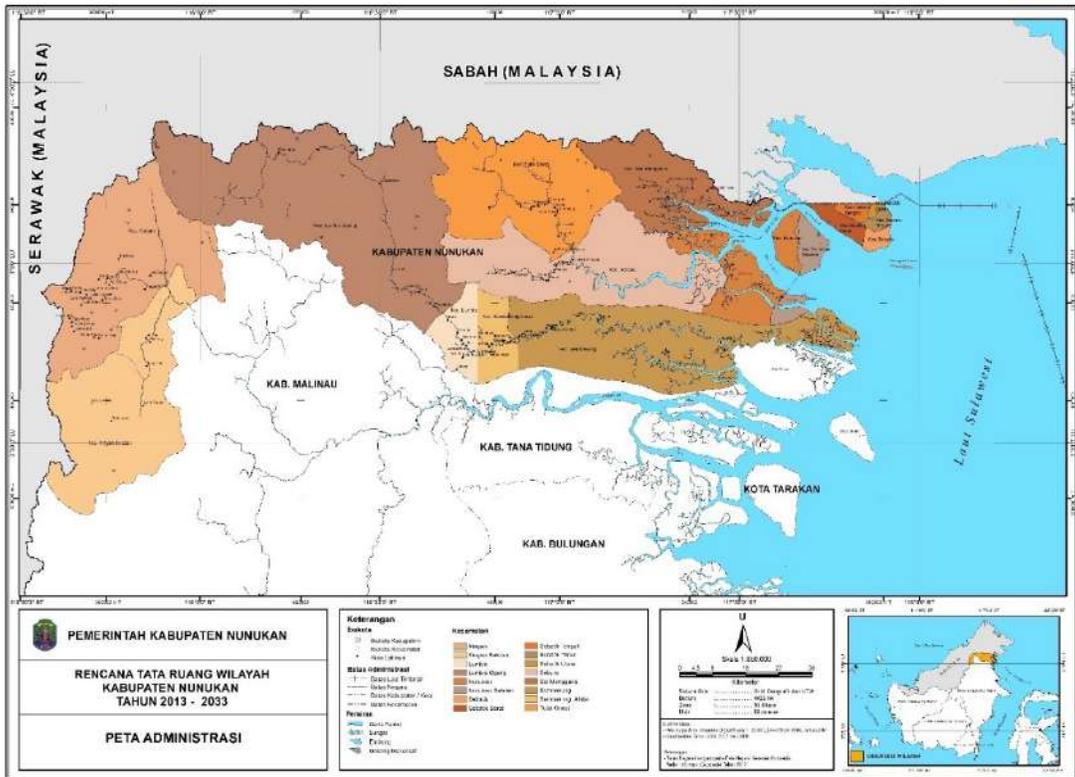
- ↳ Sebelah Barat berbatasan dengan Serawak (Malaysia Timur);
- ↳ Sebelah Utara berbatasan dengan Sabah (Malaysia Timur);
- ↳ Sebelah Timur berbatasan dengan selat Makasar dan Laut Sulawesi dan
- ↳ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau.

Kabupaten Nunukan merupakan satu di antara lima kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara, dengan luas wilayah sebesar 14.247,50 km². Berdasarkan geografisnya, Kabupaten Nunukan terletak di wilayah paling Utara Kalimantan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia terdiri dari 21 Kecamatan yaitu:

Tabel II-1 Luas Daerah dan Persentase Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Daerah (Km ²)	%
1	Krayan Selatan	760,24	5,34
2	Krayan Tengah	997,42	7,00
3	Krayan	254,35	1,79
4	Krayan Timur	1.273,17	8,94
5	Krayan Barat	307,22	2,16
6	Lumbis Ogong	1.628,66	11,43
7	Lumbis Pansiangan	964,42	6,77
8	Lumbis Hulu	763,93	5,36
9	Lumbis	290,23	2,04
10	Sembakung Atulai	277,72	1,95
11	Sembakung	1.764,94	12,39
12	Sebuku	1.608,48	11,29
13	Tulin Onsoi	1.513,36	10,62
14	Sei Menggaris	850,48	5,97
15	Nunukan	564,50	3,96
16	Nunukan Selatan	181,77	1,28
17	Sebatik Barat	93,27	0,65
18	Sebatik	51,07	0,36
19	Sebatik Timur	39,17	0,27
20	Sebatik Tengah	47,17	0,30
21	Sebatik Utara	15,39	0,11
Kabupaten Nunukan		14.247,50	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Nunukan, 2022.

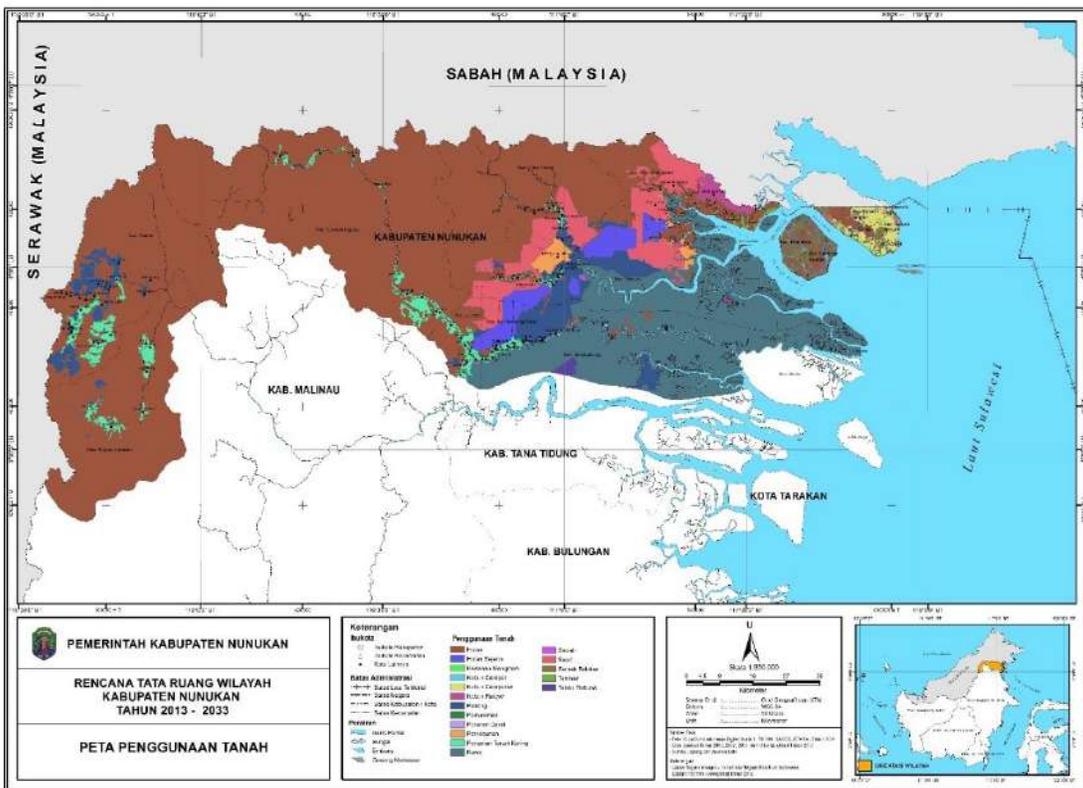


Gambar II-1 Peta Wilayah Kabupaten Nunukan

2.1.1.2. Topografi Wilayah

Topografi Kabupaten Nunukan cukup bervariasi, kawasan perbukitan terjal terdapat di sebelah utara bagian barat, perbukitan sedang di bagian tengah dan dataran bergelombang landai di bagian timur memanjang hingga ke pantai sebelah timur. Perbukitan terjal di sebelah utara merupakan jalur pengunungan dengan ketinggian 1.500 m - 3.000 m di atas permukaan laut. Kemiringan untuk daerah daratan tinggi berkisar antar 8-15%, sedangkan untuk daerah 36 perbukitan memiliki kemiringan yang sangat terjal, yaitu di atas 15%. Dengan demikian kemiringan rata-rata berkisar antara 0-50%.

Kabupaten Nunukan berada di wilayah khatulistiwa yang memiliki iklim tropis, sehingga mengalami 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan serta dipengaruhi oleh angin Muson Barat pada bulan November-April dan Muson Timur pada bulan Mei-Oktober.



Gambar II-2 Peta Topografi Wilayah Kabupaten Nunukan

2.1.1.3. Pola Penggunaan Lahan

Pola penggunaan tanah secara umum merupakan gambaran dari kegiatan penduduk di suatu daerah dalam memenuhi kebutuhannya. Semakin kompleks pola penggunaan tanah disuatu daerah menunjukkan pula semakin kompleksnya kegiatan penduduk di daerah tersebut. Penggunaan lahan di Kabupaten Nunukan didominasi oleh wilayah hutan, selain terdapat juga lahan persawahan dan lahan non sawah. Penggunaan tanah bersifat intensif dan non tani banyak terdapat di kawasan perkotaan, terutama di Pulau Nunukan dan Sebatik.

Penggunaan lahan didefinisikan sebagai suatu kegiatan bentuk campuran tangan manusia terhadap lahan di permukaan bumi yang sifatnya dinamis untuk memenuhi kebutuhannya. Penggunaan lahan di Kabupaten Nunukan didominasi oleh kawasan hutan. Selain hutan, penggunaan lahan juga dimanfaatkan sebagai lahan persawahan dan lahan non sawah. Penggunaan lahan non tani dan tanah bersifat intensif banyak terdapat di kawasan perkotaan, terutama di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik.

A. Kawasan Lindung

Kawasan lindung merupakan kawasan yang berfungsi untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Penggunaan lahan yang termasuk ke dalam kawasan lindung di Kabupaten Nunukan adalah:

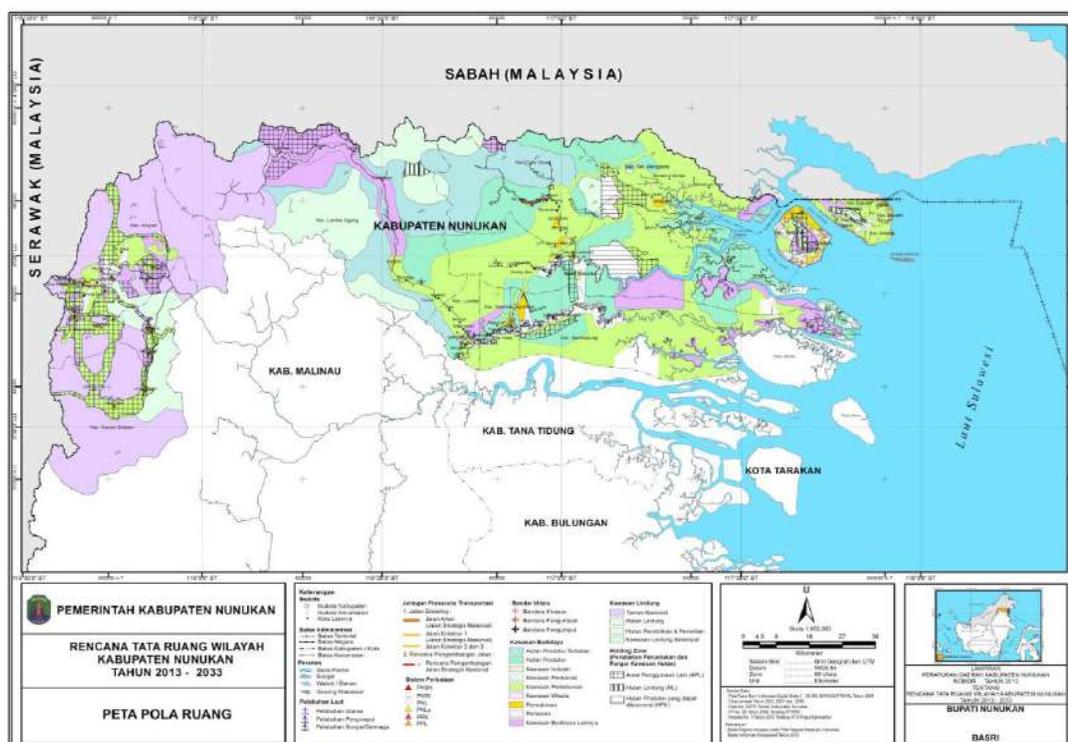
1. Hutan lindung seluas 36.827,70 hektar atau 8,83 persen dari luas keseluruhan hutan, tersebar di Pulau Nunukan, Pulau Sebatik, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Timur, Kecamatan Krayan Tengah dan Kecamatan Krayan Selatan.
2. Taman Nasional “Kayan Mentarang” seluas 303.682 hektar yang berada pada Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Timur, Kecamatan Krayan Barat, Kecamatan Krayan Tengah dan Krayan Selatan.

B. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk dibudidayakan berdasarkan kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia yang dimiliki dalam memenuhi kebutuhan manusia. Kawasan budidaya dapat dikelompokkan menjadi kawasan pertanian, perindustrian, kehutanan, pertambangan, pariwisata, dan permukiman. Penggunaan lahan yang termasuk ke dalam kawasan budidaya di Kabupaten Nunukan berdasarkan SK No. 718/Menhut-II/2014 adalah:

1. Hutan produksi tetap seluas 264.827,87 hektare atau 63,51 persen dari luas keseluruhan hutan, keberadaanya tersebar di Kecamatan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan, Kecamatan Sei Manggaris, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sembakung Atulai, Kecamatan Lumbis dan Lumbis Ogong.
2. Hutan produksi terbatas seluas 100.754,77 hektare atau 24,16 persen dari luas keseluruhan hutan, keberadaanya tersebar di Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Lumbis dan Kecamatan Lumbis Ogong.
3. Hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 14.543,06 hektare atau 3,49 persen dari luas keseluruhan hutan, berada pada Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Sei Manggaris.

Penggunaan lahan lain dengan luas 582.938 hektare tersebar secara merata di semua kecamatan dengan pemanfaatan berupa permukiman, pertambangan, pertanian, industri, peternakan, perikanan, pariwisata, serta pertahanan dan keamanan.



Gambar II-3 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Nunukan

2.1.1.4. Pengembangan Kawasan Strategis

Berdasarkan dokumen Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033, Kawasan Strategis Kabupaten Nunukan terdiri dari Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi, dan Kawasan Strategis Kabupaten.

A. Kawasan Strategis Nasional

Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional di Kabupaten Nunukan terdiri atas:

1. Kawasan perbatasan darat Republik Indonesia di Kalimantan (KASABA) dan Jantung Kalimantan (Heart of Borneo)
2. Kawasan perbatasan negara Republik Indonesia termasuk Pulau Sebatik dan Gosong Makassar yang berbatasan dengan Negara Malaysia dan Filipina.
3. Kawasan Andalan Nasional TATAPAN BUMA (Tarakan, Tanjung Palas, Nunukan, Pulau Bunyu dan Malinau), dimana Kabupaten Nunukan menjadi bagian dari kawasan andalan tersebut.

B. Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan Strategis Provinsi ditetapkan sebagai kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal provinsi yang terdapat di Kabupaten Nunukan. Berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037, kawasan yang termasuk ke dalam Kawasan Strategis Provinsi terdiri atas:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi meliputi: Long Bawan dan Long Layu, Pulau Sebatik, Lumbis Ogong, Sei Menggaris, kawasan food estate dan rice estate di Kabupaten Nunukan, kawasan technopark pertanian organik di Kabupaten Nunukan, kawasan marine technopark perikanan di Kabupaten Nunukan.
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi kawasan konservasi mangrove di Kabupaten Nunukan.
3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan teknologi tinggi yang ada di Kabupaten Nunukan adalah PLTA Sei Sembakung.

C. Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan Perda Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033 terbagi menjadi:

1. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan Strategis Nasional (KSN) berupa Kawasan Perbatasan Laut Republik Indonesia termasuk dua pulau kecil terluar dengan Negara Malaysia dan Filipina meliputi Pulau Sebatik dan Pulau Gosong Makasar
2. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi berupa Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) meliputi: KSN Kawasan Andalan Tarakan –Tanjung Palas – Nunukan – Pulau Bunyu – Malinau (TATAPAN BUMA); KSK Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Mansapa; KSK Coastal Road/Jalan lingkar Pulau Nunukan; KSK Kota Terpadu Mandiri (KTM) Bahari Pulau Sebatik; KSK Kota Terpadu Mandiri (KTM) Simanggaris; kawasan pertambangan batubara di Linuang Kayam Kecamatan Sembakung, wilayah Simenggaris di Kecamatan Sei Manggaris dan di Kecamatan Sebuku; kawasan pertambangan minyak dan gas bumi di Sebaung Kecamatan Nunukan dan Desa Tepian Kecamatan Sembakung; kawasan industri pabrik kelapa sawit di Kecamatan Sebuku, Sei Menggaris dan Lumbis; kawasan Transmisi Kabel Bawah Laut dari wilayah Desa Tepian ke Pulau Nunukan, dan dari wilayah Sedadap Pulau Nunukan ke Liang Bunyu Pulau Sebatik; kawasan strategis perlindungan dan pelestarian alam yaitu Taman Nasional Kayan Mentarang.

2.1.2. Demografi (kependudukan)

Pembangunan di suatu wilayah tidak terlepas dari peran serta penduduknya sebagai subjek pembangunan, demikian pula dengan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. Jumlah penduduk yang besar di satu sisi merupakan suatu potensi yang dapat mendorong keberhasilan suatu pembangunan jika kuantitas tersebut juga diimbangi dengan kualitas yang tinggi pula. Namun disisi lain jumlah penduduk yang tinggi dapat pula menimbulkan suatu masalah jika penyebarannya kurang merata.

Penduduk Kabupaten Nunukan pada tahun 2020 berjumlah 199.090 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 13,97 jiwa/km². Pertumbuhan penduduk yang terjadi juga merupakan dampak keberhasilan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Nunukan sehingga menarik minat pendatang baru untuk tinggal di kabupaten ini.

2.1.2.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Nunukan pada tahun 2020 (berdasarkan sensus 2020) sebesar 199.090 jiwa yang tersebar di 21 kecamatan. Jumlah penduduk terbanyak dari seluruh kecamatan berada di Kecamatan Nunukan sebanyak 64.241 jiwa sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Lumbis Hulu sebesar 773 jiwa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel II-2 Jumlah Penduduk Kabupaten Nunukan Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Krayan Selatan	1.448
2	Krayan Tengah	1.427
3	Krayan	3.458
4	Krayan Timur	1.597
5	Krayan Barat	2.944
6	Lumbis Ogong	3.079
7	Lumbis Pansiangan	1.844
8	Lumbis Hulu	773
9	Lumbis	6.550
10	Sembakung Atulai	2.771
11	Sembakung	6.673
12	Sebuku	11.936
13	Tulin Onsoi	10.915
14	Sei Menggaris	10.275
15	Nunukan	64.241
16	Nunukan Selatan	21.588
17	Sebatik Barat	10.903
18	Sebatik	6.453
19	Sebatik Timur	14.171
20	Sebatik Tengah	8.250
21	Sebatik Utara	7.794
Kabupaten Nunukan		199.090

Sumber: BPS Kabupaten Nunukan, 2022

2.1.2.2. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk Kabupaten Nunukan secara keseluruhan pada tahun 2020 adalah sebesar 13,97 jiwa/Km². Penduduk paling padat di Kabupaten Nunukan pada tahun 2020 terdapat di Kecamatan Sebatik Utara sebanyak 506,43 jiwa/Km², sedangkan kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Lumbis Hulu sebesar 1,01 jiwa/Km². Untuk lebih jelasnya, kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Nunukan pada tahun 2020 disajikan berikut.

Tabel II-3 Kepadatan Penduduk Kabupaten Nunukan Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Daerah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	Krayan Selatan	760,24	1448	1,90
2	Krayan Tengah	997,42	1427	1,43
3	Krayan	254,35	3458	13,60
4	Krayan Timur	1273,17	1597	1,25
5	Krayan Barat	307,22	2944	9,58
6	Lumbis Ogong	1628,66	3079	1,89
7	Lumbis Pansiangan	964,42	1844	1,91
8	Lumbis Hulu	763,93	773	1,01
9	Lumbis	290,23	6550	22,57
10	Sembakung Atulai	277,72	2771	9,98
11	Sembakung	1764,94	6673	3,78
12	Sebuku	1608,48	11936	7,42
13	Tulin Onsoi	1513,36	10915	7,21
14	Sei Menggaris	850,48	10275	12,08
15	Nunukan	564,5	64241	113,80
16	Nunukan Selatan	181,77	21588	118,77
17	Sebatik Barat	93,27	10903	116,90
18	Sebatik	51,07	6453	126,36
19	Sebatik Timur	39,17	14171	361,78
20	Sebatik Tengah	47,17	8250	174,90
21	Sebatik Utara	15,39	7794	506,43
Kabupaten Nunukan		14247,5	199090	13,97

Sumber: BPS Kabupaten Nunukan, 2022

2.1.2.3. Struktur Penduduk

Struktur penduduk meliputi jumlah persebaran dan komposisi penduduk. Struktur penduduk ini selalu berubah-ubah karena disebabkan oleh proses demografi yakni kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan juga adanya migrasi penduduk. Ditinjau dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, terlihat bahwa pada tahun 2020 jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Nunukan masih lebih banyak dibanding perempuan. Ini terlihat dari rasio jenis kelamin 113,2 artinya pada setiap 100 orang perempuan terdapat 113-114 orang laki-laki. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Nunukan berdasarkan jenis kelamin serta sex ratio-nya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-4 Struktur Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	7.802	7.620	15.422
5-9	8.035	7.773	15.808
10-14	9.684	8.833	18.517
15-19	9.871	9.067	18.938
20-24	10.068	8.988	19.056
25-29	9.829	8.390	18.219
30-34	9.253	8.007	17.260
35-39	8.410	7.257	15.667
40-44	7.961	6.752	14.713
45-49	7.023	6.038	13.061
50-54	5.809	4.878	10.687
55-59	4.510	3.588	8.098
60-64	3.096	2.448	5.544
65-69	1.904	1.520	3.424
70-74	1.164	1.053	2.217
75+	1.285	1.174	2.459
JUMLAH	105.704	93.386	199.090

Sumber: BPS Kabupaten Nunukan, 2022

2.1.3. Kondisi Perekonomian

Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Profil ekonomi membahas mengenai struktur ekonomi dan sektor-sektor unggulan di Kabupaten Nunukan. Kegiatan perekonomian di Kabupaten Nunukan terdiri dari jenis kegiatan sektor pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, perkebunan, dan kehutanan. Sistem perekonomian di Kabupaten Nunukan secara umum terbagi menjadi tiga komponen, yaitu:

- ↳ Perekonomian primer merupakan kegiatan produksi yang menghasilkan nilai ekonomi dan berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam secara langsung.
- ↳ Perekonomian sekunder merupakan kegiatan ekonomi industri reproduksi (diulang) dan memanfaatkan sumber daya alam dengan budidaya.
- ↳ Perekonomian tersier merupakan kegiatan ekonomi olahan baik dari ekonomi sekunder atau kegiatan mengolah barang baku menjadi barang setengah jadi atau barang setengah jadi menjadi barang jadi.

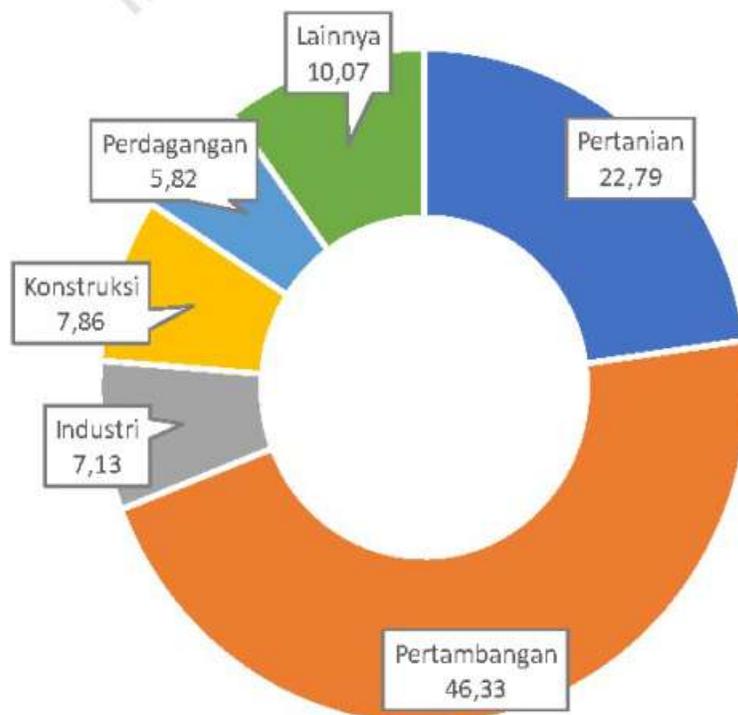
Nilai PDRB Kabupaten Nunukan atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 mencapai 28,84 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 2,54 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 26,30 triliun rupiah. Kenaikan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan dari 15,71 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 16,35 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan selama tahun 2021 Kabupaten Nunukan mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 4,07 persen, tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

2.1.3.1. Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2017-2021) struktur perekonomian Kabupaten Nunukan didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertambangan dan Penggalian; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; Industri Pengolahan; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Nunukan.



Gambar II-4 Struktur Perekonomian Nunukan, 2021

Tabel II-5 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,9	21,56	21,69	21,83	22,92	22,79
2	Pertambangan dan Penggalian	44,3	47,58	47,86	47,55	45,55	46,33
3	Industri Pengolahan	8,41	7,82	7,33	7,13	7,27	7,13
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
6	Konstruksi	7,38	7,13	7,46	7,77	8,2	7,86
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,84	5,6	5,53	5,58	5,72	5,82
8	Transportasi dan	2,17	2,02	2,03	2,04	2,01	1,88

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pergudangan						
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,02	0,99	1,03	1,02	0,99	0,98
10	Informasi dan Komunikasi	1,74	1,67	1,67	1,71	1,86	1,91
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,38	0,35	0,33	0,32	0,33	0,33
12	Real Estat	0,5	0,44	0,43	0,43	0,43	0,42
13	Jasa Perusahaan	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,19	2,86	2,74	2,73	2,7	2,55
15	Jasa Pendidikan	1,57	1,44	1,38	1,37	1,44	1,42
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
17	Jasa lainnya	0,46	0,42	0,4	0,41	0,45	0,46
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Nunukan, 2022

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Nunukan pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 46,33 persen (mengalami penurunan dari 47,58 persen pada tahun 2017). Selanjutnya Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 22,79 persen (mengalami peningkatan dari 21,56 persen pada tahun 2017); selanjutnya Konstruksi sebesar 7,86 persen (meningkat dari 7,13 persen di tahun 2017). Industri Pengolahan 7,13 persen (angka ini menurun dari 7,82 persen di tahun 2017); da lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,82 persen (meningkat dari 5,60 persen pada tahun 2017).

Diantara kelima lapangan usaha tersebut, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Konstruksi; serta Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan sepeda motor merupakan kategorikategori yang mengalami peningkatan peranan pada Kabupaten Nunukan di tahun 2021 dibandingkan tahun 2017. Sebaliknya Pertambangan dan penggalian; serta Industri Pengolahan peranannya mengalami penurunan. Sementara itu peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 5 persen.

2.1.3.2. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Industri Ekonomi

A. Kontribusi Sektor Industri Ekonomi

Mengacu pada Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori. Sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori, disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Berikut uraian perkembangan di setiap lapangan usaha periode 2017 - 2021.

1. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Indikator kontribusi lapangan usaha pertanian terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) menggambarkan proporsi sektor pertanian dalam struktur perekonomian wilayah. Sektor pertanian ini dalam struktur PDRB masuk dalam lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor pertanian terdiri atas tiga subsektor, yakni subsektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian; sub sektor kehutanan dan penebangan kayu; serta sub sektor perikanan. Dalam lima tahun terakhir, sektor pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Nunukan tercatat memiliki rata-rata kontribusi sebesar 22,18 persen dengan pergeseran sebesar 0,02 persen.

Tabel II-6 Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (ADHB) Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1	Jumlah kontribusi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Juta Rp	3.778.207,62	4.321.541,68	4.896.121,35	5.552.463,88	6.027.676,73	12,39
2	Jumlah PDRB (ADHB)	Juta Rp	16.501.994,36	20.040.898,42	22.576.028,62	25.431.083,13	6.298.891,35	12,36
3	Jumlah PDRB (ADHB) tanpa migas	Juta Rp	16.065.948,70	19.598.650,40	22.107.845,90	24.937.096,20	25.818.086,20	12,59
4	Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	Persen	22,90	21,56	21,69	21,83	22,92	0,03
5	Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB tanpa migas	Persen	23,52	22,05	22,15	22,27	23,35	(0,18)

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Nunukan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

Sektor pertanian merupakan sektor terbesar kedua dalam struktur PDRB Kabupaten Nunukan dalam lima tahun terakhir setelah sektor pertambangan dan penggalian. Dilihat dari nilai nominalnya, besaran nilai sektor pertanian di Kabupaten Nunukan dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan besaran yang meningkat setiap tahunnya, yang ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,39 persen per tahun. Pada tahun 2016, besaran nilai sektor pertanian di kabupaten ini sebesar 3,778 triliun rupiah dan meningkat setiap tahunnya hingga menjadi 6,207 triliun rupiah di tahun 2020.



Gambar II-5 Perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB di Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2020

Secara umum, dalam lima tahun terakhir, baik kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB maupun kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tanpa migas (riil) menunjukkan besaran yang fluktuatif. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dalam kurun waktu yang sama menunjukkan kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,03 persen per tahun. Pada tahun 2016, capaian indikator ini tercatat sebesar 22,90 persen, yang kemudian menurun dengan laju pertumbuhan sebesar -5,82 persen di tahun berikutnya hingga capaiannya menjadi 21,56 persen. Dalam tiga tahun terakhir, capaian ini terus menunjukkan kondisi yang semakin membaik yang ditandai peningkatan besaran kontribusi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,05 persen per tahun, hingga besaran kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tercatat menjadi 22,92 persen.

Berbeda dengan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB yang memiliki kecenderungan meningkat, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB non migas (riil) menunjukkan kecenderungan menurun, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -0,18 persen per tahun. Pada tahun 2016, kontribusi sektor pertanian riil di Kabupaten Nunukan tercatat sebesar 23,52 persen, yang kemudian turun di tahun berikutnya menjadi 22,05 persen, atau dengan laju sebesar -6,24 persen. Capaian tersebut kemudian menunjukkan peningkatan dalam tiga tahun terakhir, dimana pada tahun 2020 capaiannya menjadi 23,35 persen, atau meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,92 persen per tahun.

2. Kontribusi Sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Berdasarkan informasi dari BPS Kabupaten Nunukan, dalam perhitungan PDRB, palawija tergabung dalam sub sektor tanaman pangan, oleh karena itu jumlah kontribusi sub sektor palawija dalam perhitungan indikator ini menggunakan pendekatan sub sektor tanaman pangan.

Berdasarkan nominalnya, besaran nilai sub sektor tanaman pangan memiliki besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,48 persen per tahun. Pada tahun 2016, besaran nilai sub sektor ini tercatat sebesar 63,294 miliar rupiah yang kemudian berfluktuasi sampai dengan

tahun 2020, hingga besarnya menjadi 67,134 miliar rupiah. Sementara itu, apabila dilihat kontribusinya terhadap PDRB sektor pertanian, dalam kurun waktu yang sama menunjukkan besaran yang semakin menurun setiap tahunnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan besaran rata-rata yang tercatat sebesar -9,70 persen per tahun, dimana pada tahun 2016 sub sektor ini berkontribusi sebesar 1,68 persen terhadap PDRB sektor pertanian, dan mengalami penurunan setiap tahunnya hingga pada tahun 2020 kontribusinya menjadi 1,11 persen.

Tabel II-7 Kontribusi Sub Sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB (ADHB) Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1	Jumlah kontribusi sub sektor tanaman pangan	Juta Rp	63.294,30	65.504,28	62.495,00	64.885,69	67.134,65	1,48
2	Jumlah PDRB (ADHB) Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Juta Rp	3.778.207,62	4.321.541,68	4.896.121,35	5.552.463,88	6.027.676,73	12,39
3	Kontribusi sub sektor tanaman Pangan terhadap PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Juta Rp	1,68	1,52	1,28	1,17	1,11	(9,70)

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Nunukan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

↳ Produksi Sektor Pertanian

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang berarti negara yang mengandalkan sektor pertanian baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penopang pembangunan. Sektor pertanian meliputi subsektor tanaman bahan makanan, subsektor hortikultura, subsektor perikanan, subsektor peternakan, dan subsektor kehutanan. Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat dominan dalam pendapatan masyarakat di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Analisis produksi sektor pertanian pada suatu daerah bertujuan untuk mengukur kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya.

Tabel II-8 Produksi Komoditas Pertanian di Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2020

No	Jenis Tanaman	Produksi (ton)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi Sawah	23.141	23.831	23.916	23.459	19.702
2	Padi Ladang	1.252	943	1.445	945	926

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2021

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, padi sawah terus mengalami peningkatan tahun 2017 dan 2018. Hal ini dikarenakan adanya penerapan metode dan teknologi budidaya tepat guna di beberapa sentra produksi tanaman padi sawah, adanya sumber pendanaan dari APBD maupun APBN berupa: perbaikan benih (label putih), perbaikan benih Inhibrida (label biru), intensifikasi padi organik dan Peningkatan intensifikasi, adanya pembinaan yang intensif kepada kelompok tani yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan beserta penyuluh serta memaksimalkan penanganan perlindungan pertanaman dan gangguan organisme pengganggu tanaman juga memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan produksi dan produktivitas tanaman sehingga penurunan produksi karena puso dapat ditekan.

Selanjutnya, turunnya produksi padi sawah tahun 2019 dan 2020 disebabkan karena banyak sawah yang tidak dapat ditanami karena adanya penundaan musim tanam ke-satu di sebagian wilayah Sebatik karena bertepatan dengan bulan Ramadhan dan masuk pada musim tanam ke-dua terjadi kemarau yang mengakibatkan kehilangan jadwal panen di awal tahun 2019 dan awal tahun 2020, adanya serangan hama dan penyakit di Pulau Sebatik mengakibatkan gagal panen adanya serangan hama tikus di Krayan dan Krayan Tengah, ketidak-tersediaan obat-obatan di tingkat kecamatan menyebabkan penanganan hama dan penyakit tidak dapat diatasi dengan cepat, hal ini disebabkan karena tidak adanya anggaran untuk pengadaan obat-obatan tahun 2018 dan anggaran tahun 2019 baru dapat tersedia pada TW-IV.

Selanjutnya pada padi ladang, produksi padi ladang tahun 2017 turun dari tahun 2016 karena pada tahun 2016 ada sisa luasan panen yang ditanam di akhir tahun 2015 sehingga produksi padi sawah pada tahun 2016 tinggi. Sementara itu, tahun 2018 produksi padi ladang kembali meningkat karena pada tahun 2018 adanya bantuan saprodi yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Utara sehingga luasan tanam tahun 2018 meningkat yang menyebabkan luasan panen dan produksi ikut meningkat di tahun 2018. Berikutnya, produksi tahun 2019-2020 menurun karena terjadi kemarau yang menyebabkan tanaman kekeringan sehingga produksinya menurun.

3. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras)

Kontribusi subsektor tanaman perkebunan terhadap PDRB ADHB sektor pertanian menggambarkan besaran yang disumbangkan oleh subsektor tanaman perkebunan ke dalam sektor pertanian secara umum. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari BPS Kabupaten Nunukan diketahui bahwa dalam perhitungan PDRB, sub sektor perkebunan yang tersedia adalah perkebunan semusim dan perkebunan tahunan. Dalam konteks Kabupaten Nunukan, yang lebih dominan adalah perkebunan tahunan, sehingga dalam perhitungan indikator ini sub sektor perkebunan didekati dengan sub sektor perkebunan tahunan.

Tabel II-9 Kontribusi Sub Sektor Perkebunan (Perkebunan Tahunan) terhadap PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1	Jumlah kontribusi sub sektor perkebunan*	Juta Rp	1.211.953,26	1.445.610,86	1.600.503,67	1.792.026,46	2.088.646,23	14,58
2	Jumlah PDRB (ADHB) Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Juta Rp	3.778.207,62	4.321.541,68	4.896.121,35	5.552.463,88	6.027.676,73	12,39
3	Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Juta Rp	32,08	33,45	32,69	32,27	34,65	1,95

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, Tahun 2021

Keterangan: *) Sub sektor perkebunan tahunan

Dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, berdasarkan nominalnya, nilai sub sektor perkebunan tahunan menunjukkan besaran yang semakin meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14,58 persen per tahun. Pada tahun 2016, besaran nilai sub sektor ini adalah 1,211 triliun rupiah, yang kemudian meningkat setiap tahunnya sampai dengan tahun 2020, hingga pada tahun tersebut besarnya menjadi 2,088 triliun rupiah. Meningkatnya nominal sub sektor ini, berbanding lurus dengan peningkatan besaran kontribusinya, yang tumbuh dengan rata-rata sebesar 1,95 persen per tahun.

Kontribusi sub sektor perkebunan tahunan di kabupaten ini tercatat sebesar 32,08 persen di tahun 2016, dan berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat hingga menjadi 34,65 persen di tahun 2020.

↳ Produksi Sektor Perkebunan

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai; mengolah, dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Tanaman yang ditanam bukanlah tanaman yang menjadi makanan pokok maupun sayuran untuk membedakannya dengan usaha ladang dan hortikultura sayur mayur dan bunga, meski usaha penanaman pohon buah masih disebut usaha perkebunan. Tanaman yang ditanam umumnya berukuran besar dengan waktu penanaman yang relatif lama, antara kurang dari setahun hingga tahunan.

Tabel II-10 Perkembangan Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan di Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2020

No	Jenis Tanaman	Produksi (ton)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Karet	-	-	-	1,00	1,10
2	Kelapa	254,52	175,11	307,34	328,91	503,09
3	Kelapa Sawit	371.989.785,00	2.025.676,85	1.950.977,65	1.725.052,67	1.762.972,83
4	Kopi	63.450,00	58,14	9,12	16,08	18,35
5	Lada	29,40	70,75	20,25	19,49	23,39
6	Kakao	5.371,01	1.194,71	1.008,57	829,60	760,57
7	Panili	-	-	-	30,00	0,02
8	Cengkeh	-	4,42	1,20	5,67	1,80
9	Tebu	-	-	14,20	12,58	14,23
10	Aren	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2021

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dari 10 jenis tanaman beberapa data tidak disajikan. Rendahnya produksi karet di Kabupaten Nunukan disebabkan luas arealnya kurang karena petani kurang berminat untuk menanam karet karena peluang pasar terhadap hasil produksi karet masih minim.

Selanjutnya, tahun 2017 produksi kelapa turun karena kurangnya perawatan yang disebabkan perhatian petani lebih fokus pada tanaman kelapa sawit, namun pada tahun 2018-2020 produksi kelapa kembali naik karena perawatan yang intensif disebabkan tingginya permintaan pasar. Jenis tanaman lainnya adalah kelapa sawit, turunnya harga CPO menyebabkan petani dan perusahaan besar enggan dalam perawatan dan pemberian pupuk terhadap tanaman kelapa sawit bahkan kegiatan panenpun tidak dilakukan dan buah yang seharusnya dipanen dibiarkan begitu saja karena tidak sebanding antara biaya operasional dengan hasil yang diperoleh.

Berikutnya, produksi kopi juga masih kurang maksimal dikarenakan perawatan kurang maksimal yang disebabkan kurangnya permintaan pasar terhadap kopi lokal. Sedangkan, pada tahun 2017 produksi lada meningkat signifikan karena adanya bantuan dari APBN dan perawatan yang maksimal. Namun pada tahun 2018-2020 produksi lada kembali normal karena kurangnya perawatan yang disebabkan akses penjualan produksi lada terbatas. Berbanding terbalik dengan produksi kakao, produksi tanaman kakao dari tahun ketahun mengalami penurunan yang disebabkan Tanaman kakao sudah tua sehingga tanaman mudah diserang hama dan penyakit yang mengakibatkan tanaman tidak produktif. Terakhir, produksi panili cengkeh dan tebu masih rendah karena petani kurang berminat untuk menanam panili, cengkeh dan tebu disebabkan peluang pasar terhadap hasil produksinya masih minim.

4. Kontribusi Sektor Kehutanan

Kontribusi subsektor kehutanan dan penebangan kayu terhadap PDRB ADHB sektor pertanian menggambarkan besaran yang disumbangkan oleh subsektor kehutanan dan penebangan kayu ke dalam sektor pertanian secara umum. Berdasarkan nominalnya, dalam lima tahun terakhir, nilai kontribusi sub sektor kehutanan di Kabupaten Nunukan menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan besaran rerata pertumbuhan sebesar 4,84 persen per tahun. Pada tahun 2016, sub

sektor kehutanan menyumbangkan sebesar 635,527 miliar rupiah, yang kemudian berfluktuasi sampai dengan tahun 2020 hingga besarnya menjadi 767,758 miliar rupiah. Meningkatnya nilai sub sektor kehutanan di kabupaten ini, berbanding terbalik dengan tingkat kontribusinya yang memiliki kecenderungan menurun. Pada tahun 2016, kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB sektor pertanian tercatat sebesar 16,82 persen, yang kemudian menunjukkan penurunan setiap tahunnya hingga menjadi 12,74 persen di tahun 2020.

Tabel II-11 Kontribusi Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Total PDRB (ADHB), serta PDRB Tanpa Migas di Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1	Jumlah kontribusi sub kehutanan	Juta Rp	635.527,12	618.561,74	657.753,96	728.569,04	767.758,03	4,84
2	Jumlah PDRB (ADHB) Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Juta Rp	3.778.207,62	4.321.541,68	4.896.121,35	5.552.463,88	6.027.676,73	12,39
3	Jumlah PDRB (ADHB)	Juta Rp	16.501.994,36	20.040.898,42	22.576.028,62	25.431.083,13	6.298.891,35	12,36
4	Jumlah PDRB (ADHB) tanpa migas	Juta Rp	16.065.948,70	19.598.650,40	22.107.845,90	24.937.096,20	25.818.086,20	12,59
5	Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persentase	16,82	14,31	13,43	13,12	12,74	(6,72)
6	Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB	Persentase	3,85	3,09	2,91	2,86	2,92	(6,69)
7	Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB Tanpa Migas	Persentase	3,96	3,16	2,98	2,92	2,97	(6,89)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, Tahun 2021

Perhitungan yang dijabarkan sebelumnya merupakan perhitungan yang dihitung dengan penyesuaian formula. Sementara itu, berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, indikator kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB dihitung dengan membandingkan antara jumlah kontribusi PDRB dari sektor kehutanan dengan total PDRB ADHB. Sama halnya dengan perhitungan yang dilakukan terhadap jumlah PDRB ADHB sektor pertanian, besaran kontribusi subsektor kehutanan terhadap total PDRB ADHB maupun PDRB tanpa migas menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB menunjukkan rata-rata pertumbuhan sebesar -6,69 persen per tahun, sementara besaran terhadap PDRB tanpa migas memiliki rerata pertumbuhan sebesar -6,89 persen per tahun, dengan besar kontribusi rata-rata di kisaran angka tiga persen.

5. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan

Kontribusi subsektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB ADHB sektor pertanian menggambarkan besaran yang disumbangkan oleh subsektor kelautan dan perikanan ke dalam sektor pertanian secara umum. Dalam lima tahun terakhir, sub sektor kelautan dan perikanan merupakan kontributor terbesar dalam menciptakan nilai tambah terbesar pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Nunukan, dengan rata-rata kontribusi sebesar 45,90 persen.

Tabel II-12 Kontribusi Sub Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Total PDRB (ADHB), serta PDRB Tanpa Migas di Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1	Jumlah kontribusi sub kelautan dan perikanan	Juta Rp	1.631.679,73	1.939.061,95	2.301.353,98	2.674.010,98	2.788.837,92	14,34
2	Jumlah PDRB (ADHB) Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Juta Rp	3.778.207,62	4.321.541,68	4.896.121,35	5.552.463,88	6.027.676,73	12,39
3	Jumlah PDRB (ADHB)	Juta Rp	16.501.994,36	20.040.898,42	22.576.028,62	25.431.083,13	6.298.891,35	12,36
4	Jumlah PDRB (ADHB) tanpa migas	Juta Rp	16.065.948,70	19.598.650,40	22.107.845,90	24.937.096,20	25.818.086,20	12,59
5	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Perse n	43,19	44,87	47,00	48,16	46,27	1,74
6	Kontribusi	Perse	9,89	9,68	10,19	10,51	10,60	1,76

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
	i sub sektor perikanan terhadap PDRB	n						
7	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB Tanpa Migas	Persen	10,16	9,89	10,41	10,72	10,80	1,55

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, Tahun 2021

Berdasarkan nominalnya, besaran nilai sub sektor kelautan dan perikanan dalam lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14,34 persen per tahun. Pada tahun 2016, besarnya tercatat sebesar 1,631 triliun rupiah dan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2020 besarnya menjadi 2,788 triliun rupiah.

Selanjutnya, berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, indikator kontribusi sub sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB dihitung dengan membandingkan antara jumlah kontribusi PDRB dari sektor kelautan dan perikanan dengan total PDRB (ADHB). Besaran kontribusi sub sektor kelautan dan perikanan baik terhadap total PDRB maupun PDRB tanpa migas menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan besaran rata-rata pertumbuhan sebesar 1,76 persen per tahun untuk kontribusi terhadap total PDRB, dan 1,55 persen per tahun untuk kontribusinya terhadap PDRB tanpa migas, dengan besar kontribusi rata-rata di kisaran angka sembilan hingga sepuluh persen.

6. Kontribusi Sektor Industri

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB menggambarkan posisi sektor industri pengolahan dalam struktur perekonomian wilayah. Sektor industri pengolahan terdiri atas dua subsektor besar, yaitu subsektor industri batu bara dan pengilangan minyak (migas), serta subsektor non migas dan batu bara, yang apabila dijabarkan terdapat 16 subsektor di bawah lapangan usaha ini. Berdasarkan strukturnya, sektor industri pengolahan merupakan penyumbang terbesar keempat terbesar dalam PDRB Kabupaten Nunukan setelah sektor pertambangan dan penggalian; sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; serta sektor konstruksi.

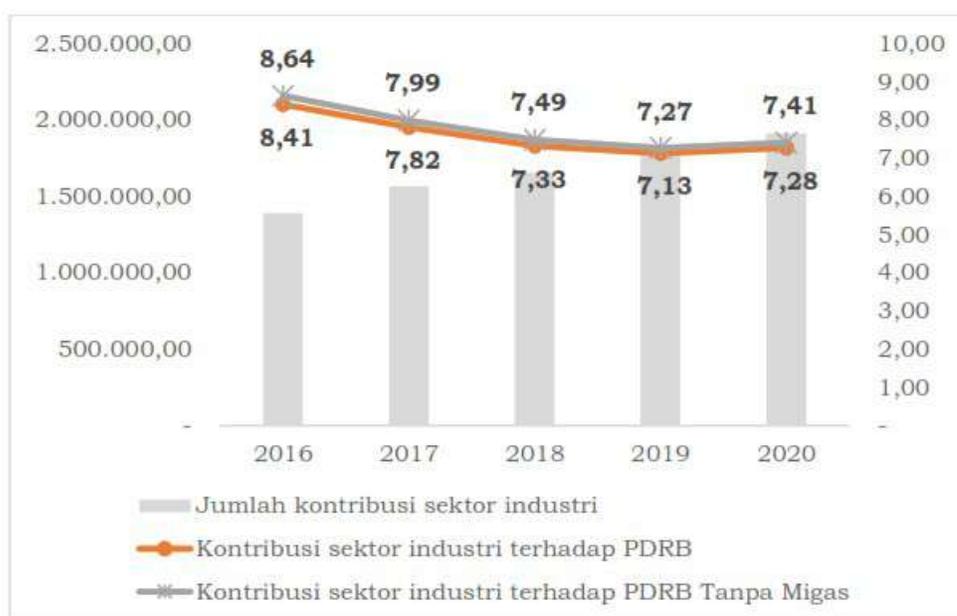
Tabel II-13 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB di Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1	Jumlah kontribusi sub industri	Juta Rp	1.388.350,88	1.566.662,07	1.654.775,76	1.813.393,90	1.913.620,64	8,35
2	Jumlah PDRB (ADHB)	Juta Rp	16.501.994,36	20.040.898,42	22.576.028,62	25.431.083,13	6.298.891,35	12,36
3	Jumlah PDRB (ADHB) tanpa	Juta Rp	16.065.948,70	19.598.650,40	22.107.845,90	24.937.096,20	25.818.086,20	12,59

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
	migas							
4	Kontribusi sub sektor industri terhadap PDRB	Persen	8,41	7,82	7,33	7,13	7,28	(3,56)
5	Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB Tanpa Migas	Persen	8,64	7,99	7,49	7,27	7,41	(3,76)

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Nunukan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

Sektor industri merupakan kontributor terbesar kedua dalam sektor sekunder setelah sektor konstruksi. Dalam lima tahun terakhir, sektor industri terhadap PDRB tercatat memiliki rata-rata kontribusi sebesar 7,59 persen dengan pergeseran sebesar -1,14 persen. Berdasarkan nominalnya, nilai sektor perdagangan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, yang ditandai dengan besaran rata-rata pertumbuhan sebesar 8,35 persen per tahun. Pada tahun 2016, besaran nilai sektor industri tercatat sebesar 1,388 triliun rupiah dan meningkat menjadi 1,913 triliun di tahun 2020.



Gambar II-6 Grafik Perkembangan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB di Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2020

Dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2020, capaian kontribusi sektor industri, baik terhadap total PDRB maupun PDRB tanpa migas menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhannya yang tumbuh negatif dengan rata-rata sebesar -3,56 persen per tahun. Pada tahun 2016, kontribusi sektor industri terhadap total PDRB di kabupaten ini tercatat sebesar 8,41 persen, yang kemudian mengalami penurunan sampai dengan tahun 2019 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -5,36 persen per tahun, hingga pada tahun tersebut capaiannya menjadi 7,13 persen. Pada tahun berikutnya, kontribusi sektor industri ini menunjukkan peningkatan dengan laju pertumbuhan

sebesar 2,04 persen, hingga capaian kontribusi sektor ini tercatat menjadi 7,28 persen di tahun 2020. Selanjutnya, dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB tanpa migas, dalam kurun waktu yang sama, besaran kontribusi sektor industri ini menunjukkan rata-rata pertumbuhan sebesar -3,76 persen per tahun. Pada tahun 2016, besaran kontribusi sektor ini tercatat 8,64 persen dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2020 hingga pada tahun tersebut besarnya menjadi 7,41 persen.

Sektor industri pengolahan secara kumulatif berkontribusi dengan berbagai usaha industri skala besar, menengah dan kecil. Jumlah Total industri di Kabupaten Nunukan sampai tahun 2021 sebesar 913 usaha dengan kapitasiasasi investai mencapai 4,4 triliun rupiah yang didominasi oleh perusahaan besar.

Tabel II-14 Jumlah, Nilai Produksi dan Investasi Industri Kabupaten Nunukan Tahun 2021

No	Data Industri	Kecil	Menengah	Besar	Total
1	Jumlah Perusahaan	896	4	13	913
2	Data Tenaga Kerja Industri	2.443	60	5.359	7.862
3	Data Nilai Produksi Industri	Rp 8.695.262.400	0	0	Rp 8.695.262.400
4	Data Investasi Industri	Rp 16.003.200.000	Rp 4.000.000.000	Rp 4.391.129.310.467	Rp 4.411.132.510.467

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Tahun 2021

B. Pertumbuhan Sektor Industri Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Nunukan pada tahun 2021 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Nunukan atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2021, mencapai 16,35 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 15,71 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,07 persen, meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 0,93 persen.

Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. Enam lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar lima hingga sembilan persen. Selain itu terdapat sebelas lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan kurang dari 5 persen.

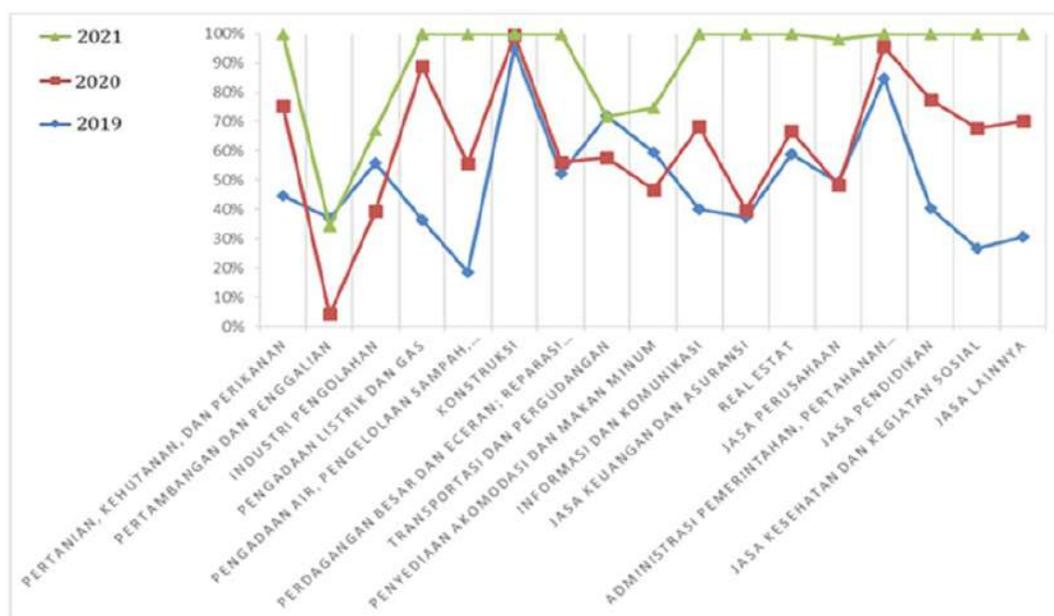
Keenam lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 5 persen hingga 9 persen tersebut antara lain: Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,87 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,05 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 7,03 persen; Jasa Keuangan & Asuransi sebesar 6,93 persen; Jasa lainnya sebesar 6,75 persen; dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,11 persen.

Sebelas lapangan usaha lainnya yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 5 persen adalah lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan sebesar 4,98 persen; Jasa Pendidikan sebesar 4,41 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 3,93 persen; Pertanian Kehutanan dan Perikanan sebesar 3,87 persen; Real Estate sebesar 3,21 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 2,46 persen; Industri Pengolahan sebesar 2,25 persen; Jasa Perusahaan sebesar 2,25 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 1,51 persen; Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0,38 persen; dan Konstruksi sebesar 0,05 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-15 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Nunukan Menurut Lapangan Usaha

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,03	4,83	3,87
2	Pertambangan dan Penggalan	6,09	- 5,40	4,98
3	Industri Pengolahan	4,54	- 1,34	2,25
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,01	11,60	2,46
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,54	5,09	6,11
6	Konstruksi	10,03	0,46	0,05
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,43	0,65	7,05
8	Transportasi dan Pergudangan	7,82	- 1,54	1,51
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,38	- 1,78	3,93
10	Informasi dan Komunikasi	8,87	6,26	7,03
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,28	0,27	6,93
12	Real Estat	5,69	0,77	3,21
13	Jasa Perusahaan	2,21	- 0,04	2,25
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,60	1,00	0,38
15	Jasa Pendidikan	7,89	7,25	4,41
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,32	11,28	8,87
17	Jasa lainnya	6,96	8,97	6,75
Produk Domestik Regional Bruto		6,78	- 0,93	4,07

Sumber: BPS Kabupaten Nunukan, 2022



Sumber: BPS Kabupaten Nunukan, 2022

Gambar II-7 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Nunukan Menurut Lapangan Usaha

Industri adalah suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku atau pembuatan barang jadi di pabrik dengan menggunakan keterampilan dan tenaga kerja (bahasa Inggris: *industrious*) dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil bumi, dan distribusinya sebagai kegiatan utama. Maka industri umumnya

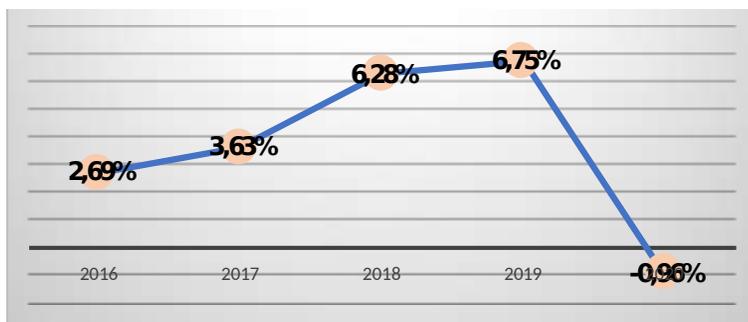
dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari usaha-usaha mencukupi kebutuhan (ekonomi) yang berhubungan dengan bumi, yaitu sesudah pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang berhubungan erat dengan tanah.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan berdasarkan harga konstan selama kurun waktu 5 tahun terakhir rata-rata mengalami pertumbuhan positif dikisaran angka 3-4 %. Akan tetapi pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,3 % akibat dampak dari pandemic Covid yang mengalami penurunan produksi dan lapangan usaha terutama sektor industri pengolahan.

Tabel II-16 Pertumbuhan Sektor Industri

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan (%) harga berlaku		12,84	5,62	9,59	5,53
Pertumbuhan (%) harga konstan	4,30	3,54	0,44	4,54	-1,30

Sumber: PDRB kabupaten Nunukan tahun 2021, BPS



Sumber: PDRB kabupaten Nunukan tahun 2021, BPS

Gambar II-8 Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Berdasarkan harga Konstan

Akan tetapi untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM) mengalami pertumbuhan positif selama 5 tahun terakhir. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kabupaten Nunukan, unit industri kecil terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, jumlah unit industri kecil ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan di tahun 2020 yaitu terjadi penurunan pertumbuhan sebesar 23,21 persen dari tahun sebelumnya.

Tabel II-17 Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah industri kecil	Unit	-	598	625	631	751
2	Pertumbuhan	Persen	-	-	4,32	36,84	13,63

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Tahun 2021

2.1.3.3. Ekspor dan Impor

Kabupaten Nunukan dipastikan jadi pintu masuk untuk kegiatan ekspor dan impor di Kalimantan Utara (Kaltara). Jalur-jalur resmi aktivitas perdagangan lintas negara terdapat di Pelabuhan Yamaker, SKPT Sebatik dan Pelabuhan Liem Hie Djung. Adapun kegiatan perdagangan ekspor pada tahun 2021 meliputi komoditas produksi batu bara, CPO, dan sebagainya dengan tujuan negara Jepang, India, China dan lainnya. Untuk lebih rinci mengenai kegiatan ekspor disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-18 Kegiatan Perdagangan Ekspor Kabupaten Nunukan Tahun 2021

No	Komoditi	Tujuan Ekspor	Volume		Nilai (Rp)
1	Produk Batubara	Jepang, India dan Filipina	618.113	TNE	921.909.044.000
2	Produk Kelapa Sawit (CPO-Kernel)	Malaysia, China, Vietnam	15.750	TNE	199.248.073.990
3	Produk Perikanan	Malaysia	861.945	Kg	9.047.930.000
4	Rumput Laut	Korea, Filipina	462	TNE	8.890.000.000
5	Makanan, Minuman dan Lainnya	Malaysia	84.522	PCE/KGM/CTN/BAL/Kg	1.272.864.000
TOTAL					1.140.367.911.990

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Nunukan, 2022

Selanjutnya dalam memenuhi kebutuhan pasar lokal dan nasional, Kabupaten Nunukan mencatat berbagai kegiatan perdagangan antar pulau dan antar provinsi. Barang komoditi yang diperdagangkan berupa rumput laut, bungkil sawit, beras krayan dan sebagainya. Berikut rincian kegiatan perdagangan antar pulau dan antar provinsi.

Tabel II-19 Kegiatan Perdagangan Antar Pulau dan Antar Provinsi Tahun 2021

No	Komoditi	Tujuan	Nilai (Rp)
1	Rumput Laut	Makassar	27.370.000.000
2	Bungkil Sawit	Surabaya	76.800.000
3	Produk Perikanan	Tarakan, Tanjung Selor, Pare-Pare	941.929.000
4	Beras Adan Krayan	Tarakan	364.320.000
5	Nenas Krayan	Tarakan	10.830.000
6	Garam Krayan	Tarakan	1.890.000
7	Melon	Tarakan	60.000.000
8	Semangka	Tarakan	28.500.000
TOTAL			28.854.269.000

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Nunukan, 2022

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa komoditas rumput laut menjadi idola di kegiatan perdagangan antar pulau dan antar provinsi dengan nilai mencapai Rp. 27.370.000.000,-. Ini membuktikan bahwa permintaan rumput laut Nunukan di pasaran nasional sangat tinggi. Adapun konsumen utamanya berasal dari Makassar.

3.2. Sumber Daya Industri

2.2.1. Sumber Daya Manusia Industri

2.2.1.1. Angkatan Kerja (Produktif)

Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Menurut ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah mereka yang berusia minimal 15 tahun sampai 65 tahun. Namun, tidak semua penduduk yang memasuki usia tadi disebut angkatan kerja. Sebab penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja, seperti ibu rumah tangga, pelajar, dan mahasiswa, serta penerima pendapatan (pensiunan).

Pembagian usia angkatan kerja dan bukan angkatan kerja Selain jumlah penduduk, pertumbuhan angkatan kerja dipengaruhi pula oleh struktur penduduk berdasarkan: jenis kelamin, usia penduduk, dan tingkat pendidikan. Makin banyak komposisi jumlah penduduk laki-laki dalam suatu negara, semakin tinggi pula angkatan kerja di negara itu. Hal ini disebabkan karena ibu rumah tangga tidak digolongkan sebagai tenaga kerja.

Tabel II-20 Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angkatan kerja 15 tahun ke atas*	Orang	-	94.137	99.233	98.891	97.570
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas**	Orang	-	133.513	137.914	146.820	145.828
3	Angka partisipasi angkatan kerja	Persen	-	70,51	71,95	67,36	66,91

Sumber: RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026

Berdasarkan data pada tabel di atas, rata-rata pertumbuhan angka partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Nunukan sebesar -1,67 selama kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2020. Angkatan kerja tertinggi berada pada tahun 2018 dengan persentase 71,95 persen dan jumlah angkatan kerja sebanyak 99.233.

Angka ini terus mengalami penurunan di tahun 2019 dan 2020. Menurunnya angkatan kerja 15 tahun ke atas di tahun 2020 berbanding lurus dengan menurunnya jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang ada di Kabupaten Nunukan yakni sebesar 992 orang yang menyebabkan menurunnya angka partisipasi angkatan kerja di tahun 2020.

Badan Pusat Statistik mendefinisikan TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) sebagai persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. Nilai TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai TPAK, semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Secara umum, tingkat partisipasi angkatan kerja dapat berfungsi untuk mengukur komposisi pasokan tenaga kerja di dalam perekonomian, membuat proyeksi pasokan tenaga kerja di masa depan, merumuskan kebijakan ketenagakerjaan, dan memahami perilaku pasar tenaga kerja dari berbagai kategori populasi.

Tabel II-21 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angkatan kerja 15 tahun ke atas*	Orang	75.016	94.137	99.233	98.891	97.570
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas**	Orang	21.492	133.513	137.914	146.820	145.828
3	Angka partisipasi angkatan kerja	Persen	61,75	70,51	71,95	67,36	66,91

Sumber: RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026

Selama kurun waktu lima tahun tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Nunukan bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, meskipun terjadi penurunan di dua tahun terakhir. Tahun 2016 TPAK sebesar 61,75 persen kemudian meningkat di tahun 2017 menjadi 70,51 persen. Tahun 2018 kembali meningkat menjadi 71,95 persen. Namun, di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 67,36 persen dan terus menurun di tahun 2020 menjadi 66,91 persen. Berbeda dengan Kabupaten Nunukan, tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Utara cenderung menurun di tahun 2017 hingga tahun 2019. Tahun 2017 TPAK Kalimantan Utara berjumlah 71,60 kemudian menurun menjadi 70,01 di tahun 2019. Secara keseluruhan, TPAK Provinsi Kalimantan Utara masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan TPAK yang ada di Kabupaten Nunukan.

Selanjutnya, Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja. Indikator rasio penduduk yang bekerja merupakan

ukuran Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Tingkat kesempatan kerja mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja di suatu wilayah.

Tabel II-22 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penduduk yang bekerja	Orang	-	87.319	94.421	95.021	93.532
2	Angkatan Kerja	Orang	-	94.137	99.233	98.891	97.570
3	Rasio Penduduk yang bekerja	Persen	-	92,76	95,15	96,09	95,86

Sumber: RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026

Berdasarkan data pada tabel di atas, selama kurun waktu empat tahun mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2020 rata-rata pertumbuhan rasio penduduk yang bekerja sebesar 1,11 dan cenderung meningkat. Hal ini bisa dilihat dari rasio penduduk yang berbanding lurus dengan peningkatan pada penduduk yang bekerja. tahun 2017, penduduk yang bekerja sebanyak 87.319 dan meningkat menjadi 93.532 dengan total peningkatan penduduk yang bekerja sebanyak 6.213 penduduk. Rasio penduduk yang bekerja tertinggi berada pada tahun 2019, yang mana angka ini menjadi angka tertinggi di antara seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.

2.2.1.2. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah peran penting untuk berdirinya suatu perusahaan. Dalam suatu perusahaan manusia perlu adanya komunikasi satu sama lain untuk mencapai sesuatu yang menjadi tujuan mereka. Sama halnya dengan perusahaan, perusahaan juga mempunyai tujuan yaitu ingin mendapat keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Masalah tenaga kerja merupakan masalah yang akan dihadapi oleh setiap perusahaan. Industri yang mengandalkan talenta, ketrampilan, dan kreativitas yang merupakan elemen dasar setiap individu. Perusahaan-perusahaan yang besar dan modern telah menggunakan mesin atau alat otomatis sampai pada komputer, tetapi yang mengatur semua jalannya mesin-mesin tersebut adalah manusia.

Dengan adanya industri dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai penghasilan yang mencukupi, dan pembangunan industri juga dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan. Selain itu, ada juga beberapa faktor pendukung bagi masyarakat untuk bekerja di perindustrian, seperti contoh yang pertama karena tingkat Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Banyaknya jumlah usaha sektor industri juga menjadi pilihan kedua dari sekian orang yang mencari pekerjaan. Bahwa semakin banyak pilihan kerja di sektor industri seperti perusahaan atau pabrik semakin tinggi pula lowongan atau lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja.

Selanjutnya, jumlah penduduk angkatan kerja. Angkatan kerja yang banyak diharapkan mampu meningkatkan kegiatan ekonomi yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa industri merupakan penerapan cara-cara yang canggih terhadap suatu produksi, yang didalamnya menggunakan mesin-mesin untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi.

Upah adalah imbalan dari perusahaan ke karyawan atas hasil atau kerja keras yang dilakukan. Dalam teori neoklasik menyatakan bahwa upah yang diperoleh sesuai dengan pertambahan hasil marginal yang didapat oleh karyawan. Dimana upah yang dimaksud disini adalah Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang pergerakannya relatif stabil dan ditentukan oleh kesepakatan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Selain itu upah juga dipengaruhi oleh kinerja dari masyarakat untuk pencapaian hidup yang

layak. Dalam hubungan antara upah minimum dan penyerapan tenaga kerja ada yang menjelaskan bahwa pemberlakuan upah minimum akan menyebabkan pengangguran, tetapi dari sisi lain pergeseran ini dapat menyebabkan perusahaan meningkatkan tenaga kerja dan laba menjadi maksimum.

Terdapat 4 macam jenis industri berdasarkan tenaga kerja yaitu industri rumah tangga, industri kecil, industri sedang, dan industri besar. Penggolongan perusahaan industri didasarkan pada banyaknya tenaga kerja yang bekerja, tanpa memperhatikan penggunaan mesin atau tidak dan tanpa memperhatikan besarnya modal perusahaan. Berikut gambaran klasifikasi industri berdasarkan besaran tenaga kerja.

Tabel II-23 Klasifikasi Industri Berdasarkan Besaran Tenaga Kerja

No	Jenis industri	Besaran Tenaga Kerja (orang)
1	Industri Rumah Tangga (mikro)	1 - 4
2	Industri Kecil	5 - 19
3	Industri Sedang	20 - 99
4	Industri Besar	> 100

Sumber: BPS, 2022

Apabila ditinjau ketersediaan pelaku industri kecil dan menengah di Kabupaten Nunukan, terdapat 723 unit pelaku industri dengan jumlah tenaga kerja sebesar 2.184 orang, untuk rinciannya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-24 Jenis Industri dan Tenaga Kerja Industri IKM

No	Komoditi IKM	Jumlah Unit	Tenaga Kerja
1	Industri Air Minum dan Mineral	91	38
2	Industri Pandai Besi	7	13
3	Industri Barang Anyaman Dari Rotan dan Bambu	106	336
4	Industri Barang Anyaman dari pandan	2	*
5	Industri Barang bangunan dari Kayu	3	6
6	Industri Barang dari Kulit	2	4
7	Industri barang dari Logam (Aluminium)	8	14
8	Industri Barang dari tanah dan semen	24	80
9	Industri Batik	4	*
10	Industri Bata - Keramik	52	294
11	Industri Bordir - bulu	1	*
12	Industri Furniture dari Kayu	66	129
13	Industri Gips	2	6
14	Industri Kapal - perahu	80	218
15	industri Kerupuk	33	187
16	Industri Kue basah	7	27
17	Industri Mie	2	5
18	Industri Percetakan Umum	8	17
19	Industri Pengeringa Ikan - Penggaraman	34	79
20	Industri Penggergajian Kayu	1	*
22	Industri Penggilingan padi dan Pengolahan Beras	35	129
23	Industri Pengolahan Garam	23	291
24	Industri Pengolahan Kopi- The	1	1
25	Industri Penjahit	78	132
26	Industri Produk Roti dan Kue	36	132
27	Industri Tempe	17	46
TOTAL		723	2.184

Ket: * tidak ada data

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2022

Tingkat penyerapan tenaga kerja untuk setiap industri di Kabupaten Nunukan dengan melihat rantai nilainya, tertinggi adalah industri pengolahan kelapa sawit, dimana setiap 1 unit industri dapat menyerap sekitar 613

tenaga kerja, kemudian industri rumput laut dengan tingkat penyerapan tenaga kerja 225.

Tabel II-25 Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Untuk Jenis Industri

No	Jenis Industri	Jumlah Unit	Jumlah TK Hulu	Jumlah TK Hilir	Penyerapan TK
1	Industri Olahan Rumput Laut	12	2.696		225
2	Industri Olahan Ikan	34	2342	79	17
3	Industri Pangan Olahan Ikan	76		346	5
4	Industri Pengawetan	34		79	2
5	Industri Pengolahan Kopi	3	87		29
6	Industri Pengolahan coklat	27	562		21
7	Industri Penggilingan dan Olahan Beras	35		129	4
8	Industri Pengolahan Ubi	35		129	4
9	Industri Pengolahan Jagung	35		129	4
10	Industri Pakan	0		0	0
11	CPO	21		12867	613
12	Minyak Goreng	21		12.867	613
13	Industri Pengolahan sawit lainnya	21		12.867	613
14	Industri Kerajinan barang rotan	106		336	3
15	Industri Kerajinan barang Bambu	106		336	3

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2022, diolah

2.2.2. Potensi Sumber Daya Alam Industri

Kabupaten Nunukan tergolong sebagai daerah memiliki potensi sumberdaya alam yang lengkap dan berlimpah namun masih belum termanfaatkan. Dalam perspektif dukungan sumber daya alam untuk pembangunan industri, berikut disajikan berbagai potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Nunukan seperti Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan perikanan, kehutanan dan pertambangan.

2.2.2.1. Tanaman Pangan

Kabupaten Nunukan memiliki komoditas alam yang sangat potensial yaitu Beras yang berasal dari Krayan. Produksi beras Krayan bahkan berkualitas ekspor terutama ke Negara Malaysia dan Brunei Darussalam. Produksi beras di Kecamatan Krayan termasuk surplus dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Nunukan. Hanya saja, hasil produksi tersebut harganya tidak mampu dijangkau oleh seluruh masyarakat karena harganya yang sangat tinggi. Ini diakibatkan oleh sulitnya akses transportasi untuk menembus lokasi di Kecamatan Krayan yang masuk kecamatan perbatasan.

Potensi padi sawah merupakan komoditas yang paling diunggulkan dari Kecamatan Krayan dibandingkan Padi Ladang (potensinya hampir tidak ada). Desa-desanya seperti Berian Baru, Terang Baru, Kuala Belawit memiliki luas lahan fungsional paling besar. Jika dikaji berdasarkan peta kesesuaian lahan, maka desa-desanya seperti Long Bawan, Long Nawang, Long Api, Berian Baru, Long Midang dan Kampung Baru adalah sesuai untuk pemanfaatan lahan pertanian dibandingkan desa-desanya lainnya.

Adapun potensi tanaman pertanian di Kabupaten Nunukan, meliputi: tanaman padi (padi sawah dan padi ladang) dan palawija (jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar). Berikut disajikan luas panen, produksi dan produktifitas tanaman pangan di Kabupaten Nunukan tahun 2021.

Tabel II-26 Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Tanaman Pangan di Kabupaten Nunukan Tahun 2021

NO	JENIS TANAMAN	LUAS PANEN	PRODUKSI	PRODUKTIVITAS
		(Ha)	(Ton)	(Ton/Ha)
1.	Padi	5.677	24.523,51	4,32
	- Padi Sawah	1.770	7.814,28	4,41
	- Padi Ladang	459	1.506,99	3,28
	- Padi Organik Krayan	3.448	15.202,23	4,41
2.	Jagung	59	291,35	4,94
3.	Kedelai	0	0,00	0,00
4.	Kacang tanah	36	43,97	1,22
5.	Kacang hijau	4	4,40	1,10
6.	Ubi kayu	767	21824,01	28,45
7.	Ubi jalar	65	440,70	6,78

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Nunukan, 2022

2.2.2.2. Perkebunan

Sektor perkebunan di Kabupaten Nunukan merupakan salah satu penopang ekonomi daerah yang sangat potensial. Sektor perkebunan yang menjadi primadona antara lain Kelapa sawit, Kakao, kopi, lada dan kelapa. Industri perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nunukan merupakan sektor unggulan yang tengah digalakkan melalui program sawit sejuta hektar. Areal pengembangan perkebunan dan industri pengolahan CPO dipusatkan disepanjang perbatasan Indonesia dan Malaysia.

Sentra perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nunukan dipusatkan di Kecamatan Sebuku, Sembakung dan Lumbis serta sebagian di Kecamatan Nunukan. Hingga saat ini telah beroperasi 2 pabrik pengolahan CPO milik PT. Comismar Wanamaja Agro dan PT. Nunukan Jaya Lestari, sementara pabrik milik PT. Karang Joang Hijau Lestari akan segera beroperasi juga.

Peluang investasi terbuka lebar bagi usaha perluasan kawasan perkebunan, industri pengolahan CPO, kilang minyak goreng maupun biodiesel dan industri turunan lainnya.

Selanjutnya, kakao merupakan komoditi perkebunan yang telah lama dikembangkan di Kabupaten Nunukan yang berpusat di Kecamatan Sebatik dan Sebatik Barat. Bersama pisang. Kakao telah menjadi komoditi perdagangan antar Negara oleh masyarakat di perbatasan. Biji kakao yang telah difermentasi dijual ke Negara Bagian Sabah, Malaysia oleh penduduk sebagai bahan baku industri makanan dan bubuk/susu cokelat.

Peluang investasi terbuka bagi industri pengolahan bubuk kakao, industri susu cokelat dan industri makanan. Peluang pasar terbuka lebar baik perdagangan dalam dan luar negeri dengan harga yang kompetitif mengingat ketersediaan bahan baku industri dalam negeri.

Usaha lain disektor perkebunan yang prospektif bagi pengembangan usaha dan Investasi di Kabupaten Nunukan adalah perkebunan Kelapa, Kopi, Lada dan Vanili. Sentra pengembangn komiditas tersebut berada di Kecamatan Sebatik, Sebuku dan Sembakung. Sedangkan untuk Vanili, dipusatkan di Kecamatan Krayan dan Krayan selatan, serta sebagian Kecamatan Lumbis.

Terdapat 10 (enam) jenis komoditi utama perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Nunukan sampai dengan tahun 2021 total luas areal yang dimanfaatkan seluas 266.553,83 Ha. Berikut disajikan rekapitulasi komoditas perkebunan.

Tabel II-27 Rekapitulasi Komoditas Perkebunan Kabupaten Nunukan Tahun 2021

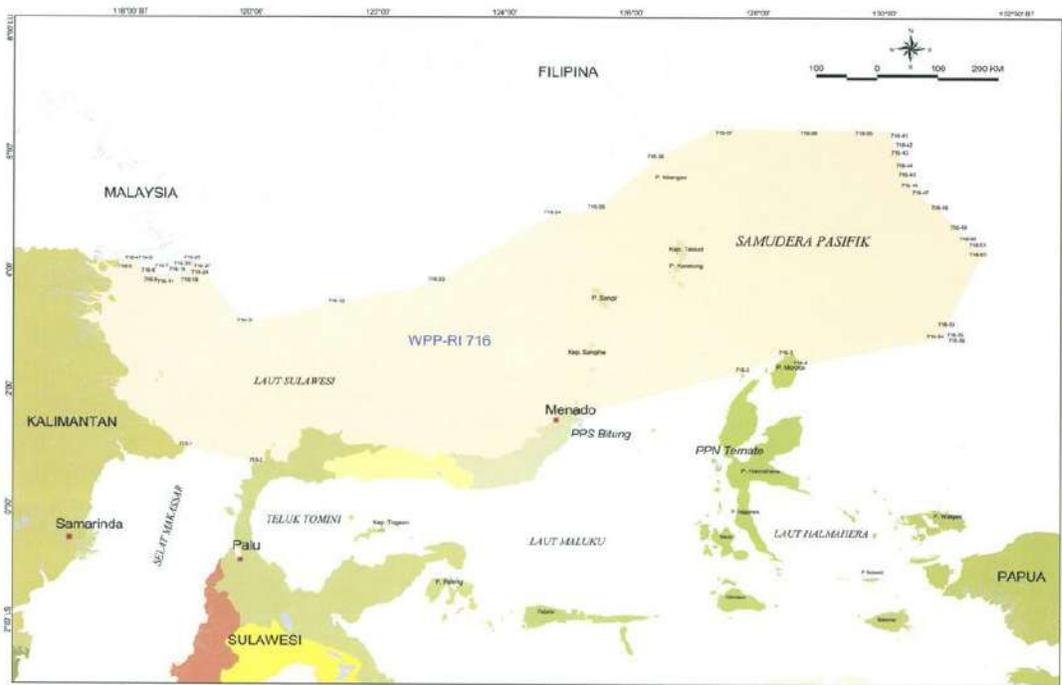
No	Komoditas	Luas (Ha) Tahun 2021	TBM	TM	TR/TTM	Produksi (Ton)
						Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Kelapa sawit	132.135,51	25.757,03	105.331,98	1.046,50	1.810.282,94
	- Perkebunan Besar Swasta	98.836,44	15.975,53	81.836,91	1.024,00	1.463.061,43
	- Perkebunan Rakyat	33.299,07	9.781,50	23.495,07	22,50	347.221,51
2	Kelapa dalam	305,51	19,41	279,55	6,55	898,77
3	Kakao	1.348,00	-	1.312,50	35,50	1.060,27
4	Kopi	116,50	45,00	62,50	9,00	26,22
5	Lada	168,85	73,85	92,00	3,00	21,74
6	Vanili	11,00	2,00	6,00	3,00	0,02
7	Karet	143,00	138,00	5,00	-	11,52
8	Cengkeh	140,25	117,75	14,50	8,00	1,82
9	Tebu	42,00	19,00	22,00	1,00	8,40
10	Aren	7,70	7,70	-	-	-

No	Komoditas	Produktivitas Rata-rata (Ton/Ha)	Harga Rata-rata (Rp)	Jumlah Tenaga Kerja	Wujud Produksi
1	2	8	9	10	11
1	Kelapa sawit	17,19			
	- Perkebunan Besar Swasta	17,88	1.123	12.867	TBS
	- Perkebunan Rakyat	14,78	2.034	9.567	TBS
2	Kelapa dalam	3,22	2.970	446	Biji kering
3	Kakao	0,81	18.525	562	Biji kering
4	Kopi	0,42	236.667	87	Biji kering
5	Lada	0,24	101.400	114	Biji kering
6	Vanili	0,00	1.500	19	Polong kering
7	Karet	2,30	5.000	145	Getah
8	Cengkeh	0,13	35.000	88	Biji kering
9	Tebu	0,38	910	66	Batang
10	Aren	-	-	-	

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Nunukan, 2022

2.2.2.3. Perikanan

Potensi perairan Kabupaten Nunukan sangat luas yang terdiri dari perairan laut dan perairan umum. Wilayah perairan Kabupaten Nunukan termasuk ke dalam WPP-RI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan Sebelah Utara Pulau Halmahera. sebagaimana diperlihatkan Gambar berikut.



Sumber: Permen KP. 01/2009

Gambar II-9 Wilayah Pengelolaan Perikanan 716

Nelayan Kabupaten Nunukan sendiri yang sebagian besar merupakan nelayan tradisional masih melakukan penangkapan hanya di sekitar perairan pantai Nunukan. Waktu tempuh yang dibutuhkan untuk mencapai daerah-daerah penangkapan tersebut berkisar antara setengah jam sampai satu jam. Daerah penangkapan ikan di Kabupaten Nunukan dapat dibagi dalam beberapa zona penangkapan sesuai dengan alat tangkap yang digunakan oleh nelayan setempat.

Daerah Muara Sungai Sebuku sampai di sebelah selatan Pulau Nunukan yaitu di antara Tanjung Cantik dan Pulau Pukat merupakan daerah operasi jaring kantong (trawl atau dogol) yang ditarik dengan kapal motor di bawah 5 GT. Sedangkan daerah operasi penangkapan dengan alat pancing hampir di semua perairan Kabupaten Nunukan. Di sepanjang pantai Pulau Sebatik sampai Tanjung Arus merupakan daerah operasi jaring klitik (pukat gondrong) dan jaring insang (gillnet). Daerah penangkapan kerang dara terdapat di sekitar Tanjung Cantik, di pantai timur Pulau Nunukan dan di sebelah selatan Pulau Tinabasan. Sedangkan daerah penangkapan tiram terdapat di sekitar Pulau Tinabasan. Daerah operasi alat tangkap tanang (hampang) dan jermal (kelong) terdapat di sekitar pantai timur Pulau Nunukan. Sedangkan di sebelah utara Pulau Bukat dan di sebelah selatan Pantai Nunukan merupakan daerah operasi alat tangkap julu (tugu).

Selain dari komoditas perikanan tangkap dan budidaya, Kabupaten Nunukan termasuk produsen rumput laut yang tertinggi. Budidaya rumput laut berkah bagi warga Nunukan dan sampai saat ini masih menjadi produk andalan bagi Pemerintah Daerah, produksi rumput laut Nunukan berbeda dengan daerah lain yang dapat memproduksi sepanjang Tahun. Setiap hari sudah menjadi rutinitas warga pesisir pantai yang bekerja di sentra rumput laut seperti pabettang untuk memasang bibit, dilaut terlihat aktifitas petani yang lagi menanam dan panen ada juga yang memukat sehingga ekonomi berputar dengan baik.

Sejak Tahun 2012, rumput laut masih menjadi unggulan, dan sampai saat ini dan belum ada produk unggulan lain yang mampu menyaingi baik sisi volume dan kontinuitas. Data pengiriman karantina ikan Tahun 2020 menunjukkan ada fluktuasi jumlah pengiriman tujuan Pare-Pare, Makasar, Surabaya, Jakarta dan Korea dengan kisaran harga 9.000/kg -15.000/kg.

Dalam tiga Tahun terakhir sejak Tahun 2019 lalu, harga rumput laut sangat tinggi mencapai 22.000/kg dengan rata-rata 18.000 perbulan. Kenaikan

harga yang sangat signifikan pada usaha rumput laut menimbulkan gairah ditingkat petani sehingga produksi rata-rata di Tahun 2019 mencapai 2.100 ton pertahun. Tahun 2020 dengan puncak pengiriman terjadi pada bulan april dan mei mencapai 2.149 ton.

Tahun 2021 pada bulan Januari Sampai Maret pengiriman rata-rata 3000 ton perbulan, pada bulan Maret produksi rumput laut mencapai 3.700 ton. Berdasarkan pengiriman paling banyak menuju Pare-Pare 54 persen, Surabaya 22 persen, Makassar 20 persen dan Jakarta 2 persen, Korea Selatan 2 persen. Berikut disajikan potensi, produksi dan nilai produksi perikanan di Kabupaten Nunukan berdasarkan komoditas.

Tabel II-28 Potensi, Produksi dan Nilai Produksi Perikanan di Kabupaten Nunukan, 2021

No	Komoditas	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (x1000 Rp.)
1	Budi Daya Laut	7.626,22	416.229,86	511.401.404,64
	↳ Rumput Laut	7.626,22	416.229,86	511.401.404,64
2	Budi Daya Payau (Tambak)	15.585,00	833,62	24.597.175,00
	↳ Bandeng		664,73	16.618.250,00
	↳ Udang Windu		96,79	5.807.400,00
	↳ Udang Bintik		69,22	2.076.600,00
	↳ Kepiting		0,92	46.000,00
	↳ Mujair		1,96	48.925,00
	↳ Nila			
3	Budidaya Air Tawar	7,48	21,63	290.553.840,00
	↳ Nila		7,18	272.840,00
	↳ Mas		3,81	190.500,00
	↳ Patin		3,01	150.500,00
	↳ Lele		7,63	289.940.000,00
4	Budi Daya Sawah (Minapadi)	300,00	1,54	69.435,00
	↳ Nila		1,54	69.435,00

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Nunukan, 2022

Apabila ditinjau dari jumlah armada penangkapan ikan di Kabupaten Nunukan yang difungsikan sebagai armada penangkapan ikan disajikan berikut.

Tabel II-29 Total Armada, Produksi dan Nilai Produksi Tahun 2021

Jenis Perairan	Kecamatan	Armada	Produksi	Nilai Produksi
Perairan Laut	Sebatik	348	624.830,52	23.661.257.000
	Sebatik Barat	465	834.902,85	31.616.335.000
	Sebatik Tengah	21	37.705,29	1.427.834.000
	Sebatik Timur	862	1.547.712,38	58.609.206.000
	Sebatik Utara	158	283.687,42	10.742.755.000
	Nunukan	299	536.851,51	20.329.643.000
	Nunukan Selatan	149	267.528,01	10.130.826.000
	Seimenggaris	39	70.024,11	2.651.693.000
	Sembakung	17	30.523,33	1.155.866.000
Total		2358	4.233.765	160.325.415.000
Perairan Umum	Sembakung	52	41.022,80	1.518.646.000
	Lumbis	5	3.944,50	146.024.000
	Lumbis Ogong	18	14.200,20	525.685.000

	Sebuku	37	29.189,30	1.080.575.000
	Tulin Onsoi	65	51.278,50	1.898.308.000
Total		177	139.635	5.169.238.000,00

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Nunukan, 2022

2.2.2.4. Pariwisata – Kehutanan (Kerajinan)

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang mempengaruhi perekonomian daerah. Eksistensinya mampu menjadi penggerak sektor lain seperti perdagangan, jasa, dan penyedia akomodasi.

Industri pariwisata adalah industri yang terdiri dari semua perusahaan yang menyediakan produk dan layanan yang dimaksudkan untuk digunakan oleh wisatawan pada berbagai tahap perjalanan dan pariwisata. Pada dasarnya pariwisata mencakup serangkaian kegiatan wisatawan yang saling terkait saat bepergian ke suatu tempat. Tidak seperti industri lainnya, pariwisata sebagai industri memiliki nilai yang sangat terbuka dan fleksibel karena mencakup berbagai hal, mulai dari transportasi, akomodasi hingga atraksi wisatanya itu sendiri. Jadi pariwisata sebagai industri dapat dikatakan berada pada sudut pandang ekonomi dan moneter dari pariwisata itu sendiri.

Industri pariwisata memiliki beberapa unsur. Unsur utama industri pariwisata adalah hal-hal yang mencakup berbagai hal yang penting untuk dimiliki oleh industri pariwisata. Unsur-unsur ini tentunya harus terdapat dalam setiap industri yang bergerak dalam hal pariwisata sebagaimana diuraikan berikut.

1. Transportasi

Unsur utama industri pariwisata yang sangat penting adalah transportasi. Unsur transportasi sangat perlu diperhatikan dengan baik karena layanan transportasi untuk para wisatawan harus dipastikan nyaman dan juga aman sehingga para wisatawan pun dapat berwisata dengan tenang dan senang.

2. Akomodasi

Unsur penting yang kedua yaitu akomodasi. Yang dimaksud akomodasi merupakan tempat di mana para wisatawan bisa tinggal untuk sementara. Akomodasi dapat berupa hotel, losmen, cottage, caravan, perkemahan dan yang lainnya.

3. Jasa Boga

Selanjutnya, unsur yang diperlukan adalah jasa boga. Jasa boga ini mencakup penyediaan makanan dan minuman. Pada unsur ini, industri pariwisata bisa memiliki berbagai pilihan untuk pengelolaannya. Penyediaan jasa boga ini dapat dikelola secara mandiri maupun bekerja sama dengan mitra lainnya yang memang fokus di bidang ini.

4. Atraksi Wisata

Unsur lainnya yang tak kalah penting selanjutnya merupakan atraksi wisata yang menjadi merupakan tujuan utama para wisatawan melakukan mengunjungi tersebut. Atraksi wisata ini dapat berupa tempat-tempat terkenal yang umum sering dikunjungi oleh wisatawan hingga berbagai pertunjukan ataupun budaya khas setempat.

Terdapat beberapa jenis industri pariwisata yang bisa dijadikan pilihan oleh para wisatawan. Mulai dari pariwisata lokal, pariwisata regional, pariwisata nasional, pariwisata regional-internasional hingga pariwisata internasional.

Berikut merupakan potensi unggulan di bidang industri pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Nunukan.

1. Islamic Centre



Islamic Centre terletak dipinggir selat antara Pulau Sebatik dan Pulau Nunukan menjadikan bangunan Islamic Centre yang begitu dibangun dengan

indahnyanya dapat terlihat dari kejauhan. Bagi seluruh orang yang baru datang dari Tarakan atau menuju ke Tarakan pasti dapat melihat bangunan Islamic Centre bagaikan menyambut kedatangan dan memberikan salam perpisahan ketika akan meninggalkan wilayah Nunukan.

Di depan mesjid Hidayaturrahman ini terdapat kolam air mancur dengan tugu air mancur berjumlah 6 buah. Pada sisi sebelah timur terdapat areal parkir dengan kapasitas lebih dari 100 kendaraan roda 4 dan lebih dari 500 kendaraan roda 2 pada sisi timur dan barat bangunan. Untuk menuju ke Islamic Centre dapat ditempuh dengan jalan darat dengan kondisi jalan yang sangat bagus dan lebar. Waktu tempuh dari alun-alun Kab. Nunukan selama 20 menit baik dengan kendaraan roda 2 menit maupun kendaraan roda 4.

2. Pantai Batu Lamampu



Sesuai dengan sejarahnya, batu lamampu bermakna batu yang menyembul keluar atau batu yang hidup. Potensi keindahan alam menjadi dasar utama

pengembangan batu lamampu sebagai daya tarik wisata.

Terdapat perbukitan kecil diujung pantai. Diatas bukit ini terdapat tiga batu besar utama dan 12 batu ukuran sedang. Untuk menuju batu lamampu, pengunjung dapat menaiki anak tangga yang terbuat dari beton. Terdapat mitos bagi warga masyarakat yang memiliki suatu keinginan dan mengikatkan tali atau kain pada akar dan batang pohon. Ikatan ini akan dilepas bilamana keinginan tersebut terkabul. Terdapat fasilitas pada yang lengkap baik sleter, toilet, warung dan tempat peristirahatan. Biaya masuk ke batu lamampu dilakukan dengan cara amal. Pengunjung memasukkan uang sumbangan pada kotak amal yang tersedia. Panjang Batu lamampu adalah sepanjang 2,27 km dengan kondisipasir yang coklat cenderung hitam. Kondisi pantai merupakan pantai yang landai dengan ombak laut dan angin cenderung kecil. Luas area 1 pantai relative lebar dengan ukuran hingga 65 meter. Karakteristik pantai yang cenderung berlumpur sehingga pada daerah perairan tidak ditemukan terumbu karang, pengunjung dapat menelusuri perairan tanpa takut kaki akan menginjak karang karena dasar pantai umumnya terbuat dari pasir. Transportasi yang digunakan bisa melalui darat maupun laut, seperti mobil, motor dan speedboat. Pada jalur darat Pantai Batu Lamampu dapat ditempuh dengan perjalanan selama 1 jam perjalanan

dari Pelabuhan Mantikas dan 30 menit dari Sungai Nyamuk (pusat kota Sebatik).

3. Tugu Dwikora



Tugu Dwikora merupakan wujud penghargaan Tentara Nasional Nunukan yang telah berjuang mempertahankan kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Tugu Dwikora terletak di pusat kota Kab. Nunukan dan diresmikan pada tanggal 14 Desember 2013 oleh Kepala Staff Angkatan Laut.

Tugu Dwikora dibangun disisi sebelah utara dari alun-alun Nunukan tepatnya disebelah Puskesmas Nunukan. Pada Tugu Dwikora ini diletakkan sebuah kendaraan tank dan sebuah artileri sebagai gambaran perjuangan masyarakat Nunukan saat mempertahankan kedaulatan Negara. Pada bagian depan Tugu Dwikora diletakkan foto-foto perjuangan masyarakat Nunukan bersama tentara Indonesia. Pada bagian tengah dari Tugu Dwikora terdapat tugu peringatan yang menjulang tinggi dengan latar belakang dinding yang dituliskan Tugu Dwikora.

4. Patok 3 Sebatik



Patok 3 adalah salah satu patok perbatasan Indonesia dan Malaysia yang bisa dikunjungi dari sejumlah patok yang ada di Pulau Sebatik. Patok ini terketak di Kawasan permukiman penduduk Aji Kuning. Diwilayah Patok 3

dijaga oleh Tentara Nasional Indonesiaberupa pos penjagaan yang berfungsi sebagai tempat pelaporan orang dari wilayah Malaysia atau Indonesia. Terdapat Tapal Batas yang telah dibangun sebagai penentuan batas negara pada tanggal 17 Agustus 2009, dibangun Tugu mini bertuliskan "Kokohkan Merah Putih di Tapal Batas Sebatik" yang ditandatangani Kapten AM. Sudirman selaku Danramil Pulau Sebatik dan H. Herman HB mewakili Tokoh Masyarakat Pulau Sebatik.

Kawasan Aji Kuning, sudah sejak lama menjadi jalur ekonomi, sehingga bisa sebagai lokasi keberangkatan warga Sebatik menuju Kota Tawao. Sabah (Malaysia). Dari kawasan ini merupakan jarak terdekat menuju negara tetangga Malaysia. Dengan naik kapal, tidak sampai 20 menit sudah tiba di Tawao. Lokasi Patok 3 dapat ditempuh dengan perjalanan selama 1 jam 40 menit dari pelabuhan mantikas melalui Sebatik Barat.

5. Bukit Yupai Semaring



Wilayah krayan terkenal dengan legenda Yuvai Semaring, seorang yang memiliki tubuh sangat

besar dan mendiami wilayah Bukit yang berada di sebelah barat long Bawan.

Bukit Yuvai Semaring memiliki ketinggian 800 meter dari permukaan long Bawan. Terdiri atas 2 perbukitan yaitu bukit bagian timur dan bukit Yuvai Semaring pada daerah bagian barat. Memiliki ukuran dataran 18 x 31 meter pada bagian puncak.

Bukit Yuvai Semaring menjadi ikon daya tarik wisata pada daerah long Bawan. Pada awal pendakian terdapat tangga yang terbuat dari beton hingga pertengahan perjalanan. Setelah pertengahan perjalanan, harus menelusuri jalan setapak dengan pemandangan yang indah dengan radius 360 derajat. Dari puncak Bukit Yuvai Semaring dapat terlihat areal permukaan Long Bawan, Bandara Yuvai Semaring, permukaan terang baru dan sejumlah permukaan disekeliling Long Bawan. Transportasi yang bisa digunakan hanya transportasi darat seperti mobil maupun motor kemudian ditempuh dengan jalan kaki proses pendakian membutuhkan waktu selama 40 menit.

6. Air Terjun Bangen Tawai Sekalayan

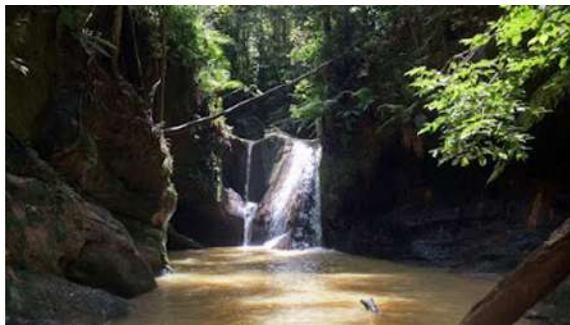


Air Terjun Bangen Tawai Sekalayan memiliki ketinggian kurang lebih 15 meter yang memiliki lebar air terjun seluas 50 meter. Air terjun ini masuk dalam wilayah Desa Sekaduyan Taka Kecamatan Sei

Manggaris Kabupaten Nunukan. Akses menuju ke lokasi air terjun dari Kota Nunukan (Pelabuhan Sei Bolong) menuju Pelabuhan Sei Ular (Desa Sekaduyan Taka).

Sebelum memasuki wilayah air terjun, akan berada di Kampung Dayak Suku Kenyah. Suku dayak Kenyah ini memiliki beberapa tarian adat dan juga alat musik tradisional. dengan adanya kampung tersebut akan menjadi daya tarik sendiri bagi para wisatawan untuk menikmati keindahan alam dan juga belajar budaya suku dayak kenyah.

7. Air Terjun Binusan



Air Terjun Binusan merupakan salah satu Daya tarik wisata alam yang ada di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan. Daya Tarik wisata yang ditawarkan berupa

wisata alam hutan dengan pemandangan Air terjun. Air Terjun Binusan terdiri atas 4 Tingkatan untuk mencapai Air terjun Binusan tingkat I dan tingkat II pengunjung hanya berjalan kaki kurang dari 200 meter dari lokasi parkir kendaraan. Tetapi untuk mencapai air terjun Binusan tingkat 3 dan 4 pengunjung hanya berjalan memasuki hutan Pagun Raya Binusan selama 1 jam dengan kondisi jalan setapak turunan dan tanjakan. Hutan alam dan air terjun yang menjadi daya tarik utama di kawasan ini. Daya tarik wisata lainnya ada budaya tradisional Tidung yang merupakan potensi sosial budaya di Desa Binusan.

8. Aneka Kerajinan Anyaman



UKM Centre Kabupaten Nunukan yang terletak di Jalan TVRI memasarkan kerajinan tangan lokal khususnya produk tangan suku Dayak dari Kecamatan

Sebuku, Sembakung dan Kecamatan Krayan (Selatan). Kerajinan tangan suku Dayak yang dipasarkan di UKM Centre tersebut berupa "sawung" atau topi hiasan dinding, bakul tempat nasi, tikar yang terbuat dari rotan.

2.2.3. Lembaga diklat dan litbang

Besarnya potensi sumber daya alam terutama pada komoditas industri yang dimiliki Kabupaten Nunukan tidak dapat dimanfaatkan seluruhnya. Hal ini menandakan masih rendahnya kualitas SDM sehingga perlu dikembangkan dan ditingkatkan dari sisi inovasi industri agar kualitas hasil produksi dapat terjaga.

Penguatan inovasi industri mampu memacu peningkatan daya saing. Oleh karena itu, pelaku industri dituntut untuk menguasai teknologi terkini dan aktif melakukan penelitian dan pengembangan. Adapun bentuk dari penguatan inovasi industri berupa perwujudan sinergitas dan kolaborasi ekosistem inovasi yang kondusif antar industri, asosiasi, akademisi dan lembaga pemerintah.

Salah satu wujud sinergitas dan kolaborasi ekosistem inovasi yang kondusif antar industri, asosiasi, akademisi dan lembaga pemerintah dapat berupa program-program pendidikan vokasi industri misalnya Politeknik dan Akademi Komunitas di Kawasan Industri yang dapat menghasilkan SDM industri yang berkualitas.

2.2.4. Pembiayaan Industri

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyatakan secara tegas bahwa Pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat dibentuk lembaga pembiayaan pembangunan industri yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi di bidang industri yang diatur dengan Undang-Undang. Untuk mencapai sasaran pembangunan industri jangka panjang diproyeksikan kebutuhan pembiayaan untuk investasi di sektor industri rata-rata tumbuh sebesar 15% (lima belas persen) per tahun dengan komposisi antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berimbang. Adapun potensi sumber pembiayaan untuk pembangunan industri di Kabupaten Nunukan dapat dilakukan melalui:

1. Perbankan;
2. Lembaga Pembiayaan;
3. Pasar Modal;
4. Modal Ventura;
5. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank);
6. Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA);
7. Pembiayaan Melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
8. Pembiayaan Melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); dan
9. Pembiayaan Melalui Kemitraan.

Kebutuhan pembiayaan industri tidak dapat dipenuhi dari kebijakan yang hanya diarahkan untuk pemberian insentif industri, namun dibutuhkan sistem pembiayaan industri secara khusus yang kompetitif. Perlu dipertimbangkan beberapa hal untuk meningkatkan peran perbankan, seperti: (i) memberikan

kemudahan prosedur pengajuan; (ii) memberikan tingkat suku bunga pinjaman yang kompetitif atau memberikan mekanisme bantuan subsidi hutang; dan (ii) memberikan kemudahan dalam merestrukturisasi hutang.

2.2.5. Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), pembangunan Kawasan Industri (KI) dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM).

Tarakan - Bulungan - Nunukan merupakan WPPI Provinsi Kalimantan Utara, maka dalam rencana pembangunan industrinya harus menyusun program-program untuk pengembangan dan penguatan WPPI ini. Oleh karena itu, maka program-program dimaksud harus disusun, diantaranya adalah:

- ↳ Percepatan Pembangunan penyiapan fasilitas terkait WPPI pada tiap-tiap kabupaten/ kota WPPI.
- ↳ Pengembangan industri sebagai pendukung WPPI untuk kabupaten/ kota non WPPI.

Dengan memperhatikan kondisi WPPI Kalimantan Utara, saat ini diperlukan adanya upaya untuk melakukan integrasi pengembangan perwilayahan industri dengan mengembangkan Kawasan Industri formal guna mendukung pengembangan WPPI di provinsi ini. Terdapat beberapa lokasi yang dipandang layak untuk dikembangkan sebagai Kawasan Industri. Dalam pengembangannya masing-masing Kawasan Industri ini masih perlu banyak dukungan Kebijakan pemerintah terutama terkait dengan ketersediaan fasilitas seperti sarana dan prasarana basis KI, tersedianya energi listrik, air bersih, pelabuhan, energi, transportasi. Kawasan Industri tersebut merupakan Issue strategis Nasional yang harus dilaksanakan dalam menopang dan membangun perekonomian Nasional.

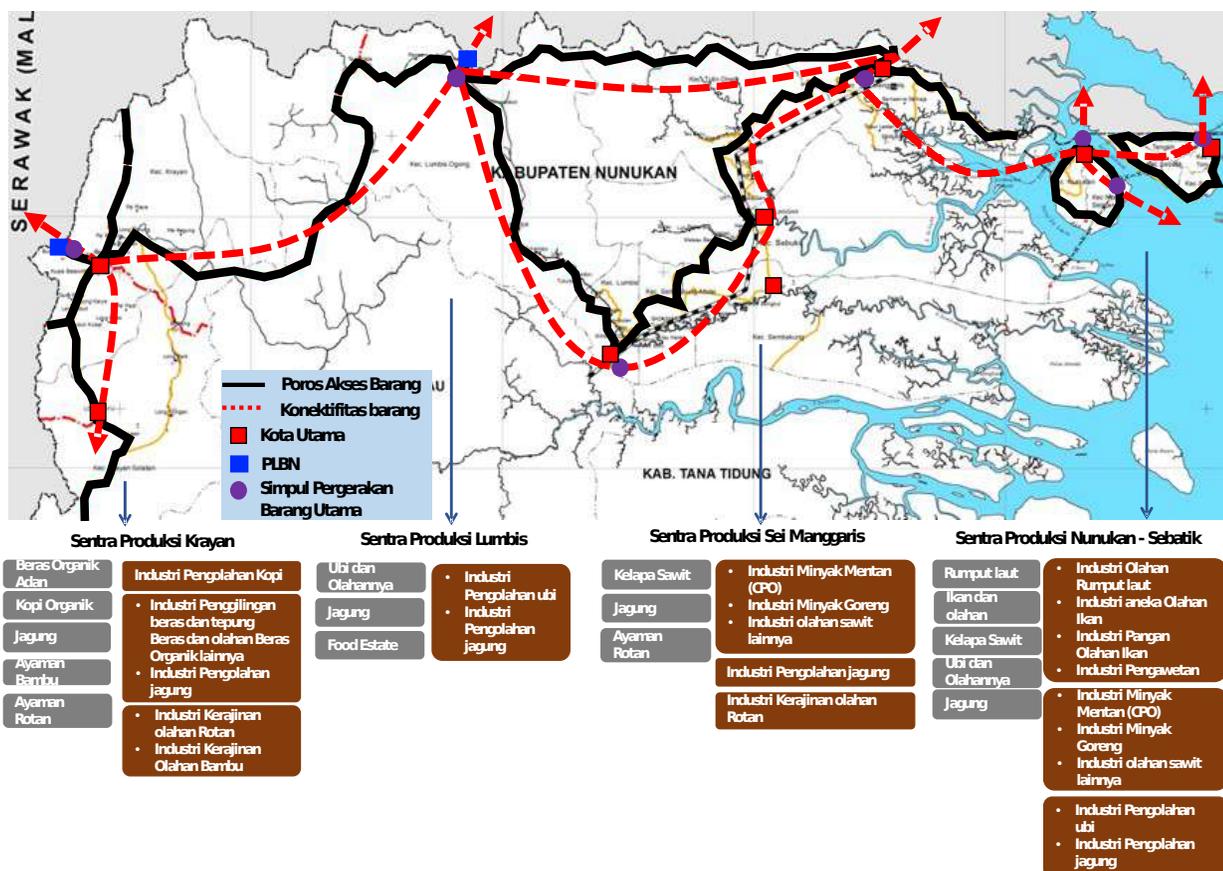
Tabel II-30 Pengembangan Perwilayahan Industri

No	Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri	Arahan Pengembangan
1	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara No. 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2038	<ul style="list-style-type: none"> ↳ Perwilayahan industri (Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Nunukan) <ul style="list-style-type: none"> • Kec. Sei manggaris 157 Ha; • Kec. Sebatik Barat 12,3 Ha; • Kec. Sebuku 28,3 Ha; dan • Kec. Lumbis 29 Ha.
2	Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No. 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2026	<p>Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Nunukan 2021 – 2026</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Kewilayahan - Wilayah Kepulauan <ul style="list-style-type: none"> ➢ Wilayah Nunukan <ul style="list-style-type: none"> → Fungsi dan Peran <ul style="list-style-type: none"> • Pintu gerbang internasional • Simpul transportasi • Pusat pertumbuhan ekonomi berupa perdagangan dan industri (terbatas) Produk Unggulan → Produk unggulan : kelapa sawit, ubi dan olahannya dan jagung; <ul style="list-style-type: none"> • Produk Andalan : ikan dan olahannya, padi dan buah-buahan; • Produk potensial : jeruk, ayam potong, sarang walet. ➢ Wilayah Sebatik <ul style="list-style-type: none"> → Fungsi dan Peran <ul style="list-style-type: none"> • Pintu gerbang internasional; • Simpul transportasi; • Mengembangkan kawasan perdagangan perbatasan Sebatik yang berhadapan dengan Kota Tawau; dan • Mengembangkan industri pengolahan hasil sumberdaya bahari dan

No	Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri	Arahan Pengembangan
		<p>pertanian/ . Perkebunan.</p> <ul style="list-style-type: none"> → Produk Unggulan <ul style="list-style-type: none"> • Produk unggulan : rumput laut, kelapa sawit dan jagung; • Produk Andalan : ikan dan olahannya, kakao dan olahannya, padi; • Produk potensial : wisata batas negara, jeruk, lada dan kelapa. ↘ Kewilayahan - Dataran Tinggi Krayan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wilayah Krayan dan Krayan Selatan <ul style="list-style-type: none"> → Fungsi dan Peran <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan aksesibilitas wilayah • Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Wilayah Perbatasan Negara, salah satunya PLBN Long Midang • pusat pelayanan ekonomi di wilayah perbatasan yang bertumpu pada potensi unggulan daerah yakni pertanian organik. → Produk Unggulan <ul style="list-style-type: none"> • Produk unggulan : beras organic Adan Krayan, kopi organic krayan, jagung • Produk Andalan : anyaman bamboo dan rotan, garam Krayan • Produk potensial : ternak dan nenas ↘ Kewilayahan - Dataran I Sei Manggaris-Mensalong <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wilayah Sembakung, Sembakung Atulai, Tulin Onsoi, Sebuku, Sei Manggaris <ul style="list-style-type: none"> → Fungsi dan Peran <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan sentra produksi (KSP) yakni Kawasan budidaya yang potensial dan prospektif untuk dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan dan pengembangan kegiatan produksi pertanian; • Peningkatan aksesibilitas wilayah. → Produk Unggulan <ul style="list-style-type: none"> • Produk unggulan : kelapa sawit, jagung; • Produk Andalan : anyaman rotan; • Produk potensial : sarang walet. ↘ Kewilayahan Dataran II Binter-Labang-Tau Lumbis <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wilayah Lumbis Ogong, Lumbis Pansiangan, Lumbis Hulu. <ul style="list-style-type: none"> → Fungsi dan Peran <ul style="list-style-type: none"> • Sebagai daerah pedalaman perlu peningkatan aksesibilitas wilayah • Meningkatkan pengelolaan sumberdaya hutan serta sumberdaya alam potensial lainnya • Memanfaatkan keberadaan PKSN Wilayah Perbatasan Negara Tau Lumbis (PLBN Terpadu Labang) diharapkan berkembang menjadi Kawasan yang berpotensi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi kawasan di sekitarnya. → Produk Unggulan <ul style="list-style-type: none"> • Produk unggulan : jagung, ubi dan olahannya; • Produk potensial : wisata arum jeram.
3	Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033	<ul style="list-style-type: none"> ↘ Kawasan peruntukan industri menengah beserta jasa pendukungnya meliputi jasa pergudangan, pengolahan kelapa sawit, perikanan dan lain-lain yang bersifat agroindustri, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kawasan pergudangan di Kecamatan Nunukan; ➤ Industri pengolahan kelapa sawit di Kecamatan Lumbis, Sebuku, Sembakung dan Simanggaris ; ➤ Industri perikanan di Kecamatan Sebatik dan

No	Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri	Arahan Pengembangan
		<p>dan di Mensapa Kecamatan Nunukan Selatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Industri lain yang bersifat agroindustri di wilayah perkotaan Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik. <p>☛ Kawasan peruntukan industri kecil dan rumah tangga tersebar pada pusat-pusat pemukiman /kota kecamatan.</p>
4	Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/488/X/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Produk Unggulan, Produk Andalan dan Produk Potensial Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026	<p>☛ Produk Unggulan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rumput Laut, Lokasi pengembangan di Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik barat; ➤ Kelapa Sawit, Lokasi pengembangan di Sei manggaris, Nunukan Selatan, Sebatik barat, Sebuku, Tulin Onsoi dan Sembakung; ➤ Beras Organik Adan dan Kopi Organik Krayan, Lokasi pengembangan di Dataran Tinggi Krayan; ➤ Ubi dan Olahannya, Lokasi pengembangan di Pulau Nunukan, Sebuku, Sembakung, Tulin Onsoi, Sembakung Atulai dan Lumbis; ➤ Jagung, Lokasi pengembangan di Kabupaten Nunukan. <p>☛ Produk Andalan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ikan dan Olahannya, Lokasi pengembangan di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik; ➤ Kakao dan Olahannya, Lokasi pengembangan di Sebatik Tengah; ➤ Pisang dan Olahannya, Lokasi pengembangan di Pulau Sebatik; ➤ Padi, Lokasi pengembangan di Pulau Nunukan dan Sebatik; ➤ Anyaman Bambu Rotan, Lokasi pengembangan di Dataran Tinggi Krayan; ➤ Anyaman Rotan, Lokasi pengembangan di Sembakung dan Sembakung Atulai; ➤ Garam Krayan, Lokasi pengembangan di Dataran Tinggi Krayan; ➤ Semangka, Melon dan durian, Lokasi pengembangan di Nunukan Selatan <p>☛ Produk Potensial Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wisata Arung Jeram, Lokasi pengembangan di Lumbis Pansiangan; ➤ Wisata Patok 3, Lokasi pengembangan di Sebatik Tengah; ➤ Kerbau, Lokasi pengembangan di Dataran Tinggi Krayan; ➤ Nenas Krayan, Lokasi pengembangan di Krayan; ➤ Jeruk, Lokasi pengembangan di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik; ➤ Ayam Potong, Lokasi pengembangan di Pulau Nunukan ➤ Lada, Lokasi pengembangan di Pulau Sebatik; ➤ Kelapa Dalam, Lokasi pengembangan di Sebatik Barat; dan ➤ Sarang Walet, Lokasi pengembangan di Pulau Nunukan dan Sembakung.
5	<p>SK Bupati Nunukan no. 169/2005 tentang Penunjukan Lokasi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) dan Pengembangan Industri Perikanan Terpadu</p> <p>Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor. 47/2006 tentang Penunjukan Lokasi Penambahan Pelabuhan Perikanan Nusantara dan</p>	<p>☛ Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) dan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (Marine Technopark) Masapa di Kecamatan Nunukan Selatan seluas 32 Ha.</p> <p>☛ Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) dan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (Marine Technopark) Masapa di Kecamatan Nunukan Selatan seluas 18 Ha.</p>

No	Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri	Arahan Pengembangan
	Pengembangan Industri Perikanan Terpadu (Perubahan)	
	Tanggal 2 Oktober 2012 kawasan industri ini ditetapkan Bupati Nunukan dengan surat pernyataan penguasaan tanah	↳ Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) dan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (Marine Technopark) Masapa di Kecamatan Nunukan Selatan seluas 50 Ha.
6	Surat Keputusan Bupati Nunukan No. 188.45/669/VIII/2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan	↳ Kawasan Pembangunan Technopark Pertanian Organik seluas 12,9 Ha.



Gambar II-10 Arah Pengembangan Industri Kabupaten Nunukan

3.3. Sarana dan Prasarana

2.3.1. Transportasi

Sebagai kawasan yang memiliki wilayah yang terpisah, maka sistem transportasi yang terintegrasi merupakan kebutuhan pokok pengembangan infrastruktur di Kabupaten Nunukan. Oleh karena itu, pengembangan sistem transportasi direncanakan secara terpadu, melalui kombinasi transportasi darat, air (sungai dan laut), dan udara.

1. Pengembangan jaringan jalan

Dilayani oleh jaringan arteri primer dengan ruas jalan trans Kalimantan yang menghubungkan Ibukota Propinsi Samarinda hingga ke Sei Manggaris sampai batas negara serta jalan lingkaran Pulau Sebatik.

Pengembangan jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan pusat pengembangan di barat – tengah dan Timur yaitu dari Long Layu (Krayan) – Long Bawan (Krayan) – Tau Lumbis (Lumbis Ogong) – Mansalong (Lumbis) sampai Sei Manggaris dan Perbatasan Negara.

2. Pengembangan jaringan prasarana lalu-lintas (simpul pergerakan darat), berupa:
 - a. Terminal Barang di Kecamatan Nunukan dan di Kecamatan Sebatik Barat;
 - b. Jembatan timbang di Kecamatan Sei Menggaris, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Nunukan Selatan dan Kecamatan Krayan.
3. Pengembangan jaringan sungai, danau dan penyeberangan, terdiri dari:
 - a. Alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau yaitu alur pelayaran kelas II, terdiri atas : Nunukan-Sebatik (Nunukan-Bambangan, Sedadap-Mantikas, Nunukan-Sungai Nyamuk); Nunukan-Sei Menggaris; Nunukan-Sei Ular; Nunukan- Tanjung Selor; Mensalong-Binter-Tau Lumbis; Mensalong-Tarakan; Sebuku-Tarakan; Nunukan-Pembeliangan; dan Nunukan-Atap-Tarakan.
 - b. Lintas penyeberangan antar negara, terdiri atas : Nunukan – Tawau (Sabah Malaysia); Nunukan – Tawi-Tawi (Filipina); Pulau Sebatik – Tawau (Sabah Malaysia); dan Pulau Sebatik – Tawi-Tawi (Filipina).
 - c. Lintas penyeberangan antar provinsi, terdiri atas : Nunukan – Pare-Pare (Sulawesi Selatan); Nunukan-Mamuju (Sulawesi Barat); Nunukan-Pantoloan (Sulawesi Tengah); dan Nunukan-Toli-Toli (Sulawesi Tengah).
 - d. Lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi, terdiri atas : Nunukan-Sebatik; Nunukan-Tarakan; Nunukan-Tanjung Selor; Sebuku-Tarakan; Sembakung-Tarakan; Nunukan-Tarakan-Ancam; dan Sebatik-Tarakan.
 - e. Lintas penyeberangan dalam kabupaten, terdiri atas : Nunukan (dermaga Inhutani)-Sei Menggaris (dermaga Ferum); Nunukan (dermaga Inhutani)-Sebakis (Pangkalan Rahayu); Nunukan (dermaga Inhutani)-Sei Menggaris (dermaga Tabur Lestari); Nunukan (dermaga Inhutani)-Mantikas (dermaga Binalawan); Nunukan (dermaga Inhutani)-Sei Menggaris (Semaja); Nunukan (dermaga Sei Bolong)-Bambangan (dermaga Bambangan); Nunukan (dermaga Sei Bolong)-Sei Ular (dermaga Sei Ular); Nunukan (dermaga Sei Bolong)-Kanduangan; Nunukan (dermaga Sei Bolong)-Sei Menggaris (dermaga Sekitang Baru); Nunukan (dermaga Sei Bolong)-Sei Menggaris (dermaga Ferum); Nunukan (dermaga Sei Jepun)-Mantikas (dermaga Binalawan); Nunukan (PLBL Liem Hie Djung)-Sebuku (dermaga Aki Betawol); Nunukan (PLBL Liem Hie Djung)-Sebakis (Pangkalan Rahayu); Nunukan (PLBL Liem Hie Djung)-Mantikas (dermaga Binalawan); Mantikas (dermaga Binalawan)-Nunukan (Sei Jepun); Mantikas (dermaga Binalawan)-Nunukan (PLBL Liem Hie Djung); Bambangan (dermaga Bambangan)- Nunukan (dermaga Sei Bolong); Sembakung (Pelabuhan Djang Kida)-Sembakung (Tembelunu); Sembakung (Pelabuhan Djang Kida)-Sembakung (Tepian); Sebuku (dermaga Aki Betawol)- Nunukan (PLBL Liem Hie Djung); Sebuku (dermaga Aki Betawol)- Nunukan (Sumber Mas); Sei Ular (dermaga Sei Ular)-Nunukan (dermaga Sei Bolong); Sei Ular (dermaga Sei Ular)- Bambangan (dermaga Bambangan); Sei Menggaris (dermaga Sekitang Baru)- Nunukan (dermaga Sei Bolong); Sei Menggaris (dermaga Tabur Lestari)- Nunukan (dermaga Inhutani); Mansalong (Daapiton)-Lumbis Ogong (Binter); Mansalong (Daapiton)-Lumbis Ogong (Tau Lumbis); Mansalong (Daapiton)-Lumbis Ogong (Sumentobol); Mansalong (Daapiton)-Lumbis Ogong (Labang); Mansalong (Daapiton)-Lumbis Ogong (Panas); Mansalong (Daapiton)-Lumbis Ogong (Sukamaju); Mansalong (Daapiton)-Duyan (Lumbis Hulu); Nunukan (Dermaga Jamaker)-Sebuku (Dermaga Aki Betawol); Nunukan (Dermaga Jamaker)-Bambangan (dermaga Bambangan); Nunukan (Dermaga Jamaker)-Sebakis (dermaga Sebakis); dan Nunukan (Dermaga Jamaker)- Mantikas (dermaga Binalawan).

- f. Pelabuhan sungai dan danau meliputi :
- Pelabuhan sungai dan danau pengumpul, terdiri atas: Pelabuhan Liem Hie Djung di Kecamatan Nunukan; Pelabuhan Sungai Sekitang Baru di Kecamatan Sei Menggaris; Pelabuhan Sei Ular di Kecamatan Sei Menggaris; Pelabuhan Sungai atap di Kecamatan Sembakung; Pelabuhan Sungai Daapiton di Kecamatan Lumbis; Pelabuhan Sungai Akibetawol di Kecamatan Sebuku; Pelabuhan Sungai Binter di Kecamatan Lumbis Ogong; dan Pelabuhan Sungai Tau Lumbis di Kecamatan Lumbis Pansiangan.
 - Pelabuhan sungai dan danau pengumpan, terdiri atas: Pelabuhan Sungai Tabur di Kecamatan Sei Menggaris; Pelabuhan Sungai Sebakis di Kecamatan Sei Menggaris; Pelabuhan dermaga Kandungan di Kecamatan Sei Menggaris; Pelabuhan dermaga Pangkalan Jauhari di Kecamatan Sei Menggaris; Pelabuhan Sungai Sei Bolong di Kecamatan Nunukan; Pelabuhan Sungai Jamaker di Kecamatan Nunukan; Pelabuhan Dermaga Inhutani di Kecamatan Nunukan; Pelabuhan Sungai Bulu Mungolong di Kecamatan Lumbis Ogong; Pelabuhan Sungai Labang di Kecamatan Lumbis Pansiangan; Pelabuhan Sungai Sumantipal di Kecamatan Lumbis Pansiangan; Pelabuhan Sungai Panas di Kecamatan Lumbis Hulu; Pelabuhan Sungai Duyan di Kecamatan Lumbis Hulu; dan Pelabuhan Dermaga Bambang di Kecamatan Sebatik Barat.
- g. Pelabuhan penyeberangan kelas II, terdiri atas: Pelabuhan Penyeberangan Liem Hie Djung di Kecamatan Nunukan; Pelabuhan Penyeberangan Binalawan di Kecamatan Sebatik Barat; Pelabuhan Penyeberangan Semaja di Kecamatan Sei Menggaris; Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun di Kecamatan Nunukan Selatan; dan Pelabuhan Penyeberangan Liang Bunyu di Kecamatan Sebatik Barat.
4. Pengembangan pelabuhan laut, terdiri dari:
- a. Pelabuhan pengumpul, terdiri atas; Pelabuhan Tunon Taka di Kecamatan Nunukan; dan Pelabuhan Sungai Nyamuk di Kecamatan Sebatik Timur.
 - b. Pelabuhan pengumpan, meliputi:
 - Pelabuhan pengumpan regional, terdiri atas: Pelabuhan Liem Hie Djung di Kecamatan Nunukan; dan Pelabuhan Sei Pancang di Kecamatan Sebatik Utara.
 - Pelabuhan pengumpan lokal, terdiri atas: Pelabuhan Sei Jepun Kecamatan Nunukan Selatan; Pelabuhan Sungai atap di Kecamatan Sembakung; Pelabuhan Sebakis di Kecamatan Sei Menggaris; Pelabuhan Semaja di Kecamatan Sei Menggaris; Pelabuhan Sungai Akibetawol di Kecamatan Sebuku; Pelabuhan Binalawan di Kecamatan Sebatik Barat; Pelabuhan Liang Bunyu di Kecamatan Sebatik Barat; Pelabuhan Bambang di Kecamatan Sebatik Barat; dan Pelabuhan Sei Fatimah di Kecamatan Nunukan.
 - c. Terminal umum, yaitu Pelabuhan Liem Hie Djung di Kecamatan Nunukan.
 - d. Pelabuhan perikanan, meliputi: Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Mansapa di Kecamatan Nunukan Selatan; dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sebatik di Kecamatan Sebatik Utara.
5. Rencana pengembangan jaringan kereta api, berupa jaringan jalur kereta api umum yang merupakan jaringan jalur kereta api antarkota di Provinsi Kalimantan Utara, terdiri atas :
- a. Tanjung Redeb (Provinsi Kalimantan Timur)-Tanjung Selor-Tana Tidung – Malinau-Sei Menggaris;

- b. Sei Menggaris-Nunukan-Sungai Nyamuk;
 - c. Sei Menggaris-Lumbis-Long Bawan;
 - d. Lumbis-Malinau;
 - e. Long Bawan-Malinau;dan
 - f. Malinau-Long Loreh-Long Alango- Pa Dalam-Long Bawan.
6. Rencana pengembangan sistem transportasi udara, terdiri dari:
- a. Bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier pada bandar udara Nunukan di Kecamatan Nunukan.
 - b. Bandar Udara Pengumpan, terdiri atas: Bandar Udara Long Layu di Kecamatan Krayan Selatan; Bandar Udara Yuvai Semaring di Kecamatan Krayan; Bandar Udara Sebatik di Kecamatan Sebatik; Bandar Udara Binuang di Kecamatan Krayan Tengah; Bandar Udara Bulawan Sumbingkai di Kecamatan Lumbis Hulu.
 - c. Bandar udara khusus, terdiri atas: Bandar udara Sebuku di Kecamatan Sebuku; Bandar udara Pa'Upan di Kecamatan Krayan Selatan; Bandar udara Tau Lumbis di Kecamatan Lumbis Hulu; Bandar udara Long Padi di Kecamatan Krayan Tengah; Bandar udara Kampung Baru di Kecamatan Krayan Timur; Bandar udara Long Rungan di Kecamatan Krayan Selatan; Bandar udara Buduk Kubul di Kecamatan Krayan Barat; Bandar udara Lembudud di Kecamatan Krayan Barat; Bandar udara Berian Baru di Kecamatan Krayan Barat; Bandar udara Kurid di Kecamatan Krayan Barat; dan Bandar udara Mansalong di Kecamatan Lumbis.

2.3.2. Energi

Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, terdiri atas :

1. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, terdiri atas:
 - a. Pembangkit listrik tenaga air (PLTA), terdiri atas:
 - PLTA Sei Sembakung di Kecamatan Lumbis Ogong;
 - PLTA Ruah Sebling di Kecamatan Krayan Tengah.
 - b. Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Nunukan.
 - c. Pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), yang terdiri atas:
 - PLTD Sungai Bilal di Kecamatan Nunukan;
 - PLTD Sungai Nyamuk di Kecamatan Sebatik Timur;
 - PLTD Desa Atap di Kecamatan Sembakung;
 - PLTD Pembeliangan di Kecamatan Sebuku;
 - PLTD Tulin Onsoi di Kecamatan Tulin Onsoi;
 - PLTD Sei Menggaris di Kecamatan Sei Menggaris;
 - PLTD Maspul di Kecamatan Sebatik Tengah;
 - PLTD Pa'Upan di Kecamatan Krayan Selatan;dan
 - PLTD Krayan di Kecamatan Krayan.
 - d. Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), di Kecamatan Sebatik.
 - e. Pembangkit listrik tenaga batubara, di Kecamatan Sebatik Utara.
 - f. Pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG), terdapat di Kecamatan Sembakung, Kecamatan Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan dan Kecamatan Sei Menggaris.
 - g. Pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), di Kecamatan Sembakung.
 - h. Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) di tetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya.

2. Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, terdiri atas:
 - a. Jaringan distribusi tenaga listrik, terdiri atas:
 - Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kv Nunukan - Sebuku - Malinau dan Nunukan - Sei Menggaris - Tideng Pale;
 - Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) terdapat di seluruh wilayah Kecamatan;
 - Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) terdapat di lingkungan permukiman seluruh wilayah Kecamatan.
 - b. Gardu listrik (GI), terdiri atas:
 - Gardu Induk (GI) Sei Pancang di Kecamatan Sebatik Utara;
 - Gardu Induk (GI) Sei Bilal di Kecamatan Nunukan;
 - Gardu Induk (GI) Sebuku di Kecamatan Sebuku;
 - Gardu Induk (GI) di Kecamatan Sei Menggaris; dan
 - Gardu Induk (GI) Krayan di Kecamatan Krayan.

2.3.3. Telekomunikasi

Sistem jaringan telekomunikasi, terdiri atas :

- (1) Jaringan tetap, yaitu jaringan telekomunikasi dengan kabel dimanfaatkan untuk telepon rumah dan jaringan internet.
- (2) Infrastruktur jaringan tetap, yaitu Sentral Telepon Otomat (STO) di Kecamatan Nunukan;
- (3) Jaringan bergerak, yaitu jaringan bergerak selular berupa menara *Base Transceiver Station (BTS)* dan pemancar radio yang terdapat di seluruh wilayah Kecamatan.

2.3.4. Sumber Daya Air

Sistem jaringan sumber daya air berupa prasarana sumberdaya air yang terdiri atas :

1. Sistem jaringan irigasi tersebar diseluruh kecamatan;
2. Sistem pengendalian banjir tersebar diseluruh kecamatan; dan
3. Bangunan sumberdaya air berupa embung, bendung dan cek DAM tersebar diseluruh kecamatan.

2.3.5. Prasarana lingkungan

Sistem jaringan prasarana lainnya, terdiri atas:

1. Sistem penyediaan air minum (SPAM), meliputi:
 - a. Jaringan perpipaan, terdiri atas:
 - Unit air baku, antara lain: Mata air Srinanti di Kecamatan Sei Menggaris; Sungai Bilal; Sungai Bolong; Sungai Binusan; Sungai Mamolo; Sungai Lapri; Sungai Sei Fatimah; Sungai Sembakung; Sungai Sebuku; Sungai Sei Menggaris; Sungai Itay; Sungai Agisan; Sungai Sulanan; Sungai Tikung; Sungai Sumalungun; Sungai Sepadan; dan Sungai Tabur.
 - Unit produksi yaitu Instalasi Pengolahan Air minum (IPA), antara lain: IPA Pasir Putih di Kecamatan Nunukan; IPA Sei Bilal di Kecamatan Nunukan; IPA Binusan di Kecamatan Nunukan; IPA Persemaian di Kecamatan Nunukan; IPA Sei Fatimah di Kecamatan Nunukan; IPA Mamolo di Kecamatan Nunukan Selatan; IPA Sei Limau di Kecamatan Nunukan Selatan; IPA Mambunut di Kecamatan Nunukan Selatan; IPA Sei Lancang di Kecamatan

- Nunukan Selatan; IPA Sei Bajau di Kecamatan Sebatik; IPA Lodres di Kecamatan Sebatik Tengah; IPA Setabu di Kecamatan Sebatik Barat; IPA Lapri di Kecamatan Sebatik Utara; IPA Pagatason di Kecamatan Lumbis; IPA Lumbis Ogong di Kecamatan Lumbis Ogong; IPA Lumbis Pansingan di Kecamatan Pansingan; IPA Lumbis Huludi Kecamatan Lumbis Hulu; IPA Tulin Onsoi di Kecamatan Tulin Onsoi; IPA Sebuku di Kecamatan Sebuku; IPA Sembakung di Kecamatan Sembakung; IPA Sembakung Atulai di Kecamatan Sembakung Atulai; IPA Sei Menggaris di Kecamatan Sei Menggaris; IPA Krayan di Kecamatan Krayan; dan IPA Krayan Selatan di Kecamatan Selatan.
- b. Unit distribusi, terdiri atas: Jaringan Pipa Instalasi Pengolahan Air malsalong di Kecamatan Lumbis; Jaringan Pipa Instalasi Pengolahan Air Lapri di Kecamatan Sebatik Utara; Jaringan Pipa Instalasi Pengolahan Air Mamolo di Kecamatan Nunukan Selatan; Jaringan pipa Instalasi Pengolahan Air Pasir Putih di Kecamatan Nunukan; Jaringan Pipa Instalasi Pengolahan Air Persemaian di Kecamatan Nunukan; Jaringan Pipa Instalasi Pengolahan Air Setabu di Kecamatan Sebatik Barat; Jaringan Pipa Instalasi pengolahan air sungai bilal di Kecamatan Nunukan; Jaringan Pipa Instalasi Pengolahan Air Tulin Onsoi di Kecamatan Tulin Onsoi; dan Jaringan Pipa Instalasi Pengolahan Air Binusan di Kecamatan Nunukan.
 - c. Bukan jaringan perpipaan meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sistem pengelolaan air limbah (SPAL), meliputi :
 - a. Sistem pembuangan air limbah non domestik di kembangkan di Kecamatan Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan dan Kecamatan Sebatik Timur.
 - b. Sistem pembuangan air limbah domestik, terdiri atas:
 - Sistem pembuangan air limbah terpusat di Kecamatan Nunukan; dan
 - Sistem pembuangan air limbah setempat di seluruh wilayah Kecamatan.
 3. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), meliputi pengelolaan limbah B3 pada sarana kesehatan, sarana Pendidikan dan industri yang berada di seluruh wilayah Kecamatan.
 4. Sistem jaringan persampahan, terdiri atas:
 - a. Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R), di kembangkan di seluruh wilayah Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tempat penampungan sementara (TPS) di kembangkan pada pusat-pusat lingkungan permukiman di seluruh wilayah Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Tempat pemrosesan akhir sampah (TPA), di kembangkan di Kecamatan Nunukan Selatan, di Kecamatan Sebatik Timur, di Kecamatan Krayan dan di Kecamatan Lumbis; dan
 - d. Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), di kembangkan di Kecamatan Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan, di Kecamatan Sebatik, di Kecamatan Sebatik Utara, di Kecamatan Sebatik Barat, di Kecamatan Sebatik Tengah, di Kecamatan Sei Menggaris, di Kecamatan Sembakung, di Kecamatan Sembakung Atulai, di Kecamatan Sebuku, di Kecamatan Lumbis, di Kecamatan Lumbis Hulu, di Kecamatan Lumbis

Ogong, di Kecamatan Lumbis Pansingan, Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Krayan Timur, Kecamatan Krayan Tengah dan di Kecamatan Krayan Barat.

5. Sistem jaringan evakuasi bencana, terdiri atas:
 - a. Jalur evakuasi bencana meliputi jalur pengungsian yang baik dalam skala daerah, kawasan maupun lingkungan dilaksanakan diseluruh wilayah Kecamatan;
 - b. Tempat evakuasi bencana meliputi :
 - Tempat evakuasi bencana abrasi pantai, di tetapkan di Kecamatan Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara dan Kecamatan Sebatik Barat.
 - Tempat evakuasi bencana banjir, di tetapkan di Kecamatan Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah, Kecamatan Sei Menggaris, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sembakung Atulai dan Kecamatan Lumbis.
 - Tempat evakuasi bencana gempa bumi, di Kecamatan Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah, Kecamatan Sei Menggaris, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sembakung Atulai dan Kecamatan Lumbis.
 - Tempat evakuasi bencana longsor dan gerakan tanah, di tetapkan di Kecamatan Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sei Menggaris, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Lumbis Pansingan, Kecamatan Lumbis Hulu, Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Krayan Timur dan Kecamatan Krayan Barat dan Kecamatan Krayan Tengah.
6. Sistem drainase di wilayah Kabupaten, meliputi
 - a. Jaringan drainase primer a dikembangkan melalui saluran pembuangan utama pada aliran sungai yang melayani kawasan perkotaan di Kabupaten Nunukan.
 - b. Jaringan drainase sekunder dikembangkan tersendiri pada kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, dan kawasan pariwisata yang terhubung ke saluran primer, sehingga tidak mengganggu saluran drainase permukiman.
 - c. Jaringan drainase tersier dikembangkan pada kawasan permukiman; dan
 - d. Sistem drainase di wilayah kabupaten dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir.

3.4. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Industri Kecil dan Menengah (IKM) sejatinya memegang peranan yang sangat signifikan bagi perekonomian nasional, disamping adanya fakta bahwa industri kecil dan menengah merupakan skala industri yang paling tahan banting dari terpaan badai ekonomi. Berdasar data dari Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap perekonomian nasional mencapai 57% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan bahkan mampu menyerap 97% tenaga kerja. Namun demikian, kontribusi UMKM terhadap ekspor masih relatif kecil, yaitu

hanya sekitar 16% dari ekspor nasional. Hal inilah yang membuat pemerintah tidak henti-hentinya berupaya untuk terus memberikan kemudahan bagi pelaku IKM.

Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah merupakan amanat di dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dimana pasal 14 menyebutkan peran Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perwilayahan industri. Perwilayahan industri dimaksud dilaksanakan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, pembangunan Kawasan Industri dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah. Disamping itu dalam Pasal 74 mengamankan peningkatan kemampuan sentra dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan industri kecil dan menengah.

UMKM di Kabupaten Nunukan memiliki peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Nunukan, khususnya dalam menggerakkan aktivitas ekonomi, meningkatkan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja di Kabupaten Nunukan. Peran UMKM dalam meningkatkan pendapatan daerah perlu diperhatikan dengan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dengan membantu ketersediaan modal, infrastruktur dan ketersediaan tenaga terampil, ketersediaan transportasi, layanan pendidikan dan pelatihan, jaringan pengetahuan dan pendukung pembangunan daerah. Diperlukan berbagai kebijakan Pemda Kabupaten Nunukan yang bersifat terobosan sebagai solusi masalah yang dihadapi UMKM, khususnya untuk mengatasi beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pengembangan produk dan pemasaran.

Pemda memberikan peluang berkembangnya UMKM di Kabupaten Nunukan meliputi peningkatan Sumberdaya Manusia, perbaikan sarana prasarana, akse perbankan dan perbaikan iklim ekonomi yang lebih baik untuk mendukung dan peningkatan daya saing serta meningkatkan pangsa pasar. UMKM memiliki posisi yang strategis di Kabupaten Nunukan karena UMKM tidak memerlukan modal yang besar sebagaimana perusahaan besar, tenaga kerja yang diperlukan untuk UMKM tidak menuntut pendidikan formal tertentu serta UMKM tahan terhadap krisis ekonomi sebagaimana yang dialami pada masa Pandemi Covid 19. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh sebagian besar pelaku UMKM, sebagai berikut:

1. Pemasaran. Tingginya ongkos kirim karena letak geografis Pulau Sebatik yang berada di ujung NKRI membuat harga jual keripik menjadi lebih mahal karena terbebani oleh tingginya ongkos kirim jika ingin memasarkan keluar Pulau Sebatik. Pelaku UMKM juga belum memahami pasar sasaran dan pasar potensial mereka. Selain itu, posisi Pulau Sebatik yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, dalam hal ini Tawau, sehingga banyak produk-produk makanan Malaysia yang masuk ke Nunukan (Sebatik) dimana produk-produk tersebut memiliki kemasan dan label yang menarik dengan harga terjangkau. Kondisi tersebut menjadi ancaman bagi produk lokal. Selain itu, potensi pemasaran melalui internet (*online*) belum dipahami dan digunakan oleh UMKM tersebut.
2. Mesin dan Peralatan. Mesin dan peralatan yang dimiliki oleh UMKM rata-rata masih sederhana dan manual. Kalaupun ada mesin yang bisa memproduksi produk dalam kapasitas yang tinggi, maka kendalanya adalah pada saat rusak mereka tidak dapat memperbaikinya karena kurang pengetahuan teknis mesin dan tidak adanya suku cadang.
3. Kemasan dan label. Banyak produk terutama makanan yang masih dikemas dengan seadanya, semisal keripik pisang dan madu hutan. Walaupun ada beberapa produk yang kemasannya telah memadai, misalnya dengan menggunakan kemasan berbahan alumunium, namun labeling-nya masih sangat sederhana dan kurang menarik dan biayanya tinggi. Label hanya diprint di kertas biasa, sehingga cepat luntur. Selain itu, pelaku UMKM masih sering mengganti-ganti label sehingga tidak ada ciri khusus bagi produk mereka sehingga hal tersebut dapat menyebabkan kebingungan oleh konsumen.

4. Perijinan dan legalitas. Sebagian besar UKM belum memiliki ijin usaha, P-IRT, sertifikat Halal dan kelengkapan hukum lainnya. Bahkan, terdapat beberapa pungutan liar yang tinggi yang dikeluhkan oleh UMKM sehingga mereka lebih memilih tidak mengurus perijinan dan legalitas.
5. Transportasi dan infrastruktur. Letak geografis Pulau Sebatik yang berada di ujung NKRI serta terbatasnya moda transportasi menyebabkan ongkos atau biaya perjalanan dan pengiriman keluar Kabupaten Nunukan menjadi lebih mahal. Oleh karena itu, UMKM terbebani tingginya ongkos kirim jika ingin memasarkan keluar Pulau Sebatik. Selain itu, di beberapa tempat di Pulau Sebatik, ketersediaan listrik sangat terbatas, sehingga mereka hanya dapat memproduksi pada saat-saat tertentu saja.

Berdasarkan data Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Nunukan, jumlah UKM sebanyak 723 unit yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 2.184 jiwa dengan nilai produksi mencapai Rp. 791.243.500,- dan nilai investasi industri mencapai Rp. 1.262.820.000. Untuk lebih rinci mengenai UKM di Kabupaten Nunukan disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-31 Jumlah UKM di Kabupaten Nunukan

No	Komoditi IKM	Jumlah Unit	Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp)	Nilai Produksi (Rp./Bln)
1	Industri Air Minum dan Mineral	91	38	43.500.000	12.107.000
2	Industri Pandai Besi	7	13	3.650.000	2.740.000
3	Industri Barang Anyaman Dari Rotan dan Bambu	106	336	173.525.000	133.895.000
4	Industri Barang Anyaman dari pandan	2		0	0
5	Industri Barang bangunan dari Kayu	3	6	3400000	3687500
6	Industri Barang dari Kulit	2	4	2.100.000	1.300.000
7	Industri barang dari Logam (Aluminium)	8	14	9.500.000	14.500.000
8	Industri Barang dari tanah dan semen	24	80	36.750.000	14.635.000
9	Industri Batik	4		500.000	60.000
10	Industri Bata - Keramik	52	294	109.700.000	124.490.000
11	Industri Bordir - bulu	1		1.200.000	120.000
12	Industri Furniture dari Kayu	66	129	122.900.000	67.320.000
13	Industri Gips	2	6	2.500.000	3.000.000
14	Industri Kapal - perahu	80	218	138.000.000	94.500.000
15	industri Kerupuk	33	187	170.050.000	98.214.000
16	Industri Kue basah	7	27	10.400.000	5.970.000
17	Industri Mie	2	5	10.000.000	6.500.000
18	Industri Percetakan Umum	8	17	15.800.000	13.150.000
19	Industri Pengeringan Ikan - Penggaraman	34	79	6.500.000	5.000.000
20	Industri Penggajian Kayu	1		3.000.000	4.000.000
22	Industri Penggilingan padi dan Pengolahan Beras	35	129	43.350.000	25.470.000
23	Industri Pengolahan Garam	23	291	52.210.000	30.050.000
24	Industri Pengolahan Kopi- The	1	1	500.000	300.000
25	Industri Penjahit	78	132	127.050.000	58.145.000
26	Industri Produk Roti dan Kue	36	132	148.035.000	54.460.000
27	Industri Tempe	17	46	28.700.000	17.630.000
TOTAL		723	2.184	1.262.820.000	791.243.500

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Nunukan, 2022

Adapun potensi keunggulan, bidang usaha, dalam pengembangan UMKM Kabupaten Nunukan disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-32 Potensi Keunggulan, Bidang Usaha UMKM Kabupaten Nunukan

No	Kecamatan	Potensi Keunggulan	Bidang Usaha UMKM
1	Sebatik	Pisang, Kakao, Kelapa Sawit	Berbagai jenis keripik: pisang, durian, dan nangka.
2	Sembakung	Rotan, Madu hutan	Kerajinan rotan berupa tas, tikar, dan kipas.
3	Nunukan	Rumput laut, Buah-buahan, Ayam	Keripik pisang dan buah-buahan, roti, mie basah
4	Sebuku	Rotan, Ubi Kayu	Anyaman rotan: tas, tikar, dan kipas.
5	Lumbis Ogong	Rotan, Ubi kayu	Anyaman rotan: tas, tikar, dan kipas.
6	Krayan	Beras organik, Garam gunung, rotan, nanas	Beras organik, garam gunung, anyaman rotan: tas, tikar, dan kipas.

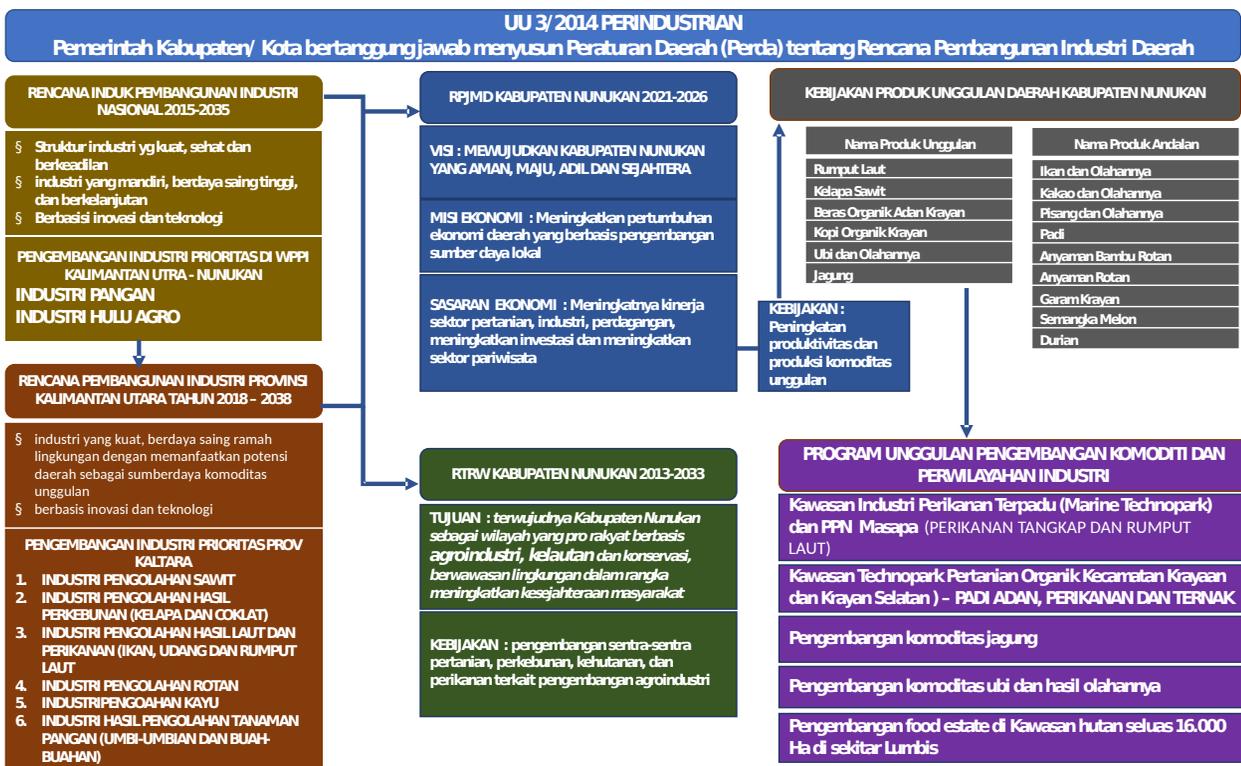
Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Nunukan, 2022

BAB III
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN NUNUKAN

6.1. Kebijakan Pembangunan Industri dan Kondisi Pengembangan Industri

5.1.1. Kebijakan Pembangunan Industri Kabupaten Nunukan

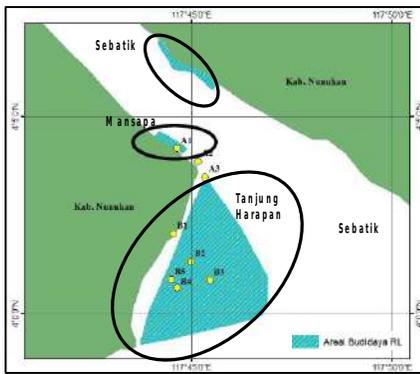
Berbagai kebijakan industri baik itu tingkat nasional, provinsi dan kabupaten baik secara kebijakan, spasial dan sektoral akan memberikan arahan kebijakan pembangunan industri Kabupaten Nunukan selama 20 tahun kedepan. Arahan kebijakan dan program unggulan yang terkait dalam pembangunan industri Kabupaten Nunukan menjadi potensi dan peluang pengembangan lingkungan industri serta komitmen pemerintah daerah dalam memberikan fokus pembangunan industri.



Gambar III-11 Keterkaitan Kebijakan dan Program Terhadap Pengembangan Industri Kabupaten Nunukan

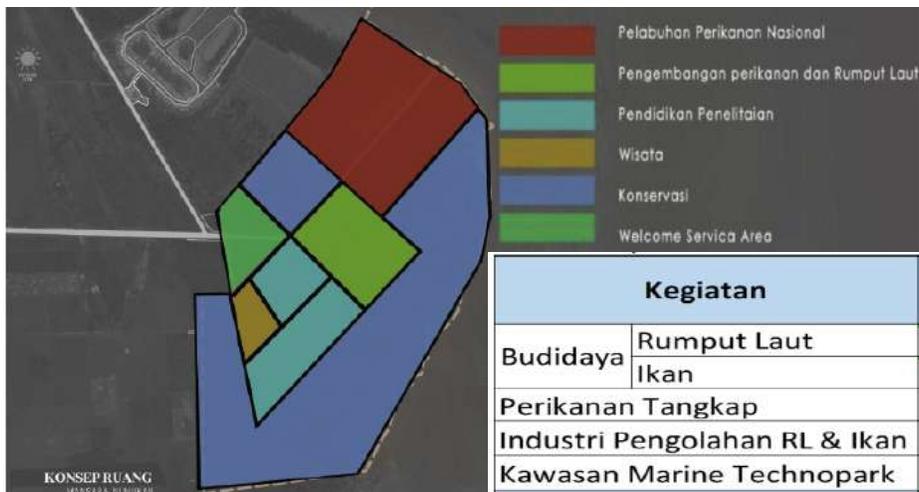
Kebijakan program unggulan daerah yang telah menjadi komitmen pengembangan dan pembangunan komoditi dan perwilayahan industri yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi dalam menciptakan nilai tambah produk, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kesejahteraan masyarakat dan terobosan inovasi dengan model technopark. Model technopark dalam pengembangan industri berbasisi hasil laut, perikanan dan olahan tanaman pangan yang memadukan kerjasama antar Lembaga perguruan tinggi, pemerintah daerah, pelaku usaha dalam pengembangan Kawasan terpadu.

Kawasan Industri Perikanan Terpadu (Marine Technopark) dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Masapa, Nunukan Selatan seluas 50 Ha



1. Lokasi budidaya yang tersebar di Kabupaten Nunukan terletak di beberapa Kawasan diantaranya daerah **Mansapa, Tanjung Harapan, dan Sebatik**
2. Pengembangan fungsi dan skala pelayanan pelabuhan menjadi **Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)** dalam meningkatkan produksi dan olahan perikanan tangkap

Pengembangan kawasan marine technopark



Gambar III-12 Pengembangan Marine Technopark dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)

Kawasan Technopark Pertanian Organik Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan n seluas 12,9 Ha

Potensi komoditas unggulan pertanian seperti pangan yaitu Beras Adan dalam kerangka TeknoPark Pertanian Organik di Krayan dan Krayan Selatan

Sumber genetic dari pengembangan pertanian organic ini adalah padi adan, kerbau, ayam, ikan pelian dan organisme lokal lainnya

Distribusi pemasaran organic sangat luas tidak hanya pasar lokal tetapi pasar anta pulau, dan mancanegara yaitu ke Malaysia dan Brunei Darussalam. Hal ini menunjukkan permintaan beras Adan memiliki potensi pasar yang tinggi



Gambar III-13 Pengembangan Kawasan Technopark Pertanian Organik

5.1.2. Peran dan Fungsi Kabupaten Nunukan dalam Pengembangan Industri Regional

Potensi sumberdaya alam Kabupaten Nunukan yang besar dalam perekonomian harus berimbang pada kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha mandiri, seperti keberadaan industri rakyat. Pada sektor industri usaha mikro, kecil, dan menengah berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan di Kabupaten Nunukan.

Adapun peran dan fungsi Kabupaten Nunukan dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor industri dalam pembentukan PDRB baik secara Kabupaten Nunukan maupun Provinsi Kalimantan Utara dapat dilakukan apabila terdapat jaminan pasokan bahan baku dengan berbagai jenisnya, jumlah produksi dan harga stabil untuk sektor primer yang akan diolah. Dalam hal ini diperlukan mobilisasi pada pelaku usaha sektor primer (petani, nelayan) agar menjamin kelangsungan produksi di sektor industri yaitu dengan mengoptimalkan pengelolaan, pemanfaatan sumber daya industri yang berbasis produk tanaman pangan, perikanan dan kelautan, perkebunan, hasil hutan dan menunjang peningkatan pada kegiatan pariwisata.

Selanjutnya, pembangunan industri unggulan dapat dilakukan dengan pengembangan pada industri hulu agro, industri pangan dan industri kerajinan penunjang pariwisata. Dengan misi pengembangan industri unggulan melalui:

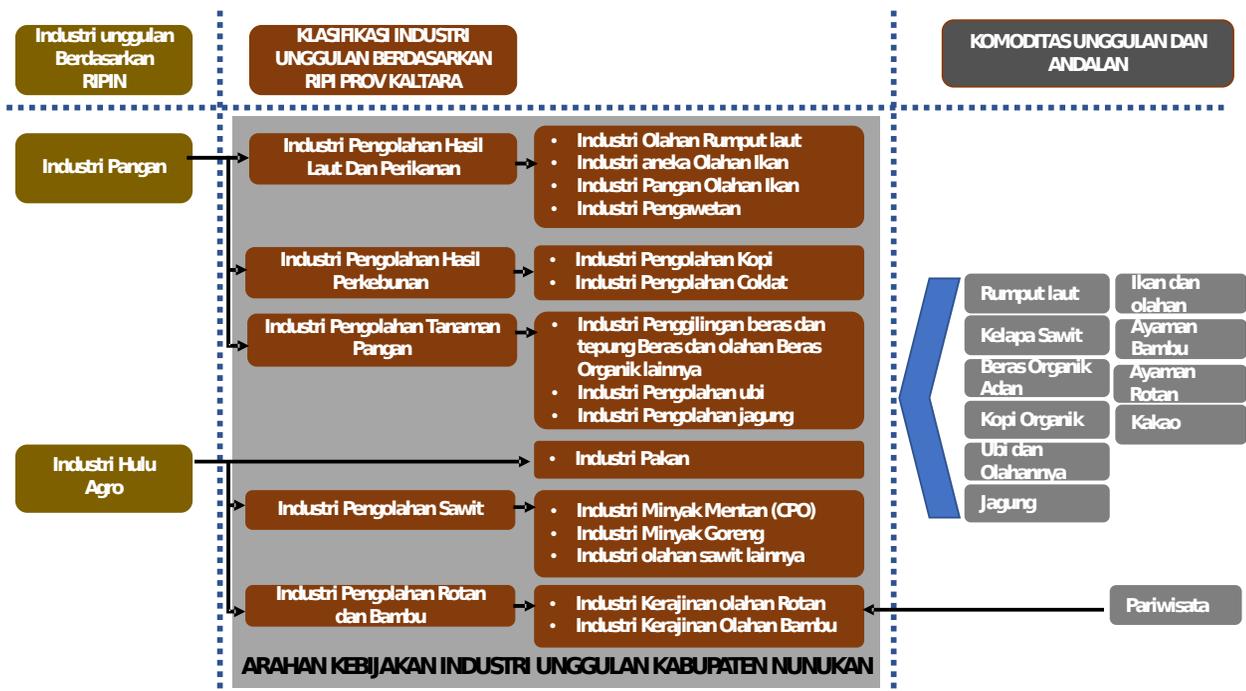
1. Basis komoditas unggulan lokal;
2. Struktur industri yang mandiri-kuat-sehat-berkeadilan;
3. Daya saing tinggi dan ramah lingkungan; dan
4. Basis inovasi dan teknologi.



Gambar III-14 Peran dan Fungsi Kabupaten Nunukan dalam Pengembangan Industri Regional

5.1.3. Potensi dan Peluang Pengembangan Komoditas Unggulan dan Industri Unggulan yang akan menjadi Penggerak Ekonomi Kabupaten Nunukan

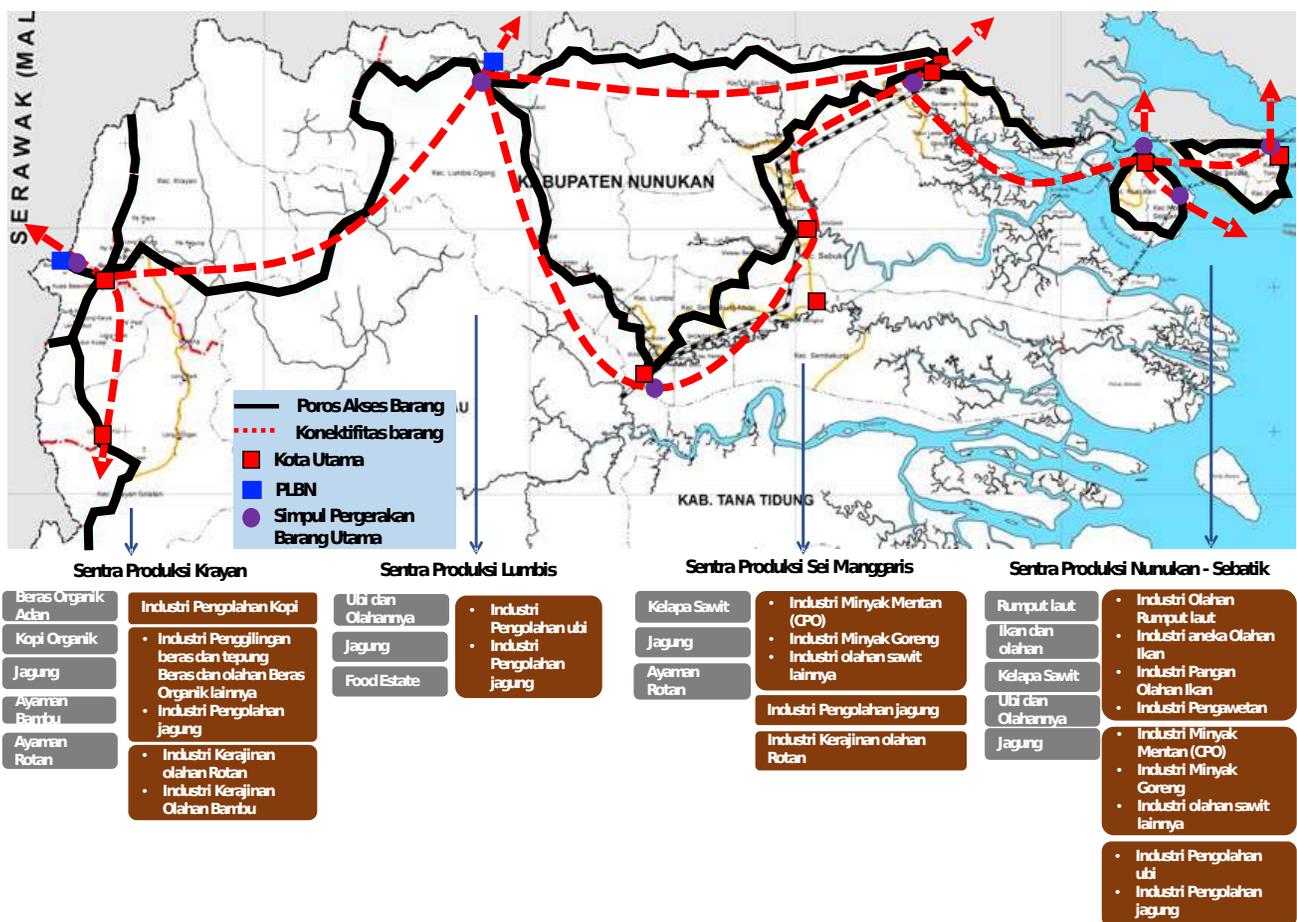
Penetapan industri unggulan Kabupaten Nunukan dilakukan melalui beberapa fase dan analisis. Penetapan ini diawali dengan identifikasi sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi daerah. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan pemilihan longlist komoditas unggulan dari sektor/sub sektor unggulan dan sektor/sub sektor lainnya. Kemudian dilakukan pemilihan short list komoditas unggulan dan dilanjutkan dengan penentuan komoditas unggulan prioritas yang akan masuk sebagai basis dalam penentuan industri unggulan Kabupaten Nunukan. Adapun potensi dan peluang pengembangan komoditas unggulan dan industri unggulan yang akan menjadi penggerak Ekonomi Kabupaten Nunukan disajikan pada gambar skema berikut.



Gambar III-15 Potensi dan Peluang Pengembangan Komoditas Unggulan dan Industri Unggulan Kabupaten Nunukan

5.1.4. Arah Pengembangan Lingkungan Industri dari Pengembangan Komoditas dan Industri Unggulan

Arahan pengembangan lingkungan industri merupakan arahan pengembangan bahan baku komoditi unggulan dan industri unggulan dalam perwilayahan industri serta arah pengembangan sarana dan prasarana penunjang industri yang dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar III-16 Arah Pengembangan Lingkungan Industri Dari Pengembangan Komoditas Dan Industri Unggulan Kabupaten Nunukan

5.1.5. Kondisi Pembangunan Industri Kabupaten Nunukan

3.1.5.1. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Industri Berbasis Perikanan dan Kelautan

Sumber Daya Perikanan merupakan salah sumber daya alam yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat. Fauzi (2010) dalam bukunya, “Ekonomi Perikanan” mendefinisikan Sumber Daya Perikanan sebagai aset yang dapat bertambah ataupun berkurang, baik secara alamiah maupun dengan adanya intervensi manusia. Berdasarkan dinamika alam dan intervensi manusia ini dapat mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung terhadap Sumber Daya Perikanan tersebut sepanjang waktu.

Aktivitas penangkapan ikan dan budidaya pesisir berupa tambak udang dan ikan bandeng tampak menjamur di wilayah pesisir mendorong munculnya jenis industri yang berorientasi pada pengusahaan industri pengolahan hasil laut. Selain itu tampak di beberapa wilayah terdapat pengusahaan rumput laut di Kabupaten Nunukan Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Nunukan memiliki potensi sumber daya yang besar pada wilayah pesisir dan laut, hal ini didukung oleh wilayah teritorial perairan yang luas, dan memiliki potensi berbagai biota laut yang memiliki nilai tinggi dari segi ekonomis. Sebagian besar produksi perikanan di Kabupaten Nunukan merupakan budidaya perikanan laut. Hasil perikanan budidaya di Kabupaten Nunukan Selain Budidaya Laut meliputi budidaya tambak, kolam, karamba, jaring apung dan sawah (minapadi).

Pohon Industri Industri Pengolahan Ikan sendiri memiliki potensi yang baik bilamana dikelola secara terpadu, terutama untuk memenuhi permintaan olahan pangan dan pakan ternak. Pohon Industri Perikanan memberikan informasi bahwa produk-produk turunan berupa hasil olahan ikan memiliki cukup banyak manfaat dan bisa diolah secara komersial menjadi produk-produk olahan dalam baik dalam skala kecil, menengah ataupun besar.

Komoditas perikanan lebih banyak dikonsumsi dalam keadaan segar (belum) diolah, terutama pada ikan berkualitas sehingga memiliki nilai ekonomis tinggi. Kegiatan pengolahan dilakukan untuk mengawetkan atau meningkatkan nilai komoditas menjadi produk yang bernilai tinggi, sehingga baru berlaku pada ikan yang berkualitas rendah atau sampahnya atau sisasisanya (waste) berupa tulang dan bagian organ dalam dapat diolah menjadi produk-produk turunan lainnya. Untuk dapat mengembangkan usaha yang tepat sasaran, Berikut uraian faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman industri berbasis perikanan.

Tabel III-33 Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Industri Berbasis Perikanan dan Kelautan

Faktor Internal	Kekuatan (strength)	Kelemahan (weakness)
	<ol style="list-style-type: none"> Potensi sumber daya alam, yakni luas laut yang dapat mendukung pengembangan sub sektor perikanan yang ada. Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten dalam bidang perikanan. Potensi Laut untuk pengembangan Usaha dalam subsektor Perikanan. Kebijakan Pemerintah, mengenai pengembangan subsektor perikanan. 	<ol style="list-style-type: none"> Kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah, Kurang adanya pemahaman yang baik tentang teknologi, Ketersediaan sarana dan prasarana. Kurang adanya penyuluhan dari para petugas lapangan. Kurangnya dukungan dari lembaga informal maupun formal
Faktor Eksternal	Peluang (opportunities)	Ancaman (threats)
	<ol style="list-style-type: none"> Otonomi Daerah Kebijakan nasional untuk pengembangan kegiatan bisnis kelautan Dukungan pemerintah pusat, provinsi maupun daerah, Potensi pasar, komoditi ikan dari berbagai jenis yang dihasilkan dari penangkapan maupun budidaya memiliki pasar ekspor. 	<ol style="list-style-type: none"> Kondisi alam; Sosial budaya masyarakat; Pencurian ikan Terbatasnya pasokan energi Harga produk yang tidak stabil;

3.1.5.2. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Industri Berbasis Budidaya Rumput Laut

Rumput laut (*seaweed*) merupakan salah satu komoditi yang potensial dan dapat menjadi andalan bagi upaya pengembangan industri kecil dan menengah yang sering disebut sebagai IKM. Ini terjadi karena rumput laut sangat banyak digunakan oleh manusia, baik melalui pengolahan sederhana yang langsung dikonsumsi maupun melalui pengolahan yang lebih kompleks untuk dijadikan barang setengah jadi dan diolah lebih lanjut oleh industri hilir menjadi barang jadi yang dapat digunakan (dikonsumsi) langsung, seperti produk farmasi, kosmetik dan pangan serta produk lainnya. Adapun rumput laut cukup mudah dibudidayakan di perairan Nunukan.

Pengembangan rumput laut dengan pendekatan konsep industri yang dimulai dari hulu (budidaya), pengolahan produk dasar menjadi produk formulasi dengan produk turunan yang sangat banyak baik produk pangan maupun non pangan. Dalam pengembangan rumput laut hal yang penting dengan penerapan teknologi yang tepat untuk menghasilkan produk yang berorientasi pada pasar dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan industri dalam negeri serta ekspor. Pohon Industri Rumput Laut secara lengkap disajikan pada Gambar berikut.



Gambar III-17 Pohon Industri Rumput Laut Berdasarkan Jenis Senyawa yang Dihasilkan

Budidaya Rumput Laut Dalam menghadapi persaingan dunia usaha yang semakin ketat. Apalagi di era Masyarakat Ekonomi Asia (MEA), Maka dituntut untuk dapat memiliki strategi yang tepat dalam mengembangkan usaha, agar dapat bersaing sehingga usaha kita terus meningkat, maju dan besar serta menjadi pengusaha yang sukses. Definisi Strategi pengembangan usaha itu sendiri adalah terdiri dari sejumlah tugas dan proses yang pada umumnya bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan peluang pertumbuhan. Tetapi pada kenyataannya untuk dapat mengembangkan usaha yang pada dasarnya dimulai dari awal dengan modal nol besar dan untuk memulai usaha tidaklah mudah tapi sangatlah sulit sehingga memerlukan satu tekad kemauan yang kuat serta kerja keras untuk menghadapi banyak tantangan dan hambatan seperti kekurangan modal, tenaga kerja yang ahli atau terampil, kinerja keuangan usaha yang tidak baik, dan sebagainya. Tetapi hambatan - hambatan itu semua dapat diatasi dengan cara mengembangkan dan menerapkan strategi pengembangan usaha yang tepat sasaran. Berikut uraian faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman industri berbasis budidaya rumput laut.

Tabel III-34 Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Industri Berbasis Budidaya Rumput Laut

	Kekuatan (strength)	Kelemahan (weakness)
Faktor Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minat masyarakat dalam usaha budidaya besar; 2. Tenaga kerja mudah didapat dari keluarga dan masyarakat; 3. Teknologi usaha budidaya sederhana dan murah; 4. Budidaya rumput laut dapat dilakukan pada skala usaha kecil; 5. Tersedianya areal yang luas untuk pengembangan usaha budidaya rumput laut; 6. Periode panen dan pemeliharaan dapat diatur. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam usaha budidaya rumput laut, minimnya lembaga keuangan sebagai penyedia modal; 2. Rentan monopoli dagang; 3. Minimnya pengembangan mitra usaha; 4. Pengembangan industri rumah tangga dari hasil olahan rumput laut, 5. Rentan terhadap serangan hama dan penyakit.
	Peluang (opportunities)	Ancaman (threats)
Faktor Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi pasar ekspor; 2. Produk unggulan program pemerintah; 3. Kualitas perairan masih layak untuk budidaya rumput laut; 4. Rumput laut dapat diolah menjadi industri rumah tangga; 5. Usaha budidaya sangat menguntungkan 6. Perairan lepas pantai dapat dimanfaatkan secara optimal dengan metode long line 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ancaman perubahan iklim global; 2. Tidak ada penataan ruang lepas pantai dan jadwal musim tanam; 3. Terjadinya konflik perebutan pemanfaatan lahan budidaya; 4. Harga rumput laut yang fluktuatif; 5. Hilangnya generasi pembudidaya rumput laut; 6. Penekanan kuota dan kontinuitas ekspor; 7. Terbatasnya bimbingan dan penyuluhan dari instansi terkait belum menyentuh semua Kelompok pembudidaya yang ada

3.1.5.3. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Industri Berbasis Kelapa Sawit

Kabupaten Nunukan menjadi kabupaten dengan sumbangan produksi terbanyak yang mencapai 412.682 ton pada tahun 2012 dan meningkat menjadi 519.726 ton pada tahun 2013. Adapun perusahaan-perusahaan pengolahan kelapa sawit atau pabrik kelapa sawit (PKS) yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Utara tercatat 7 pabrik, dan kemungkinan dalam waktu dekat terdapat beberapa pabrik lagi yang akan berinvestasi.

Pohon Industri Kelapa sawit memiliki karakteristik pohon industri yang ribun. Pengusahaan kelapa sawit telah berjalan sekian lama, sehingga penggunaannya telah memasuki tahap penggunaan yang luas.

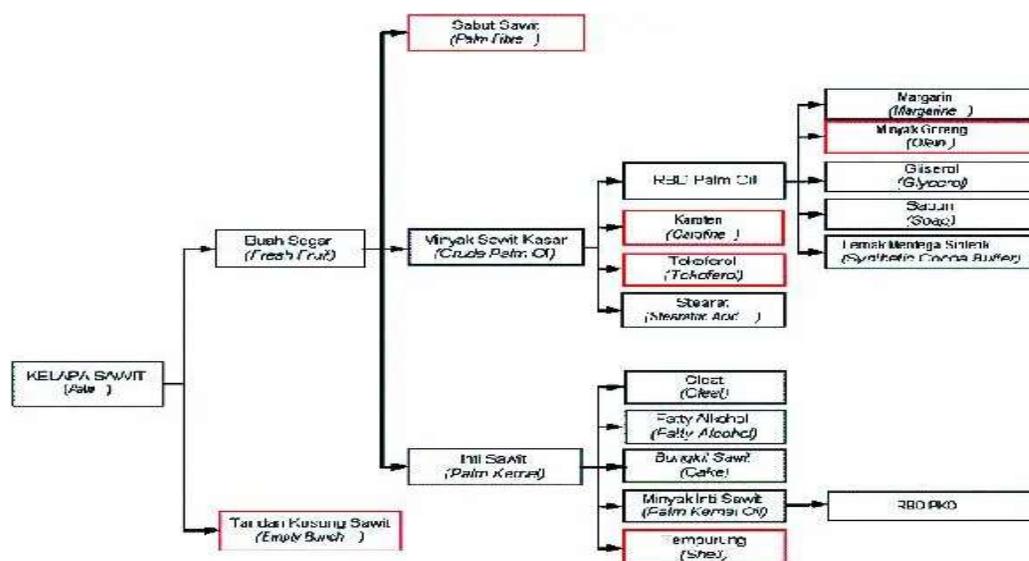
Berdasarkan gambaran pohon industri terlampir, tampak industri yang berbasis minyak kelapa sawit memiliki banyak sekali turunan dan aplikasinya bagi bagi industri pangan, kosmetika, farmasi, hingga menjadi sumber energi.

Produk hilir dihasilkan tidak hanya dari minyak kasar saja, tetapi juga dari limbah cair dan limbah padat yang terbentuk dalam proses produksi minyak sawit. Industri hilir minyak sawit dapat digolongkan menjadi (1) Industri oleo food: minyak goreng sawit, minyak salad, margarine, shortening, lemak padatan, lemak substitusi coklat, ice cream fat, vegetable ghee, dsb; (2) Industri oleo kimia: asam lemak, alkohol lemak, sabun, toiletries, kosmetik, glycerine dsb; dan (3) Industri energi terbarukan: biodiesel, bioethanol, bio jet fuel, biomass, dsb.

Perusahaan oleokimia tersebar di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, yaitu : Cisadane Raya (Tangerang), Sumi Asih (Bekasi), Wilmar Nabati Indonesia (Gresik), Musim Mas (Medan), Soci Mas (Medan), Nubika jaya (Rantau Prapat), Domba Mas (Kuala tanjung,Sumut), Ecogreen Oleochemical (di Medan dan Batam), Permata Hijau Group (Medan), The Vegetable Foods Company Private Limited dan Unilever Oleochemical Indonesia (Sei Mangkei). Pada tahun 2014

kapasitas terpasang industri oleokimia nasional mencapai 3,2 juta ton, sedangkan industri biofuel mencapai 5 juta ton. Pada tahun 2015 kapasitas industri biofuel bertambah menjadi 7,32 juta ton.

Total kapasitas terpasang industri hilir kelapa sawit (refinasi, fraksionasi, oleokimia, dan bioenergi) di Indonesia sudah melebihi angka 40 juta ton per tahun. Produk lain yang dapat dihasilkan di masa depan dari sawit, antara lain, bioplastik, biolubrikan, bahan bakar jet, particle board, extracting betacarotene, briket carbon, dan mineral oil surfactant. Menurut data Gapki, industri hilir CPO saat ini terdiri atas 74 industri minyak goreng, 46 industri margarin shortening, 44 industri deterjen dan sabun, 37 industri oleokimia, dan 20 industri biodiesel.



Gambar III-18 Pohon Industri Kelapa Sawit

Tabel III-35 Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Industri Berbasis Kelapa Sawit

	Kekuatan (strength)	Kelemahan (weakness)
Faktor Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas produk CPO yang dipasarkan 2. Kualitas dan loyalitas karyawan 3. Jaringan pemasaran 4. Memiliki kebun inti dan kebun plasma 5. Lokasi perusahaan yang strategis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Promosi yang dilakukan perusahaan 2. Pengembangan inovasi produk 3. Peralatan dan mesin produksi yang sudah tua
Faktor Eksternal	Peluang (opportunities)	Ancaman (threats)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi industri CPO yang masih besar 2. Peningkatan jumlah penduduk 3. Kebijakan pemerintah 4. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya perusahaan pesaing 2. Adanya produk substitusi 3. Adanya isu-isu lingkungan

6.2. Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Nunukan

Pembangunan industri Kabupaten Nunukan merupakan operasionalisasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Nunukan sesuai dengan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan sebagaimana diuraikan berikut.

3.3.1. Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Nunukan

1. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Berdasarkan kondisi daerah Kabupaten Nunukan dan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih maka visi pembangunan Kabupaten Nunukan dalam RPJMD 2021-2026 adalah:

“MEWUJUDKAN KABUPATEN NUNUKAN YANG AMAN, MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA”

Dengan penjelasan Visi sebagai berikut:

- a. Kabupaten Nunukan yang aman adalah terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dengan kondisi yang mendukung terlaksananya pemerintahan, program pembangunan dan kehidupan sosial berbasis pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan mengutamakan ketenteraman dan ketertiban.
- b. Kabupaten Nunukan yang Maju adalah ditandai dengan Pemerintahan Daerah dengan birokrasi yang profesional dan melayani, terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing, terpenuhinya pelayanan dasar bagi masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang kondusif dan tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan mendukung konektivitas wilayah.
- c. Kabupaten Nunukan yang adil adalah terwujudnya tata kehidupan yang memberikan kesempatan yang sama, setara dan tanpa diskriminasi bagi semua masyarakat baik laki-laki maupun perempuan untuk meningkatkan taraf hidup; memperoleh layanan kesehatan, pendidikan dan layanan sosial lainnya secara lebih baik, mudah dan bermutu; mengemukakan pendapat; memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan hak didepan hukum sehingga tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender maupun wilayah.
- d. Kabupaten Nunukan yang sejahtera adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan pendapatan, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

2. Misi

Untuk memberikan rumusan mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Nunukan yang aman, maju, adil dan sejahtera, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing;
- b. Meningkatkan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi;
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber daya lokal;
- d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi;
- e. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan
- f. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan tenteram.

Pembangunan industri di Kabupaten Nunukan merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional yang diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan industri yang berkelanjutan serta didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Saat ini pembangunan industri sedang dihadapkan pada berbagai tantangan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri dan ekonomi nasional. Peningkatan daya saing industri merupakan salah satu pilihan yang harus dilakukan agar produk industri nasional mampu bersaing di dalam negeri maupun luar negeri.

Pembangunan industri Kabupaten Nunukan dapat dilakukan dengan prinsip sebagai berikut.

1. Sektor industri merupakan salah satu sektor yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.
2. Sektor industri mampu menjadi mesin penggerak utama (prime mover) perekonomian nasional, sekaligus tulang punggung ketahanan ekonomi nasional dengan berbasis sumber daya lokal yang memiliki struktur keterkaitan dan kedalaman yang kuat.
3. Peningkatan daya saing industri merupakan salah satu pilihan yang harus dilakukan agar produk industri nasional mampu bersaing di dalam negeri maupun luar negeri.
4. Pembangunan industri di Kabupaten Nunukan merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional yang diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan industri yang berkelanjutan serta didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

Berdasarkan kajian kebijakan (tingkat nasional, provinsi dan kabupaten), rumusan peran dan fungsi dalam lingkup regional, arah pengembangan lingkungan industri dan kondisi pembangunan industri Kabupaten Nunukan, maka pengembangan industri mengacu kepada :

1. pengembangan industri berbasis sumber daya unggulan lokal.
2. Pertumbuhan industri berbasis daya saing dengan pengembangan SDM dalam penguatan inovasi dan penguasaan teknologi.
3. Pertumbuhan industri harus dikembangkan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup

Kata Kunci: Pertumbuhan, ketahanan ekonomi, sumber daya lokal, daya saing, sosial, lingkungan hidup.

Berdasarkan prinsip tersebut, maka dapat ditentukan Visi dan Misi Pembangunan Industri di Kabupaten Nunukan 2022 – 2042 sebagaimana diuraikan berikut.

Visi : **Memujudkan Industri yang Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Unggul Menuju Ketahanan Ekonomi Daerah dan Berkelanjutan**

- Misi :
1. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam unggulan daerah secara efektif dan efisien melalui pengolahan komoditas unggulan.
 2. Optimalisasi kualitas SDM Industri yang berdaya saing sebagai kompetitor unggul dalam menghadapi persaingan industri.
 3. Meningkatkan daya dukung sumber daya industri dan sarana dan prasarana industri dalam meningkatkan produktifitas industri.
 4. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan berkelanjutan dalam meningkatkan produktifitas industri.

5. Meningkatkan kinerja pelayanan dasar serta berperan aktif dalam menumbuh kembangkan ukm.
6. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif dalam menjamin kepastian berusaha dan persaingan yang sehat.

3.3.2. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Nunukan

Dengan memperhatikan visi, misi pembangunan daerah serta visi, misi pembangunan industri, maka tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Nunukan adalah :

1. Peningkatan daya saing melalui penguatan kualitas SDM, kinerja pelayanan publik, infrastruktur ekonomi dan pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal
2. Penguatan keanekaragaman industri dan perdagangan berbasis produk unggulan daerah
3. Menguatnya daya saing industri melalui penerapan teknologi dan inovasi
4. Penguatan kesejahteraan masyarakat yang didukung SDM yang berdaya saing dan produk unggulan daerah

Untuk memperjelas hubungan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran pembangunan Kabupaten Nunukan periode 2022-2042 uraian tersebut dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III-36 Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Nunukan 2021 – 2026

Visi Memujudkan Industri yang Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Unggul Menuju Ketahanan Ekonomi Daerah dan Berkelanjutan	
Misi	Tujuan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi kualitas SDM Industri yang berdaya saing sebagai kompetitor unggul dalam menghadapi persaingan industri. 2. Meningkatkan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dalam meningkatkan produktifitas industri. 3. Menumbuh kembangkan sumberdaya lokal yang unggul secara efektif dan efisien dalam mewujudkan ketahanan ekonomi. 4. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan berkelanjutan 5. Meningkatkan kinerja pelayanan dasar serta berperan aktif dalam menumbuh kembangkan ukm 6. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif dalam menjamin kepastian berusaha dan persaingan yang sehat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan daya saing melalui penguatan kualitas SDM, kinerja pelayanan publik, infrastruktur ekonomi dan pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. 2. Penguatan keanekaragaman industri dan perdagangan berbasis produk unggulan daerah; 3. Menguatnya daya saing industri melalui penerapan teknologi dan inovasi; 4. Penguatan kesejahteraan masyarakat yang didukung SDM yang berdaya saing dan produk unggulan daerah.

3.3.3. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Nunukan

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur dan rasional untuk dapat diwujudkan. Sasaran ini bias merupakan target pencapaian yang diharapkan, yang pada hakekatnya merupakan penegasan kembali misi secara detail, terukur dan lebih tergambar dengan jelas yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Kabupaten Nunukan menetapkan sasaran pembangunan sektor industri yang diharapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya iklim usaha kondusif melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif.
2. Tercapainya pertumbuhan industri yang cukup tinggi dan berkesinambungan dengan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi diatas 10 %.
3. Peranan industri kecil dan menengah dalam mempengaruhi pertumbuhan perekonomian yang mengalami peningkatan produksinya tiap tahunnya.
4. Terjadi peningkatan pangsa pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor serta meningkatkan ekspor.
5. Peningkatan penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri serta penguasaan teknologi dan kemampuan berinovasi.
6. Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri sesuai dengan potensi komoditas unggulan ke seluruh wilayah Kabupaten Nunukan.
7. Terbangunnya sinergitas yang menguntungkan antara industri hulu dengan industri hilir dalam pasokan bahan baku

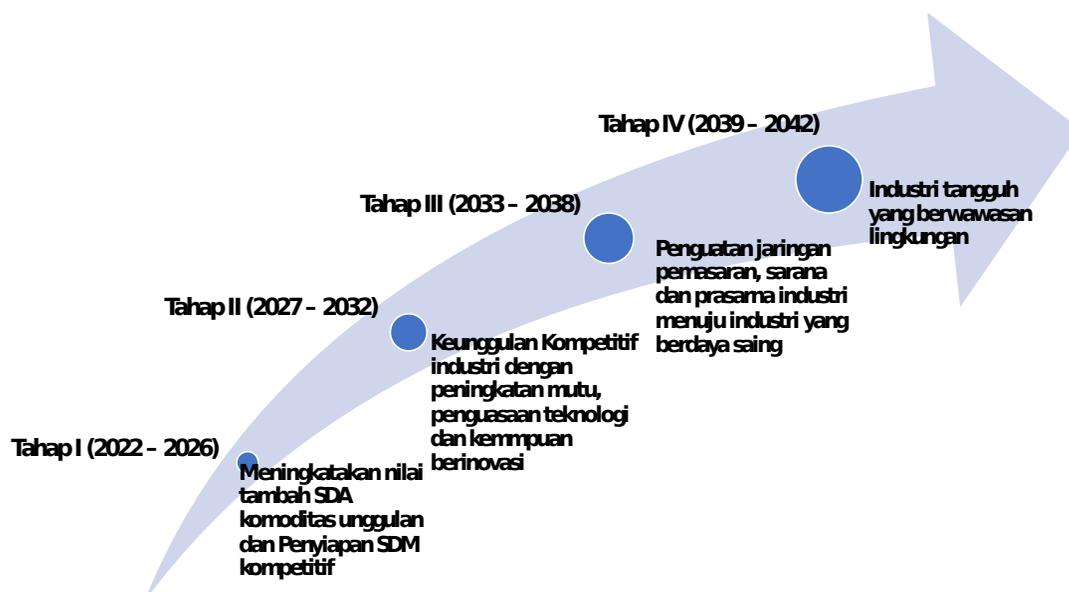
Sasaran pembangunan sektor industri Kabupaten Nunukan secara kuantitatif periode Tahun 2022 – 2042 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel III-37 Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Nunukan 2021 – 2026

No	Sasaran	Tahun					Keterangan
		2021 *	2022-2026	2027 - 2032	2033-2038	2039-2042	
1	Pertumbuhan sektor industri tanpa migas (%)	5,95	6,05	6,25	6,65	6,95	rata-rata pertumbuhan 3,97 %/tahun
2	Kontribusi industri tanpa migas terhadap PDRB (%)	7,59	8,10	8,75	9,67	10,58	rata-rata pertumbuhan 8,66 %/tahun
3	Nilai Ekspor Produk Industri tanpa migas (Rp triliun)	1,14	1,25	1,98	3,14	4,97	rata-rata pertumbuhan 46,19 %/tahun
4	Jumlah Tenaga Kerja tanpa migas (orang)	7.862	8.620	13.657	21.637	34.280	rata-rata pertumbuhan 46,23 %/tahun
5	Penambahan Populasi Industri skala menengah-besar (unit usaha)	17	19	30	48	76	rata-rata pertumbuhan 47,09 %/tahun

Keterangan : ** Base line data, Sumber dari Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindag dan analisis 2022

Penahapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kalimantan Utara, tahapan dan arah rencana pembangunan industri Kabupaten Nunukan seperti pada gambar berikut.



Gambar III-19 Tahapan Pengembangan Industri Kabupaten Nunukan

BAB IV
STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
NUNUKAN

10.1. Strategi Pembangunan Industri

Pembangunan industri di Kabupaten Nunukan merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional yang diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan industri yang berkelanjutan serta didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Saat ini pembangunan industri sedang dihadapkan pada berbagai tantangan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri dan ekonomi nasional. Peningkatan daya saing industri merupakan salah satu pilihan yang harus dilakukan agar produk industri nasional mampu bersaing di dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya, untuk pelaksanaan prinsip tersebut dilakukan dengan strategi berikut.

Tabel IV-38 IFAS

Faktor Eksternal	Strengths (Kekuatan)	Strategi
Faktor Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan/Supply Bahan Baku; 2. Kontinuitas dan Kualitas Bahan Baku; 3. Ketersediaan Tenaga Kerja; 4. Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Dan Latihan; 5. Kemampuan Dan Ketereampilan Tenaga Kerja; 6. Dukungan Infrastruktur Pemasaran; 7. Kekhasan/Keunikan; 8. Kemampuan Mengangkat Kebanggaan Daerah; 9. Brand Lokal 	<p style="text-align: center;">Strategi SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan dalam memenuhi permintaan pasar; 2. Pengembangan keterampilan personal (Self Effikasi) guna menghadapi persaingan global agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk. 3. Peningkatan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana industri dalam meningkatkan produksi dan pemasaran
	<p style="text-align: center;">Opportunity (Peluang)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangkauan Pasar Internasional-Nasional; 2. Posisi Produk Dalam Kebijakan Daerah; 3. Dukungan Lembaga Pemerintah; 4. Penciptaan Nilai Tambah/Diversifikasi Produk; 	
	<p style="text-align: center;">Treaths (Tantangan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi Persaingan; 2. Ketersediaan Teknologi; 3. Dorongan Inovasi 4. Ketersediaan Sumber Energi; 5. Penyerapan Tenaga Kerja; 6. Peningkatan Kesejahteraan; 7. Peranan Kelestarian Lingkungan; 8. Kesiapan Dan Kesediaan Masyarakat 9. Kesiapan Dan Kesediaan Pemerintah 10. Kesiapan Dan Kesediaan Pelaku Usaha 	<p style="text-align: center;">Strategi ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menumbuh-kembangkan industri unggulan berbasis sumber daya lokal dan kekhasan daerah dengan struktur industri yang kuat dan berdaya saing 2. Pembangunan infrastruktur kompetensi, 3. Pembangunan dan pengembangan lembaga pendidikan vokasi dan lembaga diklat berbasis kompetensi, 4. Pembangunan SDM berbasis kompetensi, 5. Penyusunan kebijakan terkait SDM industri.

Tabel IV-39 EFAS

	Faktor Eksternal	Weakness (Kelemahan)	Strategi
Faktor Eksternal		1. Ketersediaan/Supply Bahan Baku; 2. Koninuitas dan Kualitas Bahan Baku; 3. Ketersediaan Tenaga Kerja; 4. Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Dan Latihan; 5. Kemampuan Dan Ketereampilan Tenaga Kerja	Strategi WO 1. Peningkatan kemampuan kelembagaan sentra IKM dan sentra Industri 2. Pemberian insentif kepada industry dasar yang melibatkan IKM dalam rantai industrinya 3. Desiminasi informasi dan inovasi melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat 4. Penyiapan akses ke Lembaga pembiayaan
	Opportunity (Peluang)	5. Jangkauan Pasar Internasional-Nasional; 6. Posisi Produk Dalam Kebijakan Daerah; 7. Dukungan Lembaga Pemerintah; 8. Penciptaan Nilai Tambah/Diversifikasi Produk;	
	Treaths (Tantangan)	1. Kondisi Persaingan; 2. Ketersediaan Teknologi; 3. Dorongan Inovasi 4. Ketersediaan Sumber Energi; 5. Penyerapan Tenaga Kerja; 6. Peningkatan Kesejahteraan; 7. Peranan Kelestarian Lingkungan; 8. Kesiapan Dan Kesediaan Masyarakat 9. Kesiapan Dan Kesediaan Pemerintah 10. Kesiapan Dan Kesediaan Pelaku Usaha	Strategi WT 1. Penguatan pasokan dan keberlangsungan bahan baku yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan 2. Kerjasama antar insitusi dalam menghadapi digilitasisasi industri

Dari strategi pada tabel IFAS-EFAS diatas maka strategi pembangunan industri di Kabupaten Nunukan, antara lain:

1. Strategi SO (*Strengths* (Kekuatan) - *Opportunity* (Peluang)), meliputi:
 - a. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan dalam memenuhi permintaan pasar;
 - b. Pengembangan keterampilan personal (Self Effikasi) guna menghadapi persaingan global agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk;
 - c. Peningkatan pembangunan infrastruktur,sarana dan prasarana industri dalam meningkatkan produksi dan pemasaran.
2. Strategi ST (*Strengths* (Kekuatan) - *Treaths* (Tantangan)), meliputi:
 - a. Menumbuh-kembangkan industri unggulan berbasis sumber daya lokal dan kekhasan daerah dengan struktur industri yang kuat dan berdaya saing
 - b. Pembangunan infrastruktur kompetensi;

- c. Pembangunan dan pengembangan lembaga pendidikan vokasi dan lembaga diklat berbasis kompetensi;
 - d. Pembangunan SDM berbasis kompetensi;
 - e. Penyusunan kebijakan terkait SDM industri.
3. Strategi WO (*Weakness* (Kelemahan) - *Opportunity* (Peluang)), meliputi:
- a. Peningkatan kemampuan kelembagaan sentra IKM dan sentra Industri;
 - b. Pemberian insentif kepada industry dasar yang melibatkan IKM dalam rantai industrinya;
 - c. Desiminasi informasi dan inovasi melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat;
 - d. Penyiapan akses ke Lembaga pembiayaan.
4. Strategi WT (*Weakness* (Kelemahan) - *Treaths* (Tantangan)), meliputi:
- a. Penguatan pasokan dan keberlangsungan bahan baku yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - b. Kerjasama antar insitusi dalam menghadapi digilitasisasi industri.

Berdasarkan hasil analisis SWOT diatas, dan dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan industri, maka Strategi Pembangunan Industri Kabupaten Nunukan untuk mengembangkan berbagai program adalah sebagai berikut:

1. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan dalam memenuhi permintaan pasar;
2. Menumbuh kembangkan industri unggulan berbasis sumber daya lokal dan kekhasan daerah dengan struktur industri yang kuat dan berdaya saing dengan mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan Sentra IKM.
3. Pengembangan keterampilan personal (Self Effikasi), penguasaan teknologi dan pengembangan lembaga pendidikan vokasi dan lembaga diklat berbasis kompetens guna menghadapi persaingan global agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk.
4. Peningkatan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana industri dalam meningkatkan produksi dan pemasaran
5. Pemberian insentif kepada industry dasar yang melibatkan IKM dalam rantai industri dari hulu sampai hilir
6. Kerjasama antar insitusi terkait dalam menghadapi digilitasisasi industri
7. Melakukan keberpihakan dalam rangka membangun kekuatan IKM

10.2. Program Pembangunan Industri

4.2.1. Program Pengembangan Industri Unggulan

1. Sektor Unggulan

Penetapan industri unggulan Kabupaten Nunukan dilakukan melalui beberapa fase dan analisis. Penetapan ini diawali dengan identifikasi sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi daerah. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan pemilihan longlist komoditas unggulan dari sektor/sub sektor unggulan dan sektor/sub sektor lainnya. Kemudian dilakukan pemilihan short list komoditas unggulan dan dilanjutkan dengan penentuan komoditas unggulan prioritas yang akan masuk sebagai basis dalam penentuan industri unggulan Kabupaten Nunukan.



Gambar IV-20 Kerangka Analisis Industri Unggulan Terpilih

Dalam menentukan industri unggulan dilakukan melalui 3 pendekatan yaitu analisis LQ, Analisis Shift-Share dan Analisis Tipologi Klassen.

a. Analisis LQ

Location Quotient (LQ) adalah sebuah perhitungan yang mencerminkan tingkat keunggulan komparatif sektor/sub sektor tertentu di suatu wilayah dibandingkan dengan daerah/wilayah lain. Nilai LQ umumnya digunakan untuk menentukan sektor basis ekonomi di wilayah tersebut. Jumlah LQ diperoleh dengan membandingkan proporsi sektor tertentu di Kabupaten Nunukan dengan proporsi sektor serupa di Provinsi Kalimantan Utara. Jika perhitungan LQ kurang dari 1, hal ini mengindikasikan bahwa sektor tersebut tidak memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan sektor serupa di tingkat provinsi, Jika nilai LQ sama dengan 1, hal ini mengindikasikan bahwa sektor tersebut memiliki tingkat keunggulan komparatif yang serupa dengan sektor sejenis di tingkat Provinsi. Namun, jika nilai LQ lebih dari 1, hal ini mengindikasikan bahwa sektor sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor seupa di tingkat Provinsi. Nilai LQ setiap sektor di Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV-40 Nilai LQ Kabupaten Nunukan Tahun 2017 – 2020

No	Sektor Menurut Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	Keterangan
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,32	1,37	1,39	1,40	Sektor basis
2	Pertambangan dan Penggalian	1,74	1,77	1,79	1,80	Sektor basis
3	Industri Pengolahan	0,78	0,79	0,78	0,80	Sektor Non Basis
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,47	0,46	0,49	0,49	Sektor Non Basis
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,66	0,65	0,66	0,65	Sektor Non Basis
6	Konstruksi	0,57	0,58	0,57	0,58	Sektor Non Basis
7	Perdagangan besar dan eceran	0,49	0,48	0,47	0,47	Sektor Non Basis
8	Transportasi dan Pergudangan	0,29	0,29	0,29	0,30	Sektor Non Basis
9	Penyediaan akomodasi dan Makan Minum	0,63	0,64	0,64	0,65	Sektor Non Basis
10	Informasi dan Komunikasi	0,73	0,73	0,74	0,73	Sektor Non Basis
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,30	0,29	0,29	0,30	Sektor Non Basis
12	Real Estate	0,56	0,57	0,56	0,56	Sektor Non Basis

13	Jasa Perusahaan	0,14	0,14	0,13	0,13	Sektor Non Basis
14	Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jamsos	0,55	0,55	0,56	0,55	Sektor Non Basis
15	Jasa pendidikan	0,58	0,57	0,57	0,56	Sektor Non Basis
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,02	0,02	0,02	0,02	Sektor Non Basis
17	Jasa Lainnya	0,64	0,63	0,63	0,63	Sektor Non Basis

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Dari tabel diatas terlihat bahwa dalam periode 2017 – 2020 terdapat 2 sektor yang memiliki nilai $LQ > 1$ yaitu sektor **pertanian, kehutanan, perikanan** dan **sektor pertambangan dan penggalian** yang merupakan sektor basis atau permintaan terhadap produk 2 sektor tersebut dapat dipenuhi dari Kabupaten Nunukan dan mampu juga diekspor ke daerah lain dalam cakupan Provinsi Kalimantan Utara.

Untuk sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan sub sektor yang menjadi andalan adalah sub sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan.

Khusus untuk sektor industri walupun nilai LQ nya kurang dari 1 yaitu 0,8, jika dilihat dari subsektornya, maka terdapat sektor basis yang nilai LQ nya lebih dari satu yaitu sub **sektor Industri Makanan dan Minuman** dan **Sub Sektor Industri Kayu**.

b. Analisis *Shift – Share*

Analisis shift-share adalah Teknik analisis yang digunakan untuk melakukan analisis statistic regional, termasuk pendapatan perkapita, output, tenaga kerja dan data lainnya. Metode ini juga digunakan untuk mengamati struktur pasar ekonomi regional dan perubahannya secara deskriptif dengan menekankan pada komponen pertumbuhan sectoral atau industri regional dan memproyeksikan kegiatan ekonomi di daerah dengan data yang terbatas. Nilai shift-share setiap sektor di Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV-41 Nilai Shift-Share Kabupaten Nunukan Tahun 2017 – 2020

No	Sektor Menurut Lapangan Usaha	Keunggulan			
		Rasional	Proposional	Competitif	Pergeseran Bersih
		Nij	Mij	Cij	Dij
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.324,77	424,29	322,07	2.071,13
2	Pertambangan dan Penggalian	2.923,24	627,75	394,57	3.945,56
3	Industri Pengolahan	480,26	95,41	35,73	611,40
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,55	0,66	0,31	2,51
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	2,55	0,78	- 0,24	3,09
6	Konstruksi	437,79	218,07	17,16	673,02
7	Perdagangan besar dan eceran	343,93	138,74	- 71,60	411,07
8	Transportasi dan Pergudangan	123,97	32,70	16,27	172,95
9	Penyediaan akomodasi dan Makan Minum	60,78	16,77	7,91	85,45
10	Informasi dan Komunikasi	102,38	46,16	4,95	153,50
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	21,24	5,55	- 0,62	26,18
12	Real Estate	27,14	7,17	0,58	34,89
13	Jasa Perusahaan	2,12	0,45	- 0,37	2,21
14	Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jamsos	175,73	42,04	- 0,18	217,60

No	Sektor Menurut Lapangan Usaha	Keunggulan			
		Rasional	Proposional	Competitif	Pergeseran Bersih
		Nij	Mij	Cij	Dij
15	Jasa pendidikan	88,47	31,54	- 11,76	108,25
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,54	0,68	- 0,04	2,17
17	Jasa Lainnya	26,08	11,46	- 3,11	34,42

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Dari tabel diatas terlihat bahwa dalam periode 2017 – 2020 nilai keunggulan kompetitif dari pergeseran output produk dalam wilayah Provinsi Nunukan terdapat 8 sektor yang menjadi sektor kompetitif dan potensial dikembangkan kedepan yaitu :

Tabel IV-42 Sektor yang Kompetitif Kabupaten Nunukan Tahun 2017 – 2020

No	Sektor	Keterangan
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Sektor Unggulan yang memberikan kontribusi besar pada tingkat provinsi dengan pertumbuhan lebih tinggi dari tingkat provinsi
2	Pertambangan dan Penggalian	
3	Industri Pengolahan	
4	Konstruksi	
5	Pengadaan Listrik dan Gas	Sektor potensi yang memberikan penunjang yang tinggi untuk pertumbuhan sektor unggulan
6	Transportasi dan Pergudangan	
7	Penyediaan akomodasi dan Makan Minum	Sektor potensial untuk mendukung pembangunan pariwisata yang memberikan kontribusi besar pada tingkat provinsi dengan pertumbuhan lebih tinggi dari tingkat provinsi
8	Informasi dan Komunikasi	

Sumber : Hasil Analisis, 2022

c. Tipologi Klassen

Alat analisis Tipologi Klasen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah. Tipologi Klasen pada dasarnya membagi daerah/sektor perekonomian berdasarkan dua indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi daerah/sektor dan kontribusi ekonomi daerah/sektor. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertical dan rata-rata kontribusi ekonomi sebagai sumbu horizontal, sektor yang diamati dibedakan menjadi 4 klasifikasi atau kuadran yaitu :

- ↳ Kuadran I : sektor cepat maju dan cepat tumbuh (jika pertumbuhan dan kontribusi bernilai positif);
- ↳ Kuadran II : sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan cepat (jika pertumbuhan positif kontribusi negatif);
- ↳ Kuadran III : sektor relatif tertinggal (jika pertumbuhan negatif kontribusi negatif);
- ↳ Kuadran IV : sektor maju tapi tertekan (jika pertumbuhan positif kontribusi negatif);

Kriteria yang digunakan untuk membagi sektor perekonomian dalam kajian ini adalah sebagai berikut :

- ↳ Sektor cepat maju dan cepat tumbuh yaitu sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kontribusi yang lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi;

- Sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan cepat yaitu sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi tingkat kontribusi yang lebih rendah dibanding rata-rata provinsi;
- Sektor maju tapi tertekan yaitu sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi rendah tetapi tingkat kontribusi yang lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi;
- Sektor relatif tertinggal yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kontribusi yang lebih rendah dibanding rata-rata provinsi.



Gambar IV-21 Kuadran tipologi Klasen

Hasil analisis Tipologi Kalasen setiap sektor di Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel IV-43 Tipologi Klasen Kabupaten Nunukan Tahun 2017 – 2020

No	Sektor Menurut Lapangan Usaha	Prov. Kaltara		Kab. Nunukan		Ket.	Kuadran
		Rata2 Laju	Rata2 kontribusi	Rata2 Laju	Rata2 kontribusi		
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,10	16,18%	0,12	22,00%	sektor maju dan tumbuh Pesat	1
2	Pertambangan dan Penggalian	0,07	26,79%	0,08	47,13%	sektor maju dan tumbuh Pesat	1
3	Industri Pengolahan	0,06	9,44%	0,07	7,39%	sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan cepat	2
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,05%	0,14	0,03%	sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan cepat	2
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,09	0,06%	0,08	0,04%	sektor relatif tertinggal	3
6	Konstruksi	0,1453	13,34%	0,1480	7,64%	sektor potensial atau masih dapat berkembang	2

No	Sektor Menurut Lapangan Usaha	Prov. Kaltara		Kab. Nunukan		Ket.	Kuadran
		Rata2 Laju	Rata2 kontribusi	Rata2 Laju	Rata2 kontribusi		
						g dengan cepat	
7	Perdagangan besar dan eceran	0,12	11,81%	0,10	5,61%	sektor relatif tertinggal	3
8	Transportasi dan Pergudangan	0,08	6,98%	0,09	2,02%	sektor maju tapi tertekan	4
9	Penyediaan akomodasi dan Makan Minum	0,09	1,59%	0,10	1,01%	sektor maju tapi tertekan	4
10	Informasi dan Komunikasi	0,13	2,37%	0,14	1,73%	sektor maju tapi tertekan	4
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,0806	1,13%	0,0780	0,33%	sektor relatif tertinggal	3
12	Real Estate	0,0818	0,77%	0,0837	0,43%	sektor maju tapi tertekan	4
13	Jasa Perusahaan	0,07	0,23%	0,05	0,03%	sektor relatif tertinggal	3
14	Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jamsos	0,0745	5,04%	0,07476	2,76%	sektor maju tapi tertekan	4
15	Jasa pendidikan	0,11	2,48%	0,10	1,41%	sektor relatif tertinggal	3
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,1301	1,04%	0,1277	0,03%	sektor relatif tertinggal	3
17	Jasa Lainnya	0,13	0,67%	0,12	0,42%	sektor relatif tertinggal	3

Sumber : Hasil Analisis, 2022



Gambar IV-22 Tipologi Klassen Kabupaten Nunukan Tahun 2017 – 2020

Apabila semua 3 analisis diatas digabungkan maka akan dilihat sektor/sub sektor unggulan di Kabupaten Nunukan seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV-44 Penentuan Sektor Unggulan Kabupaten Nunukan

No	Sektor Menurut Lapangan Usaha	LQ	Shift-Share	Tiplogi Klassen	Sektor Unggulan
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Sektor basis	Kompetitif Tinggi	Maju dan Pesat	Sektor Unggulan

No	Sektor Menurut Lapangan Usaha	LQ	Shift-Share	Tiplogi Klasen	Sektor Unggulan
2	Pertambangan dan Penggalian	Sektor basis	Kompetitif Tinggi	Maju dan Pesat	Sektor Unggulan
3	Industri Pengolahan	Sektor Non Basis	Kompetitif Tinggi	Potensial dan berkembang pesat	Sektor Unggulan
4	Konstruksi	Sektor Non Basis	Kompetitif Tinggi	Potensial dan berkembang pesat	Sektor Unggulan
5	Pengadaan Listrik dan Gas	Sektor Non Basis	Kometitif Potensial	Potensial dan berkembang pesat	Sektor Unggulan
6	Penyediaan akomodasi dan Makan Minum	Sektor Non Basis	Kometitif Potensial	Tertekan	Sektor Potensial
7	Informasi dan Komunikasi	Sektor Non Basis	Kometitif Potensial	Tertekan	Sektor Potensial
8	Transportasi dan Pergudangan	Sektor Non Basis	Kometitif Potensial	Tertekan	Sektor Potensial
9	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	Sektor Non Basis	Tidak Kompetitif	Tertinggal	Non Sektor Unggulan
10	Perdagangan besar dan eceran	Sektor Non Basis	Tidak Kompetitif	Tertinggal	Non Sektor Unggulan
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	Sektor Non Basis	Tidak Kompetitif	Tertinggal	Non Sektor Unggulan
12	Real Estate	Sektor Non Basis	Tidak Kompetitif	Tertekan	Non Sektor Unggulan
13	Jasa Perusahaan	Sektor Non Basis	Tidak Kompetitif	Tertinggal	Non Sektor Unggulan
14	Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jamsos	Sektor Non Basis	Tidak Kompetitif	Tertekan	Non Sektor Unggulan
15	Jasa pendidikan	Sektor Non Basis	Tidak Kompetitif	Tertinggal	Non Sektor Unggulan
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Sektor Non Basis	Tidak Kompetitif	Tertinggal	Non Sektor Unggulan
17	Jasa Lainnya	Sektor Non Basis	Tidak Kompetitif	Tertinggal	Non Sektor Unggulan

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Hasil analisis sektor unggulan diatas, apabila diabungkan dengan pembangunan industri Kabupaten Nunukan maka dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar IV-23 Pengembangan Sektor Terhadap Pembangunan Industri Kabupaten Nunukan

2. Komoditi Unggulan

a. Komoditi Sektor Perkebunan

Salah satu produk perkebunan yang banyak diminati terutama bagi para investor adalah kelapa sawit. Produk tanaman perkebunan lain yang telah diusahakan dan minat pengembangannya tinggi, antara lain jenis tanaman kakao. Pengembangan sektor perkebunan di Kabupaten Nunukan pada masa yang akan datang masih sangat diharapkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah, terutama untuk jenis-jenis tanaman yang mempunyai prospek pasar baik dan dapat dijadikan sebagai bahan baku untuk pengembangan industri seperti kelapa sawit, kakao, dan kelapa. Jenis tanaman kelapa sawit merupakan jenis tanaman andalan secara nasional, mempunyai keterkaitan kedepan untuk berkembangnya kegiatan industri dan berorientasi ekspor, mempunyai kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja serta dalam pelaksanaan pengembangannya dapat melibatkan partisipasi masyarakat desa. Demikian juga dengan pengembangan jenis tanaman kakao dan kelapa juga mempunyai keunggulan untuk dikembangkan dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi Kabupaten Nunukan.

Dalam rangka pengembangan pertanian tanaman perkebunan perlu diketahui seberapa besar ketersediaan lahan yang dapat dikembangkan untuk kegiatan tersebut, khususnya pengembangan jenis tanaman kelapa sawit, kelapa dan kakao. Analisis kesesuaian pengembangan tanaman perkebunan dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Kawasan pertanian dengan ketinggian < 2.000 meter di atas permukaan laut.
- 2) Kawasan dengan lereng < 45 persen.
- 3) Kedalaman efektif lapisan tanah > 50 cm.
- 4) Berada di luar kawasan lindung, kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi terbatas.

Beberapa tanaman perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Nunukan antara lain kelapa sawit, lada, karet, kelapa, kopi, kakao, panili, cengkeh, tebu, dan aren.

Tabel IV-45 Perkembangan Luas Areal Komoditas Tanaman Perkebunan di Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2020

No	Jenis Tanaman	Luas Tanam Komoditas Tanaman Perkebunan (Ha)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Karet	268,00	173,00	136,50	134,00	134,00
2	Kelapa	407,10	366,39	369,39	342,75	342,75
3	Kelapa Sawit	23.752,30	29.992,00	110.708,14	124.623,16	124.623,16
4	Kopi	85,20	54,70	61,00	95,50	99,50
5	Lada	41,25	97,10	109,75	119,50	119,50
6	Kakao	5.165,00	1.427,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
7	Panili	8,51	3,00	3,00	11,00	11,00
8	Cengkeh	-	100,80	159,75	167,25	167,25
9	Tebu	-	-	29,00	28,00	28,00
10	Aren	-	-	7,70	7,70	7,70

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan, 2021

Berdasarkan data diatas menerangkan bahwa potensi di sektor perkebunan memiliki geliat yang cukup besar terutama pada komoditas Kelapa Sawit dan Kakao. Sehingga untuk mendongkrak komoditas lainnya diperlukan suatu mekanisme pengaturan ruang diantaranya:

- 1) Pengembangan perkebunan harus dikaitkan dengan pengembangan masyarakatnya. Pola pengembangan PIR sebenarnya dapat digunakan, dimana investor dan masyarakat bekerjasama saling menguntungkan. Investor sebagai pemodal mengelola kebun inti, sedangkan masyarakat mengelola lahan plasma dalam besaran dua hingga lima hektar. Masyarakat yang mempunyai kemampuan terbatas, baik dalam modal, keterampilan dan pengetahuan dapat dibantu oleh investor. Bantuan modal dapat diberikan melalui penyediaan bibit, pupuk, dan sebagainya. Sedangkan keterampilan dan pengetahuan, dapat diadakan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat oleh investor.
- 2) Dalam pengembangan perlu adanya pengendalian usaha perkebunan agar kelestarian lingkungan tetap terjaga, yaitu:
 - a) Tidak diperkenankan adanya bangunan, kecuali bangunan penunjang unit perkebunan seperti pabrik, gudang, pembibitan dan perumahan karyawan;
 - b) Luas bangunan maksimum sebesar dua persen dari luas perkebunan;
 - c) Perkebunan dengan luas < 25 hektar, maka kepadatan maksimum lima rumah/ha;
 - d) Pengaturan jalan untuk jalan produksi memiliki lebar badan jalan empat meter dan tidak boleh diperkeras;
 - e) Untuk jalan transportasi dengan lebar badan jalan enam meter diperkeras dengan batu, tidak diaspal; serta
 - f) Pengembangan perkebunan pada lahan plasma yang dikelola oleh masyarakat dapat dikaitkan dengan pengembangan peternakan.

b. Komoditi Sektor Tanaman Pangan

1) Tanaman Pangan Lahan Kering

Salah satu hal yang penting bagi pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat yaitu mengembangkan tanaman pangan lahan kering. Beberapa produksi pertanian yang telah dikembangkan antara lain tanaman padi, jagung, kacang-kacangan dan tanaman pertanian lainnya, walaupun keseluruhan produksi belum maksimal. Beberapa hasil produksi tanaman pangan lahan kering umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dan sebagian dijual ke pusat perkotaan. Pengembangan tanaman pangan lahan kering pada masa mendatang masih tetap harus ditingkatkan, terutama untuk mendukung ketahanan dalam bidang pangan (*food security*) sehingga dapat menghilangkan ketergantungan terhadap daerah sekitarnya. Jika dukungan lahan dan sumberdaya manusia memadai, Kabupaten Nunukan juga dapat dijadikan sebagai salah satu lumbung pangan di Indonesia.

Adapun kawasan yang potensial untuk pengembangan tanaman pangan lahan kering tersebut menyebar di Kecamatan Sebuku, Sembakung, Lumbis dan Krayan. Namun, kawasan potensial yang berada di kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) tidak direkomendasikan untuk dikembangkan dalam skala besar, kecuali untuk pertanian penduduk yang telah bermukim di kawasan tersebut. Hal ini disebabkan kawasan ini merupakan kawasan konservasi Taman Nasional Kayan Mentarang yang perlu dijaga kelestariannya, disamping juga sebagai kawasan hutan lindung.

Dalam pengelolaan lahan potensial pengembangan tanaman pangan lahan kering tersebut diperlukan suatu mekanisme pengaturan ruang diantaranya:

- a) Perlu adanya perluasan pengembangan tanaman pangan lahan kering secara optimal sesuai dengan kesesuaian lahan, dalam rangka menjaga ketahanan dalam bidang pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap daerah lain.
- b) Dalam pengembangannya perlu mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - ↳ Diperkenankan adanya budidaya peternakan, permukiman perdesaan dan kegiatan budidaya pertanian lainnya.
 - ↳ Permukiman perdesaan memiliki kepadatan maksimum lima rumah/hektare.

2) Tanaman Pangan Lahan Basah

Pengembangan tanaman pangan lahan basah bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan (*food security*) dan ketergantungan terhadap daerah lain, yaitu melalui pengembangan tanaman pangan padi sawah, serta pada akhirnya dapat dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan yang potensial untuk tanaman pangan lahan basah menyebar di Kecamatan Sebatik, Nunukan, Sembakung, Lumbis, dan Krayan. Kawasan potensial untuk tanaman pangan lahan basah yang berada di Kecamatan Krayan tidak direkomendasikan untuk dikembangkan, kecuali secara terbatas dikembangkan oleh penduduk yang bermukim di kawasan tersebut. Hal ini dilakukan mengingat kawasan tersebut berada dalam kawasan konservasi Taman Nasional Kayan Mentarang. Aktivitas masyarakat adat yang berada di sekitar atau di dalam kawasan Taman Nasional dapat memanfaatkan ruang-ruang yang telah ditetapkan di dalam zona tersebut diantaranya zona tradisional dan zona pemanfaatan sesuai dengan peraturan zonasi Taman Nasional yang dikeluarkan oleh Dirjen Konservasi Sumbe Daya Alam dan Ekosistem tahun 2015 dan penentuan zonasi tersebut telah dibuat sesuai dengan Peraturan Menteri LHK P.76/menlhk-setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

c. Komoditas Sektor Perikanan

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Nunukan. Prospek sektor perikanan cukup menjanjikan karena letak geografis Kabupaten Nunukan yang menguntungkan untuk pemasaran berskala ekspor.

1) Perikanan Tangkap

Perikanan tangkap merupakan usaha penangkapan ikan yang umumnya dilakukan di laut, terutama di sekitar pantai dan landasan kontinen. Di Kabupaten Nunukan, seluruh jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan cukup layak untuk dioperasikan. Pengembangan masing-masing alat tangkap untuk meningkatkan produktivitas penangkapan di perairan Kabupaten Nunukan secara lestari adalah sebagai berikut:

- a) Alat tangkap Trawl > 10 GT, perlu dilakukan pengembangan jumlah armada karena alat tangkap lainnya belum mampu memanfaatkan potensi perairan Nunukan pada daerah lebih dari empat mil hingga lepas pantai dan sepanjang Selat Makasar. Diharapkan pengembangan alat ini dapat mengurangi persaingan dengan nelayan yang hanya dapat beroperasi di daerah kurang dari 4 mil dari garis pantai.
- b) Alat tangkap Trawl yang ditarik dengan kapal < 5 GT cukup layak untuk dipertahankan, namun jumlah armadanya tidak perlu dikembangkan karena selama ini pengoperasiannya tidak selektif terhadap jenis ikan. Pengembangan terhadap alat tangkap ini diarahkan kepada teknologi, seperti mekanisasi penarikan jaring (hauling).
- c) Alat tangkap Trammel Net dengan tujuan utama untuk menangkap udang, tidak perlu ditambah jumlahnya, tetapi secara teknologi harus dikaji lebih lanjut mengenai tinggi jaring berkaitan dengan tingkat selektifitas hasil tangkapan.
- d) Alat tangkap Gill Net, dapat dikembangkan, baik intensitas maupun teknik pengoperasiannya melalui penambahan daya jangkauan jaring. Pengetahuan nelayan mengenai teknik pengoperasian gill net dan keberadaan ikan ekonomis penting masih perlu dibina oleh pihak terkait.
- e) Alat tangkap Encircling Gill Net, masih dapat dikembangkan dengan target untuk menangkap ikan-ikan ekonomis penting. Hal penting adalah ukuran mata jaring berkaitan dengan tingkat selektivitas penangkapan jenis ikan dan areal penangkapan mengingat pengoperasian jaring ini membutuhkan areal yang relatif luas.
- f) Alat tangkap Pole dan Line, perlu dikembangkan pada kualitas armadanya meliputi kelengkapan navigasi dan informasi daerah penangkapan. Hal ini disebabkan karena alat tangkap ini dioperasikan di perairan lepas pantai dengan target jenis ikan pelagis yang berkelompok, seperti ikan tongkol, cakalang dan tuna.
- g) Alat tangkap Long Line/pancing rawai, sangat memungkinkan untuk dikembangkan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif sehingga daerah operasinya dapat diperluas hingga di atas empat mil dari garis pantai.
- h) Alat tangkap Kelong, dioperasikan dengan memperhatikan pola pasang surut di sepanjang pantai pulau-pulau kecil. Pengembangannya perlu dipertahankan karena dapat membantu sebagian nelayan untuk memperoleh penghasilan tambahan. Namun ukuran mata jaring yang digunakan harus diperhatikan karena dapat berdampak pada kelestarian lingkungan.

- i) Alat tangkap Julu/Tugu, hampir sama dengan Kelong dalam pengoperasian dan jenis ikan yang tertangkap. Alat ini tidak dapat dikembangkan lagi karena tidak ramah lingkungan dan dapat membahayakan pelayaran karena banyak dioperasikan di mulut muara.
- j) Alat tangkap Hampang, tidak direkomendasikan untuk dikembangkan karena dapat mengganggu kelestarian sumberdaya hayati di sekitarnya.

Selanjutnya, sebagian besar jenis ikan yang terdapat di perairan Kabupaten Nunukan bernilai ekonomis penting, mulai dari ikan-ikan karang, kerapu, baronang, ikan merah, udang, kepiting dan kerang yang tersebar di daerah perairan pantai, hingga ikan bawal, tongkol dan tuna yang tersebar di perairan lepas pantai.

Dalam rangka pemanfaatan kekayaan sumberdaya pesisir dan kelautan Kabupaten Nunukan ini, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh para nelayan harus dilakukan secara efisien dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

2) Budidaya Tambak

Berdasarkan kondisi fisik lahan, sangat potensial untuk mengembangkan kegiatan budidaya tambak. Salah satu kelebihan yang dimiliki untuk pengembangan budidaya tambak adalah keberadaan hutan mangrove yang cukup luas. Pada umumnya peningkatan produktivitas tambak harus dilakukan secara intensifikasi mengingat usaha yang dilakukan masih bersifat tradisional dengan tingkat kematian udang yang tinggi. Pengembangan usaha pertambakan dilakukan melalui:

- a) Penyediaan benih yang berkualitas dan terjamin kontinuitasnya melalui panti-panti pembenihan (*hatchery*).
- b) Perbaikan konstruksi tambak (pematang, saluran pemasukan dan pengeluaran air) dan sirkulasi air tambak sehingga kualitasnya terjamin.
- c) Peningkatan padat penebaran benih dengan pemberian pakan yang proporsional.
- d) Pengendalian kesuburan tambak dan penyakit melalui pemupukan dan pengapuran.
- e) Penyediaan pakan dan obat-obatan yang memadai.
- f) Penyuluhan dan bimbingan mengenai budidaya tambak yang memperhatikan kelestarian lingkungan.
- g) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penanganan pasca panen, pemasaran dan distribusi hasil tambak.

3) Budidaya Air Laut

Rumput laut merupakan salah satu komoditas yang dikembangkan dalam kegiatan budidaya air laut. Parameter kesesuaian lokasi untuk kegiatan budidaya air laut adalah:

- a) Keterlindungan lokasi yang dimaksud dari dinamika perairan laut, cukup baik karena berada pada perairan yang semi tertutup.
- b) Indikasi pencemaran yang dapat mengganggu kegiatan budidaya, relatif tidak ada.

- c) Kondisi pasang surut memiliki fluktuasi yang cukup baik sehingga meskipun terjadi pasang surut maksimum, lokasi budidaya masih tetap dapat tergenang.
- d) Arus yang tidak terlalu besar, sehingga sangat mendukung bagi kehidupan organisme kerang-kerangan.
- e) Oksigen terlarut (DO) di lokasi berkisar antara 6,8 - 6,9 mg/l, yang artinya sangat baik untuk kegiatan budidaya laut.
- f) Salinitas yang terdapat di lokasi, yaitu antara 25 - 26 persen, berada pada kisaran yang baik untuk kegiatan budidaya laut.

Pengembangan kegiatan budidaya laut juga dipengaruhi faktor-faktor non teknis seperti penyediaan sarana produksi, penanganan pasca panen dan pemasaran. Saat ini usaha budidaya air laut yang mulai berkembang adalah budidaya rumput laut. Berdasarkan hasil analisa, menunjukkan bahwa di perairan Selatan Pulau Tinabasan dan sebelah Timur Pulau Sinelak memiliki potensi yang cukup baik untuk pengembangan kegiatan budidaya laut dengan sistem jaring apung, usaha budidaya tiram dan kerang dara.

3. Industri Unggulan

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/488/X/2021 Tahun 2021 menetapkan bahwa Produk Unggulan, Produk Andalan dan Produk Potensial Kabupaten Nunukan merupakan komoditas sumberdaya alam yang terbaharukan atau produk berupa barang atau jasa unggulan daerah yang akan dikelola dan akan dikembangkan secara kolaboratif untuk menciptakan rantai nilai sehingga memberikan nilai tambah, meningkatkan penghasilan masyarakat, menciptakan lapangan kerja maupun menjadi ikon daerah.

Produk unggulan adalah produk yang potensial dikembangkan pada suatu wilayah dengan memanfaatkan SDA dan SDM lokal yang berorientasi pasar dan ramah lingkungan sehingga memiliki keunggulan kompetitif dan siap menghadapi persaingan global. Selanjutnya Produk Andalan merupakan komoditas potensial yang dipandang dapat dipersandingkan dengan produk sejenis di daerah lain, karena disamping memiliki keunggulan komparatif juga memiliki efisiensi usaha yang tinggi. Efisiensi usaha itu tercermin dari efisiensi produksi, produktivitas pekerja, profitabilitas dan lain-lain. Sedangkan Produk Potensial merupakan komoditas daerah yang memiliki potensi untuk berkembang karena keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif terjadi misalnya karena kecukupan ketersediaan sumberdaya, seperti bahan baku lokal, keterampilan sumberdaya lokal, teknologi produksi lokal serta sarana dan prasarana lokal lainnya. Adapun penetapan Produk Unggulan, Produk Andalan dan Produk Potensial Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV-46 Produk Unggulan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026

No	Nama Produk Unggulan	Lokasi Pengembangan
1	Rumput Laut	Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik barat
2	Kelapa Sawit	Sei manggaris, Nunukan Selatan, Sebatik barat, Sebuku, Tulin Onsoi dan Sembakung
3	Beras Organik Adan Krayan	Dataran Tinggi Krayan
4	Kopi Organik Krayan	Dataran Tinggi Krayan
5	Ubi dan Olahannya	Pulau Nunukan, Sebuku, Sembakung, Tulin Onsoi, Sembakung Atulai dan Lumbis
6	Jagung	Kabupaten Nunukan

Sumber: Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/488/X/2021 Tahun 2021 menetapkan bahwa Produk Unggulan, Produk Andalan dan Produk Potensial Kabupaten Nunukan

Tabel IV-47 Produk Andalan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026

No	Nama Produk Andalan	Lokasi Pengembangan
1	Ikan dan Olahannya	Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik
2	Kakao dan Olahannya	Sebatik Tengah
3	Pisang dan Olahannya	Pulau Sebatik
4	Padi	Pulau Nunukan dan Sebatik
5	Anyaman Bambu Rotan	Dataran Tinggi Krayan
6	Anyaman Rotan	Sembakung dan Sembakung Atulai
7	Garam Krayan	Dataran Tinggi Krayan
8	Semangka Melon	Nunukan Selatan
9	Durian	Nunukan Selatan

Sumber: Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/488/X/2021 Tahun 2021 menetapkan bahwa Produk Unggulan, Produk Andalan dan Produk Potensial Kabupaten Nunukan

Tabel IV-48 Produk Potensial Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026

No	Nama Produk Potensi Daerah	Lokasi Pengembangan
1	Wisata Arung Jeram	Lumbis Pansiangan
2	Wisata Patok 3	Sebatik Tengah
3	Kerbau	Dataran Tinggi Krayan
4	Nenas Krayan	Krayan
5	Jeruk	Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik
6	Ayam Potong	Pulau Nunukan
7	Lada	Pulau Sebatik
8	Kelapa Dalam	Sebatik Barat
9	Sarang Walet	Pulau Nunukan dan Sembakung

Sumber: Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/488/X/2021 Tahun 2021 menetapkan bahwa Produk Unggulan, Produk Andalan dan Produk Potensial Kabupaten Nunukan

Penentuan sektor unggulan menjadi hal yang penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah sesuai era otonomi daerah saat ini, dimana daerah memiliki kesempatan serta kewenangan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah demi mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Adapun kriteria sektor unggulan menurut Sambodo dalam Usya (2006:15) yaitu: pertama sektor unggulan memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kedua sektor unggulan memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif besar, ketiga sektor unggulan memiliki keterkaitan antara sektor yang tinggi baik ke depan maupun ke belakang, dan keempat sektor yang mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi.

Sejalan dengan bergulirnya otonomi daerah, setiap kewenangan menjadi tanggung jawab suatu daerah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakatnya dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia. Dengan demikian kecenderungan untuk mengalokasikan sumberdaya alam berupa komoditas unggulan, dapat menjadi motor penggerak pembangunan suatu daerah.

Produk Unggulan Daerah (PUD) merupakan suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu daerah, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumberdaya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat) yang berkembang di lokasi tertentu. Pengembangan ekonomi lokal merupakan proses membangun dialog dan kemitraan aksi para pihak yang meliputi pemerintah daerah, para pengusaha, dan organisasi-organisasi masyarakat lokal. Pilar-pilar pokok strateginya adalah meningkatkan daya tarik, daya tahan, dan daya saing ekonomi lokal. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan pertumbuhan yang tinggi dan pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat bagi semua pihak di daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja baru, peningkatan dan pengurangan kemiskinan secara signifikan. Berikut disajikan kriteria dalam penentuan komoditas unggulan di Kabupaten Nunukan.

Tabel IV-49 Kriteria Penentuan Industri Unggulan di Kabupaten Nunukan

Faktor	Kriteria	Sub Kriteria
Keunggulan	Ketersediaan dan keberlangsungan Bahan Baku	Ketersediaan/Supply Bahan Baku
		Koninuitas Dan Kualitas Bahan Baku
	Pemasaran-Akses Pasar	Jangkauan Pasar Internasional-Nasional
		Kondisi Persaingan
		Dukungan Infrastruktur Pemasaran
	Dukungan Sumber Daya Manusia	Ketersediaan Tenaga Kerja
		Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Dan Latihan
		Kemampuan Dan Ketereampilan Tenaga Kerja
	Dukungan Kebijakan Dan Kelembagaan Pemerintah	Posisi Produk Dalam Kebijakan Daerah
		Dukungan Lembaga Pemerintah
Manfaat	Nilai Tambah Ekonomis Dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Penciptaan Nilai Tambah/Diversifikasi Produk
		Ketersediaan Teknologi
		Dorongan Inovasi
		Ketersediaan Sumber Energi
	Nilai Tambah Sosial Dan Peningkatan Kesejahteraan	Penyerapan Tenaga Kerja
		Peningkatan Kesejahteraan
		Peranan Kelestarian Lingkungan
	Prestise	Kekhasan/Keunikan
		Kemampuan Mengangkat Kebanggaan Daerah
		Brand Lokal
Stakeholder	Penerimaan Stakeholder	Kesiapan Dan Kesediaan Masyarakat
		Kesiapan Dan Kesediaan Pemerintah
		Kesiapan Dan Kesediaan Pelaku Usaha

Tabel IV-50 Kriteria Penentuan Industri Pengolahan Rumput Laut

Faktor	Kriteria	Bobot	Sub Kriteria	Parameter Ukur	Skala			Nilai Bobot
					Tinggi	Sedang	Rendah	
Keunggulan	Ketersediaan dan keberlangsungan Bahan Baku	0,20	Ketersediaan/Supply Bahan Baku	7.626,22 Ha	3,00			0,60
			Koninuitas dan Kualitas Bahan Baku	416.229,86 Ton	3,00			0,60
	Pemasaran-Akses Pasar	0,15	Jangkauan Pasar Internasional-Nasional	Korea, Filipina	3,00			0,45
			Kondisi Persaingan	Rp. 30.000 - Rp. 40.000 / kg (harga rumput laut kering di pasaran)	3,00			0,45
			Dukungan Infrastruktur Pemasaran	Tersedia Gudang dgn daya tampung 500 Ton, Pelabuhan Sei Jepun; Pelabuhan Sebatik	3,00			0,45
	Dukungan Sumber Daya Manusia	0,10	Ketersediaan Tenaga Kerja	2.696 TK	3,00			0,30
			Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Dan Latihan	Pelatihan pengoperasian pabrik pencetak pelampung rumput laut ramah lingkungan di lokasi bank sampah unit Mamolo, Kecamatan Nunukan Selatan (Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan Kelautan Nunukan dan Pertamina EP Tarakan Field)	3,00			0,30

			Kemampuan Dan Keterampilan Tenaga Kerja	SDM Terlatih	3,00			0,30
	Dukungan Kebijakan Dan Kelembagaan Pemerintah	0,05	Posisi Produk Dalam Kebijakan Daerah	Produk unggulan	3,00			0,15
			Dukungan Lembaga Pemerintah	Terdapat sentra budidaya rumput laut di Kec. Nunukan Selatan Kel. Tanjung Harapan	3,00			0,15
Manfaat	Nilai Tambah Ekonomis Dan Peningkatan Pendapatan Daerah	0,10	Penciptaan Nilai Tambah/Diversifikasi Produk	Tinggi (makanan, bahan pangan, kosmetik, bahan farmasi)	3,00			0,30
			Ketersediaan Teknologi	Rencana Pembangunan Pabrik Pengolahan Rumput Laut	3,00			0,30
			Dorongan Inovasi	Tersedia (Polybag Rumput Laut - Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	3,00			0,30
			Ketersediaan Sumber Energi	Belum mencukupi			1,00	0,10
	Nilai Tambah Sosial Dan Peningkatan Kesejahteraan	0,15	Penyerapan Tenaga Kerja	Tinggi	3,00			0,45
			Peningkatan Kesejahteraan	Tinggi	3,00			0,45
			Peranan Kelestarian Lingkungan	Tinggi	3,00			0,45
Prestise	0,15	Kekhasan/Keunikan	Tinggi	3,00			0,45	
		Kemampuan Mengangkat Kebanggaan Daerah	Tinggi	3,00			0,45	

			Brand Lokal	Tinggi	3,00			0,45
Stakeholder	Penerimaan Stakeholder	0,10	Kesiapan Dan Kesiediaan Masyarakat	Tinggi	3,00			0,30
			Kesiapan Dan Kesiediaan Pemerintah	Tinggi	3,00			0,30
			Kesiapan Dan Kesiediaan Pelaku Usaha	Tinggi	3,00			0,30
			Total					

*Keterangan: Nilai bobot didapat dari asumsi yang terjadi di Kabupaten Nunukan
T = Tinggi (3); S = Sedang (2); R = Rendah (1) merupakan nilai asumsi komoditas unggulan*

Tabel IV-51 Kriteria Penentuan Industri Aneka/Pangan Olahan Ikan/Pengawetan

Faktor	Kriteria	Bobot	Sub Kriteria	Parameter Ukur	Skala			Nilai Bobot
					Tinggi	Sedang	Rendah	
Keunggulan	Ketersediaan dan keberlangsungan Bahan Baku	0,20	Ketersediaan/Supply Bahan Baku	Ikan Teri Ambalang, Ikan Nomei, Udang Putih, Bandeng, Tenggiri, dll	3,00			0,60
			Koninuitas dan Kualitas Bahan Baku	4.233.765 Ton	3,00			0,60
	Pemasaran-Akses Pasar	0,15	Jangkauan Pasar Internasional-Nasional	Nasional	3,00			0,45
			Kondisi Persaingan	Kompetitif	3,00			0,45
			Dukungan Infrastruktur Pemasaran	Tersedia (Koperasi-Kelompok Usaha bersama)	3,00			0,45
	Dukungan Sumber Daya Manusia	0,10	Ketersediaan Tenaga Kerja	2.342 TK	3,00			0,30
			Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Dan Latihan	Tersedia	3,00			0,30
			Kemampuan Dan Keterampilan Tenaga Kerja	Terlatih		2,00		0,20
	Dukungan Kebijakan Dan Kelembagaan Pemerintah	0,05	Posisi Produk Dalam Kebijakan Daerah	Produk Andalan	3,00			0,15
			Dukungan Lembaga Pemerintah	Terdapat program pengembangan berbasis perikanan	3,00			0,15
Manfaat	Nilai Tambah Ekonomis Dan Peningkatan Pendapatan Daerah	0,10	Penciptaan Nilai Tambah/Diversifikasi Produk	Tinggi (agar-agar, kerupuk, abon, dll)	3,00			0,30
			Ketersediaan Teknologi	Tersedia (mesin giling sederhana, dll)	3,00			0,30
			Dorongan Inovasi	Tinggi (penggilingan, pengemasan, dll)	3,00			0,30
			Ketersediaan Sumber Energi	Tercukupi		2,00		0,20

Faktor	Kriteria	Bobot	Sub Kriteria	Parameter Ukur	Skala			Nilai Bobot
					Tinggi	Sedang	Rendah	
	Nilai Tambah Sosial Dan Peningkatan Kesejahteraan	0,15	Penyerapan Tenaga Kerja	71 Tk : 34 Unit = 2 TK			1,00	0,15
			Peningkatan Kesejahteraan	Tinggi	3,00			0,45
			Peranan Kelestarian Lingkungan	Tinggi	3,00			0,45
	Prestise	0,15	Kekhasan/Keunikan	Tinggi	3,00			0,45
			Kemampuan Mengangkat Kebanggaan Daerah	Tinggi	3,00			0,45
			Brand Lokal	Tinggi	3,00			0,45
Stakeholder	Penerimaan Stakeholder	0,10	Kesiapan Dan Kesiediaan Masyarakat	Tinggi	3,00			0,30
			Kesiapan Dan Kesiediaan Pemerintah	Tinggi	3,00			0,30
			Kesiapan Dan Kesiediaan Pelaku Usaha	Tinggi	3,00			0,30
Total								8,05

Keterangan: Nilai bobot didapat dari asumsi yang terjadi di Kabupaten Nunukan

T = Tinggi (3); S = Sedang (2); R = Rendah (1) merupakan nilai asumsi komoditas unggulan

Tabel IV-52 Kriteria Penentuan Industri Olahan Kopi

Faktor	Kriteria	Bobot	Sub Kriteria	Parameter Ukur	Skala			Nilai Bobot
					Tinggi	Sedang	Rendah	
Keunggulan	Ketersediaan dan keberlangsungan Bahan Baku	0,20	Ketersediaan/Supply Bahan Baku	116 Ha (Dataran Tinggi Krayan)		2,00		0,40
			Koninuitas dan Kualitas Bahan Baku	26,22 Ton		2,00		0,40
	Pemasaran-Akses Pasar	0,15	Jangkauan Pasar Internasional-Nasional	Lokal (sebagian besar dijual orang per orang, ada juga yang melalui korporat)			1,00	0,15
			Kondisi Persaingan	Tinggi (Jenis Kopi Arabika, jenis ini paling populer adalah Kopi Gayo)			1,00	0,15
			Dukungan Infrastruktur Pemasaran	Terkendala akses jalan, transport, dll, sehingga cenderung pemasaran bersifat individual)			1,00	0,15
	Dukungan Sumber Daya	0,10	Ketersediaan Tenaga Kerja	87 TK		2,00		0,20

Faktor	Kriteria	Bobot	Sub Kriteria	Parameter Ukur	Skala			Nilai Bobot	
					Tinggi	Sedang	Rendah		
	Manusia	0,05	Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Dan Latihan	Belum Tersedia			1,00	0,10	
			Kemampuan Dan Keterampilan Tenaga Kerja	Belum terlatih			1,00	0,10	
	Dukungan Kebijakan Dan Kelembagaan Pemerintah		Posisi Produk Dalam Kebijakan Daerah	Produk Unggulan	3,00				0,15
			Dukungan Lembaga Pemerintah	Program perkebunan kopi krayan	3,00				0,15
Manfaat	Nilai Tambah Ekonomis Dan Peningkatan Pendapatan Daerah	0,10	Penciptaan Nilai Tambah/Diversifikasi Produk	Rendah			1,00	0,10	
			Ketersediaan Teknologi	Rendah (penggilingan kopi masih konvensional)			1,00	0,10	
			Dorongan Inovasi	Telah dilakukan pembudidayaan kopi			1,00		0,10
			Ketersediaan Sumber Energi	Tercukupi		2,00			0,20
	Nilai Tambah Sosial Dan Peningkatan Kesejahteraan	0,15	Penyerapan Tenaga Kerja	850 TK	3,00			-	
			Peningkatan Kesejahteraan	Tinggi	3,00			0,45	
			Peranan Kelestarian Lingkungan	Tinggi	3,00			0,45	
	Prestise	0,15	Kekhasan/Keunikan	Tinggi	3,00			0,45	

Faktor	Kriteria	Bobot	Sub Kriteria	Parameter Ukur	Skala			Nilai Bobot
					Tinggi	Sedang	Rendah	
			Kemampuan Mengangkat Kebanggaan Daerah	Tinggi	3,00			0,45
			Brand Lokal	Tinggi	3,00			0,45
Stakeholder	Penerimaan Stakeholder	0,10	Kesiapan Dan Kesiediaan Masyarakat	Tinggi	3,00			0,30
			Kesiapan Dan Kesiediaan Pemerintah	Tinggi	3,00			0,30
			Kesiapan Dan Kesiediaan Pelaku Usaha	Tinggi	3,00			0,30
Total								5,60

*Keterangan: Nilai bobot didapat dari asumsi yang terjadi di Kabupaten Nunukan
T = Tinggi (3); S = Sedang (2); R = Rendah (1) merupakan nilai asumsi komoditas unggulan*

Tabel IV-53 Kriteria Penentuan Industri Olahan Kakao

Faktor	Kriteria	Bobot	Sub Kriteria	Parameter Ukur	Skala			Nilai Bobot
					Tinggi	Sedang	Rendah	
Keunggulan	Ketersediaan dan keberlangsungan Bahan Baku	0,20	Ketersediaan/Supply Bahan Baku	1.348 Ha	3,00			0,60
			Koninuitas dan Kualitas Bahan Baku	1.060,27 Ton	3,00			0,60
	Pemasaran-Akses Pasar	0,15	Jangkauan Pasar Internasional-Nasional	Malaysia - Singapura	3,00			0,45
			Kondisi Persaingan	Sekitar 62 % Pengolahan Kakao Kaltara berasal dari Nunukan	3,00			0,45
			Dukungan Infrastruktur Pemasaran	Pemasaran melalui Pelabuhan Sei Jepun; Pelabuhan Sebatik	3,00			0,45
	Dukungan Sumber Daya Manusia	0,10	Ketersediaan Tenaga Kerja	562 TK	3,00			0,30
			Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Dan Latihan	Tersedia	3,00			0,30
			Kemampuan Dan Keterampilan Tenaga Kerja	Terlatih	3,00			0,30
	Dukungan Kebijakan Dan Kelembagaan Pemerintah	0,05	Posisi Produk Dalam Kebijakan Daerah	Produk Andalan	3,00			0,15
			Dukungan Lembaga Pemerintah	Tersedia (Fasilitasi pembangunan pabrik	3,00			0,15

Faktor	Kriteria	Bobot	Sub Kriteria	Parameter Ukur	Skala			Nilai Bobot
					Tinggi	Sedang	Rendah	
				pengolahan kakao di Sebatik)				
Manfaat	Nilai Tambah Ekonomis Dan Peningkatan Pendapatan Daerah	0,10	Penciptaan Nilai Tambah/Diversifikasi Produk	Tinggi (bahan makanan, bahan kimia, bahan obat-obatan, dll)	3,00			0,30
			Ketersediaan Teknologi	Rencana Pembangunan Pabrik Kakao di Kec. Sebatik Tengah	3,00			0,30
			Dorongan Inovasi	Telah dilakukan pelatihan teknik pengembangan budi daya, pengembangan kakao dalam even Gerakan Nasional (Gernas) Kakao di Kaltim	3,00			0,30
			Ketersediaan Sumber Energi	Tercukupi		2,00		0,20
	Nilai Tambah Sosial Dan Peningkatan Kesejahteraan	0,15	Penyerapan Tenaga Kerja	21 TK			1,00	0,15
			Peningkatan Kesejahteraan	Stagnan (diperlukan pendampingan penyuluh untuk meningkatkan motivasi petani)		2,00		0,30
			Peranan Kelestarian Lingkungan	Tinggi	3,00			0,45

Faktor	Kriteria	Bobot	Sub Kriteria	Parameter Ukur	Skala			Nilai Bobot
					Tinggi	Sedang	Rendah	
	Prestise	0,15	Kekhasan/Keunikan	Tinggi	3,00			0,45
			Kemampuan Mengangkat Kebanggaan Daerah	Tinggi	3,00			0,45
			Brand Lokal	Tinggi	3,00			0,45
Stakeholder	Penerimaan Stakeholder	0,10	Kesiapan Dan Kesiediaan Masyarakat	Tinggi	3,00			0,30
			Kesiapan Dan Kesiediaan Pemerintah	Tinggi	3,00			0,30
			Kesiapan Dan Kesiediaan Pelaku Usaha	Tinggi	3,00			0,30
Total								8,00

Ketrangan: Nilai bobot didapat dari asumsi yang terjadi di Kabupaten Nunukan
T = Tinggi (3); S = Sedang (2); R = Rendah (1) merupakan nilai asumsi komoditas unggulan

Tabel IV-54 Kriteria Penentuan Industri Penggilingan Beras dan Tepung Beras dan Olahan Beras Organik Lainnya

Faktor	Kriteria	Bobot	Sub Kriteria	Parameter Ukur	Skala			Nilai Bobot
					Tinggi	Sedang	Rendah	
Keunggulan	Ketersediaan dan keberlangsungan Bahan Baku	0,20	Ketersediaan/Supply Bahan Baku	3.448 Ha	3,00			0,60
			Koninuitas dan Kualitas Bahan Baku	15.202,23 Ton		3,00		
	Pemasaran-Akses Pasar	0,15	Jangkauan Pasar Internasional-Nasional	Malaysia - Brunei	3,00			0,45
			Kondisi Persaingan	Kompetitif		2,00		0,30
			Dukungan Infrastruktur Pemasaran	Tinggi (Pemasaran melalui Koperasi Serba Usaha Tana Tam Krayan Hulu (KSU – TTKH))	3,00			0,45
	Dukungan Sumber Daya Manusia	0,10	Ketersediaan Tenaga Kerja	129 TK		2,00		0,20
			Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Dan Latihan	Tersedia	3,00			0,30
			Kemampuan Dan Keterampilan Tenaga Kerja	Terlatih	3,00			0,30
	Dukungan Kebijakan Dan Kelembagaan Pemerintah	0,05	Posisi Produk Dalam Kebijakan Daerah	Produk Unggulan	3,00			0,15
			Dukungan Lembaga Pemerintah	Sertifikasi Indikasi Geografis Padi Adan Krayan, Kementerian Hukum dan HAM	3,00			0,15
Manfaat	Nilai Tambah Ekonomis Dan Peningkatan Pendapatan Daerah	0,10	Penciptaan Nilai Tambah/Diversifikasi Produk	Tinggi (bahan makanan)	3,00			0,30
			Ketersediaan Teknologi	Tersedia (mesin penggilingan padi)	3,00			0,30
			Dorongan Inovasi	Tinggi	3,00			0,30

Faktor	Kriteria	Bobot	Sub Kriteria	Parameter Ukur	Skala			Nilai Bobot
					Tinggi	Sedang	Rendah	
				(Pengelolaan budidaya padi Adan dipadukan peternakan kerbau, pemeliharaan ikan dipersawah, Konsep Minapadi, pola tanam jawor)				
			Ketersediaan Sumber Energi	Tercukupi		2,00		0,20
	Nilai Tambah Sosial Dan Peningkatan Kesejahteraan	0,15	Penyerapan Tenaga Kerja	4 TK			1,00	0,15
			Peningkatan Kesejahteraan	Rendah (masih memerlukan perhatian dan bimbingan kepada petani mengingat masih rendahnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki petani serta masih kurangnya bantuan fasilitas pertanian)			1,00	0,15
			Peranan Kelestarian Lingkungan	Tinggi	3,00			0,45
	Prestise		Kekhasan/Keunikan	Tinggi	3,00			0,45
			Kemampuan Mengangkat Kebanggaan	Tinggi	3,00			0,45

Faktor	Kriteria	Bobot	Sub Kriteria	Parameter Ukur	Skala			Nilai Bobot
					Tinggi	Sedang	Rendah	
		0,15	Daerah					
			Brand Lokal	Tinggi	3,00			0,45
Stakeholder	Penerimaan Stakeholder	0,10	Kesiapan Dan Kediaan Masyarakat	Tinggi	3,00			0,30
			Kesiapan Dan Kediaan Pemerintah	Tinggi	3,00			0,30
			Kesiapan Dan Kediaan Pelaku Usaha	Tinggi	3,00			0,30
Total								7,60

Keterangan: Nilai bobot didapat dari asumsi yang terjadi di Kabupaten Nunukan

T = Tinggi (3); S = Sedang (2); R = Rendah (1) merupakan nilai asumsi komoditas unggulan

Tabel IV-55 Kriteria Penentuan Industri Pengolahan Ubi

Faktor	Kriteria	Bobot	Sub Kriteria	Parameter Ukur	Skala			Nilai Bobot
					Tinggi	Sedang	Rendah	
Keunggulan	Ketersediaan dan keberlangsungan Bahan Baku	0,20	Ketersediaan/Supply Bahan Baku	767 Ha	3,00			0,60
			Koninuitas dan Kualitas Bahan Baku	21.824,01 Ton		3,00		
	Pemasaran-Akses Pasar	0,15	Jangkauan Pasar Internasional-Nasional	Lokal			1,00	0,15
			Kondisi Persaingan	Kompetitif		2,00		0,30
			Dukungan Infrastruktur Pemasaran	Tersedia (melalui akses digital)			1,00	0,15
	Dukungan Sumber Daya Manusia	0,10	Ketersediaan Tenaga Kerja	129 TK			1,00	0,10
			Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Dan Latihan	Tersedia (Borneo Environment Community)	3,00			0,30
			Kemampuan Dan Keterampilan Tenaga Kerja	Terlatih	3,00			0,30
	Dukungan Kebijakan Dan Kelembagaan Pemerintah	0,05	Posisi Produk Dalam Kebijakan Daerah	Produk Unggulan	3,00			0,15
			Dukungan Lembaga Pemerintah	Tersedia	3,00			0,15
Manfaat	Nilai Tambah Ekonomis Dan Peningkatan Pendapatan Daerah	0,10	Penciptaan Nilai Tambah/Diversifikasi Produk	Tinggi	3,00			0,30
			Ketersediaan Teknologi	Tersedia (Pabrik Tepung Mocaf binaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan)	3,00			0,30

Faktor	Kriteria	Bobot	Sub Kriteria	Parameter Ukur	Skala			Nilai Bobot	
					Tinggi	Sedang	Rendah		
			Dorongan Inovasi	Tinggi (Budidaya Singkong Gajah)	3,00			0,30	
			Ketersediaan Sumber Energi	Tercukupi		2,00		0,20	
	Nilai Tambah Sosial Dan Peningkatan Kesejahteraan	0,15	Penyerapan Tenaga Kerja	4 TK			1,00	0,15	
			Peningkatan Kesejahteraan	Relatif tinggi		2,00		0,30	
			Peranan Kelestarian Lingkungan	Tinggi	3,00			0,45	
	Prestise	0,15	Kekhasan/Keunikan	Tinggi	3,00			0,45	
			Kemampuan Mengangkat Kebanggaan Daerah	Tinggi	3,00			0,45	
			Brand Lokal	Tinggi	3,00			0,45	
	Stakeholder	Penerimaan Stakeholder	0,10	Kesiapan Dan Kesiediaan Masyarakat	Tinggi	3,00			0,30
				Kesiapan Dan Kesiediaan Pemerintah	Tinggi	3,00			0,30
Kesiapan Dan Kesiediaan Pelaku Usaha				Tinggi	3,00			0,30	
Total								7,05	

Keterangan: Nilai bobot didapat dari asumsi yang terjadi di Kabupaten Nunukan

T = Tinggi (3); S = Sedang (2); R = Rendah (1) merupakan nilai asumsi komoditas unggulan

Tabel Error! No text of specified style in document.-56 Kriteria Penentuan Industri Pengolahan Jagung

Faktor	Kriteria	Bobot	Sub Kriteria	Parameter Ukur	Skala			Nilai Bobot	
					Tinggi	Sedang	Rendah		
Keunggulan	Ketersediaan dan keberlangsungan Bahan Baku	0,2 0	Ketersediaan/Supply Bahan Baku	59 Ha			1,00	0,20	
			Koninuitas dan Kualitas Bahan Baku	291,35 Ton			1,00	0,20	
	Pemasaran-Akses Pasar	0,1 5	Jangkauan Pasar Internasional-Nasional	Lokal				1,00	0,15
			Kondisi Persaingan	Kompetitif		2,00			0,30
			Dukungan Infrastruktur Pemasaran	rendah (akses jalan memerlukan pembangunan jalan usaha tani)				1,00	0,15
	Dukungan Sumber Daya Manusia	0,1 0	Ketersediaan Tenaga Kerja	129 TK				1,00	0,10
			Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Dan Latihan	Tersedia	3,00				0,30
			Kemampuan Dan Keterampilan Tenaga Kerja	Terlatih	3,00				0,30
	Dukungan Kebijakan Dan Kelembagaan Pemerintah	0,0 5	Posisi Produk Dalam Kebijakan Daerah	Produk Unggulan	3,00				0,15
			Dukungan Lembaga Pemerintah	Tersedia	3,00				0,15
Manfaat	Nilai Tambah Ekonomis Dan Peningkatan Pendapatan Daerah	0,1 0	Penciptaan Nilai Tambah/Diversifikasi Produk	Tinggi (Bahan Pakan Ternak)	3,00			0,30	
			Ketersediaan Teknologi	Tersedia (mesin perontok power thresher multiguna-DPKP Kabupaten Nunukan)	3,00			0,30	
			Dorongan Inovasi	Tinggi (budidaya jagung hibrida)	3,00				0,30
			Ketersediaan Sumber Energi	Tercukupi		2,00			0,20
	Nilai Tambah Sosial Dan Peningkatan Kesejahteraan	0,1 5	Penyerapan Tenaga Kerja	4 TK				1,00	0,15
			Peningkatan Kesejahteraan	relatif tinggi		2,00			0,30
			Peranan Kelestarian Lingkungan	Tinggi	3,00				0,45
	Prestise	0,1 5	Kekhasan/Keunikan	Tinggi	3,00				0,45
			Kemampuan Mengangkat Kebanggaan Daerah	Tinggi	3,00				0,45
			Brand Lokal	Tinggi	3,00				0,45
Stakeholder	Penerimaan Stakeholder	0,1 0	Kesiapan Dan Kesediaan Masyarakat	Tinggi	3,00			0,30	
			Kesiapan Dan Kesediaan Pemerintah	Tinggi	3,00			0,30	
			Kesiapan Dan Kesediaan Pelaku Usaha	Tinggi	3,00				0,30
Total								6,25	

Keterangan: Nilai bobot didapat dari asumsi yang terjadi di Kabupaten Nunukan

T = Tinggi (3); S = Sedang (2); R = Rendah (1) merupakan nilai asumsi komoditas unggulan

Tabel IV-57 Kriteria Penentuan Industri Pengolahan Sawit-Minyak Goreng dan Olahan Lainnya

Faktor	Kriteria	Bobot	Sub Kriteria	Parameter Ukur	Skala			Nilai Bobot
					Tinggi	Sedang	Rendah	
Keunggulan	Ketersediaan dan keberlangsungan Bahan Baku	0,20	Ketersediaan/Supply Bahan Baku	132.135,51 Ha	3,00			0,60
			Koninuitas dan Kualitas Bahan Baku	1.810.282,94 Ton	3,00			0,60
	Pemasaran-Akses Pasar	0,15	Jangkauan Pasar Internasional-Nasional	Malaysia, China, Vietnam	3,00			0,45
			Kondisi Persaingan	Kompetitif (Fluktuasi harga pasar)	3,00			0,45
			Dukungan Infrastruktur Pemasaran	Tinggi (Pelabuhan Sei Jepun; Pelabuhan Sebatik)	3,00			0,45
	Dukungan Sumber Daya Manusia	0,10	Ketersediaan Tenaga Kerja	12.867 TK	3,00			0,30
			Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Dan Latihan	Tersedia	3,00			0,30
			Kemampuan Dan Keterampilan Tenaga Kerja	Terlatih	3,00			0,30
	Dukungan Kebijakan Dan Kelembagaan Pemerintah	0,05	Posisi Produk Dalam Kebijakan Daerah	Produk Unggulan	3,00			0,15
			Dukungan Lembaga Pemerintah	Tersedia	3,00			0,15
	Manfaat	Nilai Tambah Ekonomis Dan Peningkatan Pendapatan Daerah	0,10	Penciptaan Nilai Tambah/Diversifikasi Produk	Tinggi	3,00		
Ketersediaan Teknologi				Tersedia	3,00			0,30
Dorongan Inovasi				Tinggi	3,00			0,30
Ketersediaan Sumber Energi				Tercukupi		2,00		0,20
Nilai Tambah Sosial Dan Peningkatan Kesejahteraan		0,15	Penyerapan Tenaga Kerja	613 TK	3,00			0,45
			Peningkatan Kesejahteraan	relatif tinggi		2,00		0,30
			Peranan Kelestarian Lingkungan	Rendah			1,00	0,15
Prestise		0,15	Kekhasan/Keunikan	Tinggi	3,00			0,45
	Kemampuan Mengangkat Kebanggaan Daerah		Tinggi	3,00			0,45	

Stakeholder	Penerimaan Stakeholder	0,10	Brand Lokal	Tinggi	3,00		0,45
			Kesiapan Dan Kesiediaan Masyarakat	Tinggi	3,00		0,30
			Kesiapan Dan Kesiediaan Pemerintah	Tinggi	3,00		0,30
			Kesiapan Dan Kesiediaan Pelaku Usaha	Tinggi	3,00		0,30
Total							8,00

Keterangan: Nilai bobot didapat dari asumsi yang terjadi di Kabupaten Nunukan

T = Tinggi (3); S = Sedang (2); R = Rendah (1) merupakan nilai asumsi komoditas unggulan

Tabel IV-58 Kriteria Penentuan Industri Anyaman Rotan-Bambu

Faktor	Kriteria	Bobot	Sub Kriteria	Parameter Ukur	Skala			Nilai Bobot
					Tinggi	Sedang	Rendah	
Keunggulan	Ketersediaan dan keberlangsungan Bahan Baku	0,20	Ketersediaan/Supply Bahan Baku	Tersedia	3,00			0,60
			Koninuitas dan Kualitas Bahan Baku	Rp.133.895.000/ Bln	3,00			0,60
	Pemasaran-Akses Pasar	0,15	Jangkauan Pasar Internasional-Nasional	Nasional	3,00			0,45
			Kondisi Persaingan	Tinggi	3,00			0,45
			Dukungan Infrastruktur Pemasaran	Tinggi (Sering mengikuti even nasional)	3,00			0,45
	Dukungan Sumber Daya Manusia	0,10	Ketersediaan Tenaga Kerja	336 TK	3,00			0,30
			Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Dan Latihan	Tersedia	3,00			0,30
			Kemampuan Dan Keterampilan Tenaga Kerja	Terlatih	3,00			0,30
	Dukungan Kebijakan Dan Kelembagaan Pemerintah	0,05	Posisi Produk Dalam Kebijakan Daerah	Produk Andalan	3,00			0,15
			Dukungan Lembaga Pemerintah	Tersedia - Program Kampung Sejahtera di Krayan	3,00			0,15
Manfaat	Nilai Tambah Ekonomis Dan Peningkatan Pendapatan Daerah	0,10	Penciptaan Nilai Tambah/Diversifikasi Produk	rendah			1,00	0,10
			Ketersediaan Teknologi	Belum Tersedia			1,00	0,10
			Dorongan Inovasi	Belum Tersedia			1,00	0,10

	Nilai Tambah Sosial Dan Peningkatan Kesejahteraan	0,15	Ketersediaan Sumber Energi	Tercukupi		2,00		0,20	
			Penyerapan Tenaga Kerja	3 TK			1,00	0,15	
			Peningkatan Kesejahteraan	relatif tinggi		2,00		0,30	
			Peranan Kelestarian Lingkungan	Rendah			1,00	0,15	
	Prestise	0,15	Kekhasan/Keunikan	Tinggi	3,00			0,45	
			Kemampuan Mengangkat Kebanggaan Daerah	Tinggi	3,00			0,45	
			Brand Lokal	Tinggi	3,00			0,45	
	Stakeholder	Penerimaan Stakeholder	0,10	Kesiapan Dan Kesiediaan Masyarakat	Tinggi	3,00			0,30
				Kesiapan Dan Kesiediaan Pemerintah	Tinggi	3,00			0,30
Kesiapan Dan Kesiediaan Pelaku Usaha				Tinggi	3,00			0,30	
Total								7,10	

Ketrangan: Nilai bobot didapat dari asumsi yang terjadi di Kabupaten Nunukan, T = Tinggi (3); S = Sedang (2); R = Rendah (1) merupakan nilai asumsi komoditas unggulan

Tabel **Error! No text of specified style in document.**-59 Kriteria Penentuan Industri Pakan Ternak

Faktor	Kriteria	Bobot	Sub Kriteria	Parameter Ukur	Skala			Nilai Bobot
					Tinggi	Sedang	Rendah	
Keunggulan	Ketersediaan dan keberlangsungan Bahan Baku	0,20	Ketersediaan/Supply Bahan Baku	Tersedia (Bungkil Kelapa Sawit, Jagung)	3,00			0,60
			Koninuitas dan Kualitas Bahan Baku	2.000 - 3.000 ton	3,00			0,60
	Pemasaran-Akses Pasar	0,15	Jangkauan Pasar Internasional-Nasional	China-Vietnam-Surabaya	3,00			0,45
			Kondisi Persaingan	Tinggi	3,00			0,45
			Dukungan Infrastruktur Pemasaran	Tinggi (Pelabuhan Sei Jepun; Pelabuhan Sebatik)	3,00			0,45
	Dukungan Sumber Daya Manusia	0,10	Ketersediaan Tenaga Kerja	Tersedia (asumsi sama dengan TK sawit)	3,00			0,30
			Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Dan Latihan	Tersedia (asumsi sama dengan Komoditas sawit)	3,00			0,30
			Kemampuan Dan Keterampilan Tenaga Kerja	Tersedia (asumsi sama dengan Komoditas sawit)	3,00			0,30
	Dukungan Kebijakan Dan Kelembagaan	0,05	Posisi Produk Dalam Kebijakan Daerah	termasuk dalam Produk Andalan (Sawit, Jagung)	3,00			0,15
			Dukungan Lembaga Pemerintah	Tersedia (asumsi sama dengan	3,00			0,15

Manfaat	Pemerintah	0,10		Komoditas sawit)				
	Nilai Tambah Ekonomis Dan Peningkatan Pendapatan Daerah		Penciptaan Nilai Tambah/Diversifikasi Produk	Tinggi (bahan utama pakan ternak)			1,00	0,10
			Ketersediaan Teknologi	Belum Tersedia			1,00	0,10
			Dorongan Inovasi	Belum Tersedia			1,00	0,10
	Nilai Tambah Sosial Dan Peningkatan Kesejahteraan	Ketersediaan Sumber Energi		Tercukupi		2,00		0,20
		Penyerapan Tenaga Kerja		3 TK			1,00	0,15
		Peningkatan Kesejahteraan		relatif tinggi		2,00		0,30
	Prestise	Peranan Kelestarian Lingkungan		Tinggi	3,00			0,45
		Kekhasan/Keunikan		Tinggi	3,00			0,45
		Kemampuan Mengangkat Kebanggaan Daerah		Tinggi	3,00			0,45
Stakeholder	Penerimaan Stakeholder	0,10	Brand Lokal	Tinggi	3,00		0,45	
			Kesiapan Dan Kesiediaan Masyarakat	Tinggi	3,00		0,30	
			Kesiapan Dan Kesiediaan Pemerintah	Tinggi	3,00		0,30	
			Kesiapan Dan Kesiediaan Pelaku Usaha	Tinggi	3,00		0,30	
Total								7,40

Keterangan: Nilai bobot didapat dari asumsi yang terjadi di Kabupaten Nunukan T = Tinggi (3); S = Sedang (2); R = Rendah (1) merupakan nilai asumsi komoditas unggulan

Tabel IV-60 Total Skor Kriteria Perentuan Industri Unggulan

No.	Jenis Industri Unggulan	Nilai	
1	Industri Olahan Rumput Laut	8,35	Kuadran I
2	Industri Olahan Ikan, Pangan dan Pengawetan	8,05	
3	Industri Olahan Kakao	8,00	
4	Industri Pengolahan Sawit	8,00	
5	Industri Penggilingan Beras dan Tepung Beras dan Olahan Beras Organik Lainnya	7,60	
6	Industri Pakan	7,40	Kuadran II
7	Industri Kerajinan Rotan-Bambu	7,10	
8	Industri Olahan Ubi	7,05	
9	Industri Olahan Jagung	6,25	Kuadran III
10	Industri Olahan Kopi	5,60	Kuadran IV

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel IV-61 Nilai Kuadran

Kuadran I	> 7,40
Kuadran II	6,70 - 7,39
Kuadran III	6,30 - 6,99
Kuadran IV	5,50 - 6,29

Dari tabel kriteria penentuan industri unggulan tersebut, selanjutnya dilakukan pengkelasan sesuai dengan besaran nilai yang telah dibobot, dan menggunakan pendekatan Teori Klassen sehingga hasilnya sebagaimana disajikan berikut.



Gambar IV-24 Posisi Kuadran Jenis Industri Unggulan

1. Rantai Nilai Industri Unggulan

a. Industri Olahan Rumput Laut

Kegiatan usaha budidaya rumput laut mampu memberdayakan masyarakat dari berbagai kalangan, gender, usia dan suku bangsa. Budidaya rumput laut sendiri merupakan suatu proses yang panjang dan melibatkan banyak unit seperti pembuatan tali bentangan, pemasangan benih, pemanenan, penjemuran, penyimpanan hingga distribusi kepada konsumen. Para pembudidaya rumput laut didominasi oleh suku Bugis dan suku Tidung (warga asli) yang menetap di sekitar pesisir Nunukan atau Pulau Sebatik. Mereka umumnya pria berusia 30-45 tahun dan sudah berkeluarga dengan

jumlah tanggungan mulai dari 3 hingga 8 orang. Modal untuk usaha biasanya berasal dari biaya sendiri atau pinjaman bank

dan koperasi. Di Kelurahan Tanjung Harapan, dana pinjaman dari bank relatif mudah dengan bunga sekitar 11 %. Di tempat-tempat lain juga terdapat koperasi yang dikelola oleh suatu kelompok pembudidaya dengan bunga sekitar 10–15 %. Pembudidaya rumput laut biasanya soliter dalam mengawasi tali-talinya.

Beberapa pembudidaya bahkan memiliki perahu pribadi berukuran minimal 5 GT dengan daya angkut hingga 5 ton rumput laut. Keberadaan kelompok biasanya lebih ditujukan untuk kepentingan menjemur dan menyimpan hasil panen.

Pendukung kegiatan budidaya diantaranya adalah para pembuat tali bentangan, pemasang bibit, pemanen, dan pemilik penyewaan fasilitas penjemuran. Mereka biasanya dipekerjakan oleh pembudidaya atau pengumpul dengan upah yang bergantung dari jenis dan lama pekerjaannya. Para pembuat tali bentangan dan pemanen biasanya laki-laki berusia 20-40 tahun. Terkadang kegiatan ini dilakukan sendiri oleh pembudidaya. Sedangkan pemasang bibit biasanya kelompok ibu-ibu rumah tangga yang berasal dari beberapa desa sekitar lokasi penjemuran. Tempat penjemuran rumput laut relatif beragam karena di beberapa lokasi tersedia secara cuma-cuma (seperti di Kelurahan Tanjung Harapan), namun sebaliknya ada pula yang disewakan (seperti di Kecamatan Sebatik Barat).

Para pengumpul atau tengkulak biasanya merupakan utusan perusahaan ekspor atau ketua kelompok yang memiliki gudang penyimpanan. Kedua Pengumpul ini dibedakan oleh kapasitas pembeliannya. Sebagai contoh, di Sebatik Barat terdapat pengumpul yang diutus oleh sebuah perusahaan ekspor. Setiap hari pengumpul ini mampu membeli sekitar 100 ton dari para pembudidaya.

Sedangkan, pengumpul yang sekaligus ketua kelompok pembudidaya rumput laut hanya memiliki kapasitas pembelian rumput laut yang relatif lebih kecil, yaitu sekitar 1 ton perhari. Aktivitas yang terjadi di gudang pengumpul ini, selain transaksi jual beli rumput laut dengan pembudidaya, juga dilakukan pembersihan dan penyortiran atau pemilihan rumput laut. Pengumpul ini menjadikan gudang di rumahnya sebagai tempat mengumpulkan hasil panen dari pembudidaya yang lain. Pengumpul kecil ini biasanya juga memasok ke pengumpul besar (dari perusahaan).

Sementara itu keberadaan aktivitas budidaya rumput laut juga dapat menjadi tambahan pendapatan bagi nelayan penangkap, yang melakukan aktivitas penangkapan thalus rumput laut yang terlepas dari unit budidaya, baik thalus yang terlepas saat proses tanam, panen, rontok selama masa budidaya, maupun yang lepas karena unit longline terkena gelombang. Penangkapan thalus rumput laut ini dilakukan menggunakan jaring pukat, dan hasil tangkapan rumput laut tersebut tergolong besar karena besarnya aktivitas budidaya rumput laut di wilayah ini. Aktivitas penangkapan thalus lepas ini juga bermanfaat secara ekologis karena dapat mencegah terjadinya penumpukan thalus yang terlepas ke perairan, mengingat besarnya volume hasil tangkapan tersebut.

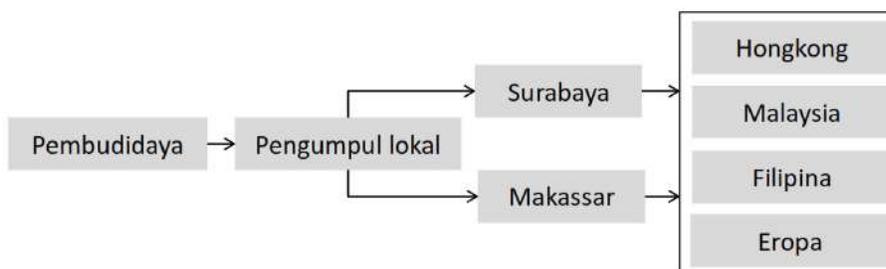
Masyarakat Nunukan dan Sebatik sudah memiliki sistem budidaya rumput laut yang terintegrasi. Kegiatan budidaya yang terdiri dari pembuatan tali bentangan, pemasangan benih dan penjemuran umumnya berpusat di satu lokasi dekat pantai. Lokasi tersebut tersebar di Kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik, dan

Sebatik Barat. Lahan untuk setiap unit kegiatan biasanya dimiliki oleh perseorangan. Beberapa sarana umum juga tersedia dan disewakan, seperti unit bongkar muat dan perbaikan jaring.

Keberadaan gudang penyimpanan menjadi sangat penting karena saat ini kapasitas produksi semakin meningkat, namun transaksi jual beli menurun akibat menurunnya harga jual rumput laut. Gudang-gudang penyimpanan rumput laut memiliki kapasitas yang beragam. Gudang rumput laut skala kecil berkapasitas 10 – 50 ton biasanya dimiliki oleh suatu kelompok pembudidaya, sedangkan gudang skala besar yang dapat menampung lebih dari 500 ton rumput laut biasanya dimiliki oleh para pengumpul dari perusahaan ekspor. Sebagai kawasan percontohan, Kelurahan Tanjung Harapan telah diberi fasilitas gudang penyimpanan rumput laut oleh pemerintah setempat. Gudang tersebut mampu menyimpan lebih dari 500 ton rumput laut. Namun saat ini kondisi gudang tersebut kurang terawat atau dikelola dengan baik.

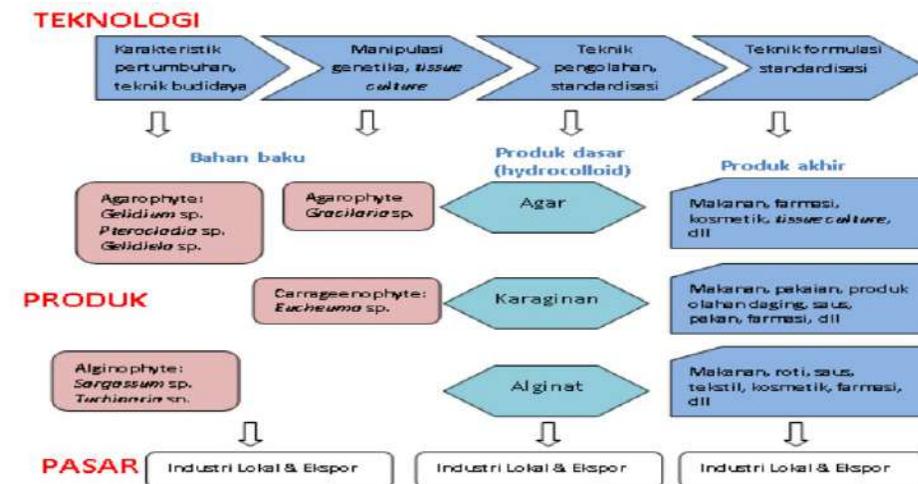
Pelabuhan adalah pintu gerbang keluar masuknya kapal, baik yang mengangkut penumpang maupun barang ke suatu wilayah. Di Kabupaten Nunukan terdapat banyak jenis pelabuhan yang menjadi sentra perhubungan laut, di antaranya pelabuhan umum, penyeberangan ferry, speed boat, pelabuhan pendaratan ikan (PPI), terminal khusus, dan pelabuhan angkatan laut. Terdapat satu pelabuhan di Nunukan dan dua pelabuhan utama di Pulau Sebatik yang sering digunakan sebagai jalur keluarnya kapal pengangkut hasil budidaya rumput laut. Beberapa pengumpul dari Nunukan mengirim barang ke luar kota (Surabaya atau Makassar) melalui Pelabuhan Sei Jepun. Pengumpul dari Sebatik memiliki dua opsi, yaitu mengirim ke luar kota melalui Sei Jepun atau dari Sebatik langsung ke kota yang dituju. Saat ini beberapa pengumpul Sebatik banyak yang memilih opsi kedua karena harga pengiriman dari Sebatik ke Sei Jepun mencapai 80% biaya dari Sebatik ke kota tujuan.

Secara umum perdagangan rumput laut di Kabupaten Nunukan, setelah dipanen oleh pembudidaya, rumput laut dikeringkan sampai kadar air kurang lebih 35 – 38%. Dengan kadar air tersebut perbandingan antara rumput laut kering dengan rumput laut basah kurang lebih adalah 1 : 8-10. Rumput laut kering dari pembudidaya akan dibeli oleh pengepul, yang selanjutnya akan menjual ke pedagang / eksportir atau ke perusahaan pengolahan. Saat ini geliat rumput laut di pasar Eropa sedang menurun, sehingga lebih banyak diekspor ke Hongkong. Sebagai wilayah perbatasan, dahulu sering terjadi transaksi ilegal antara pengumpul di Sebatik dengan warga Malaysia. Namun berkat sistem pengawasan yang makin ketat aktivitas tersebut dapat dihentikan.



Gambar IV-25 Rantai Pasok Rumput Laut di Kabupaten Nunukan

Pengembangan rumput laut dengan pendekatan konsep industri yang dimulai dari hulu (budidaya), pengolahan produk dasar menjadi produk formulasi dengan produk turunan yang sangat banyak baik produk pangan maupun non pangan. Dalam pengembangan rumput laut hal yang penting dengan penerapan teknologi yang tepat untuk menghasilkan produk yang berorientasi pada pasar dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan industri dalam negeri serta ekspor.



Gambar IV-26 Klasifikasi Pengembangan Produk Rumput Laut dan Produk Turunannya

Pengembangan industri pengolahan rumput laut tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan baku saja, namun juga sangat tergantung pada banyak hal, seperti :

- Aspek pemasaran, untuk memastikan pasar produk yang dihasilkan, memiliki pasar yang jelas dan dapat diakses;
- Aspek teknis dan teknologis, untuk memastikan bahwa proses pengolahan rumput laut yang akan dilakukan tersedia teknologinya, terjangkau, dan SDM daerah mampu melakukannya;
- Aspek kelembagaan dan SDM untuk memastikan bahwa tersedia berbagai instansi kelembagaan yang mendukung industri pengolahan rumput laut, seperti lembaga keuangan, dan koperasi untuk melindungi berbagai kepentingan petani rumput laut dan pelaku industrinya. Harus dapat dipastikan bahwa masyarakat memiliki keterlibatan yang cukup atas keberadaan industri yang ada;
- Aspek Sosial Budaya, untuk memastikan bahwa keberadaan industri pengolahan rumput laut ini harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat daerah, kearifan lokal, dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat;
- Aspek lingkungan, untuk memastikan bahwa proses produksi yang ada tidak akan membuat lingkungan menjadi rusak, namun justru sebaliknya;
- Aspek finansial, untuk memastikan bahwa secara ekonomi, pembangunan industri ini layak, dalam arti dengan investasi yang ada, memiliki tingkat pengembalian yang relatif cepat, menguntungkan, dan memiliki nilai tambah yang baik.

Dari aspek pasar menunjukkan bahwa perkembangan pasar terhadap komoditi rumput laut di perdagangan global menunjukkan trend kenaikan yang cukup tinggi, seiring dengan peningkatan kebutuhan

bahan baku industri baik untuk food grade, pharmaceutical maupun industrial grade.

Pertumbuhan penduduk dunia yang semakin pesat dan kompleksitas nilai guna rumput laut yang begitu besar sebagai penunjang kebutuhan hidup masyarakat dunia, maka tidak heran jika saat ini rumput laut menjadi komoditi yang prospektif dan telah menjadi bagian dari kebutuhan global.

Bentuk-bentuk perdagangan rumput laut dunia adalah Rumput laut kering; *Alkali Treated Seaweed (Original Shape) (ATS)*; *Alkali Treated Cottonii/Spinosum Chips (ATCC & ATSC)*; *Semi Refined "Kappa" Carrageenan (Eucheuma cottonii; human food industry & pet food industry)*; *Semi Refined "Iota" Carrageenan (Eucheuma spinosum)*; *Refined "Kappa" Carrageenan (Eucheuma cottonii)*; dan *Refined "Iota" Carrageenan (Eucheuma spinosum)*.

Peningkatan produksi rumput laut nasional diiringi pula oleh peningkatan volume dan nilai ekspor rumput laut Indonesia ke berbagai negara tujuan utama ekspor seperti China, Filipina, Vietnam, Hongkong dan Korea Selatan. Sedangkan perkembangan ekspor saat ini sudah mulai ke luar negeri yaitu Korea, sedangkan skala lokal masuk ke dalam pasaran Parepare, Makassar, Surabaya, dan Jakarta.

Nilai produksi rumput laut di Kabupaten Nunukan pada tahun 2021 volume penjualan rumput laut rata-rata mencapai 3.000 ton/bulan. Jumlah ini mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun 2019 dan 2020 yang rata-rata 2.100 ton/bulan. Sedangkan harga jual rumput laut kering dalam beberapa bulan terakhir ada kenaikan harga rumput laut kering. Jika awal tahun 2021 hanya berkisar Rp 11.000/kg, lalu pada Maret, April dan Mei sampai Hari Raya Idul Fitri terus bergerak naik dan kini mencapai Rp 14.000/kg.

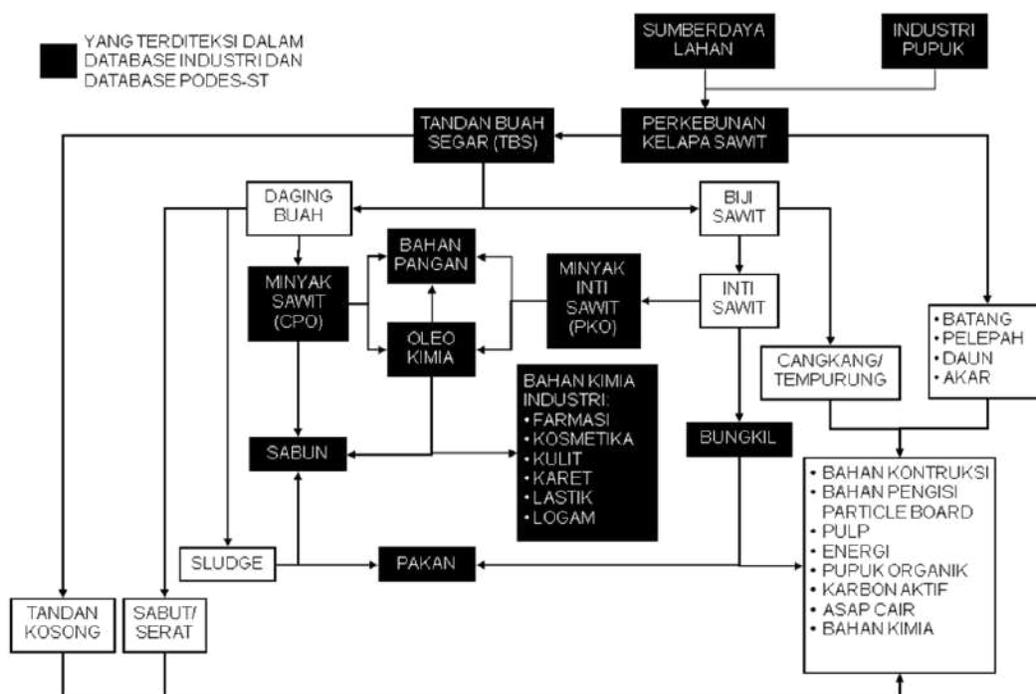
b. Industri Pengolahan Sawit

Kelapa sawit merupakan salah satu primadona yang menjadi sumber penghasil devisa selain minyak dangas bumi. Komoditas minyak sawit memiliki prospek yang cerah dalam perdagangan minyak nabati dunia sehingga mendorong pemerintah untuk memacu pengembangan areal perkebunan kelapa sawit. Pertumbuhan subsektor industri perkebunan kelapasawit menghasilkan manfaat ekonomi yang sangat penting, walaupun pengembangan areal perkebunan kelapa sawit menimbulkan isu lingkungan. Isu lingkungan selama ini dianggap sebagai salah satu faktor penghambat dalam pengembangan kelapa sawit Indonesia.

Praktik tidak ramah lingkungan, seperti teknik pembukaan lahan dengan pembakaran hutandan pembuangan limbah yang tidak terkendali telah menimbulkan citra buruk bagi industri kelapa sawit Indonesia (Butler, 2008). Menurut Chavalparit et al. (2006) limbah yang dihasilkan dari kegiatan produksi minyak sawit meliputi limbah cair, limbah padat, dan limbah udara.

Rantai nilai kelapa sawit adalah segala aktivitas yang melibatkan petani kecil independen, petani plasma, asosiasi petani kecil, koperasi petani kelapa sawit, pabrik perusahaan, pabrik penghancur kernel kelapa sawit, hingga pabrik pengolah hasil kelapa sawit. Pengolahan kelapa sawit menghasilkan banyak produk yang dapat dimanfaatkan. Buah kelapa sawit dalam pengolahannya menghasilkan dua jenis minyak yaitu minyak yang berasal dari daging buah (mesocarp) berwarna merah dikenal sebagai minyak kelapa sawit kasar atau Crude Palm Oil (CPO) dan minyak yang berasal dari inti kelapa sawit atau Palm Kernel Oil (PKO). Selain minyak, buah kelapa sawit juga menghasilkan

padatan berupa sabut, cangkang (tempurung), dan tandan buah kosong kelapa sawit. Bahan padatan ini dapat dimanfaatkan untuk sumber energi, pupuk (kompos), makanan ternak, dan bahan untuk industri.



Gambar IV-27 Kerangka logik hulu-hilir rantai agroindustri kelapa sawit

Produk kelapa sawit dapat dikelompokkan menjadi jenis bahan makanan (oleofood), bahan non makanan (oleochemical), serta bahan kosmetika dan farmasi. Minyak kelapa sawit dan inti kelapa sawit yang digunakan sebagai bahan pangan diperoleh melalui proses fraksinasi, rafinasi, dan hidrogenisasi.

Umumnya CPO sebagian besar difraksinasi sehingga menghasilkan fraksi olein (cair) dan fraksi sterain (padat). Fraksi olein digunakan untuk bahan pangan, sedangkan fraksi sterain untuk keperluan non pangan. Bahan pangan dengan bahan baku olein antara lain minyak goreng, mentega (margarine), lemak untuk masak (shortening) bahan pengisi (adatif), industri makanan ringan, dan sebagainya.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi dari pertanian yang menghasilkan banyak manfaat karena minyak yang dihasilkan menghasilkan produk turunan yang potensial dikembangkan dalam bidang perindustrian. Kelapa sawit merupakan komoditi strategis di Kabupaten Nunukan bahkan secara nasional karena pengembangannya akan berpengaruh langsung terhadap perekonomian daerah bankan negara negara dan penyerapan sumberdaya manusia.

Dengan banyaknya industri pengolahan produksi turunan maka penyerapan akan tenaga kerja semakin meningkat sehingga perekonomian masyarakat meningkat dan mengatasi masalah ekonomi di Indonesia yang terus berkepanjangan. Manfaat lain dari pengembangan kelapa sawit bagi kepentingan nasional antara lain manfaatnya yang dapat mengatasi masalah semakin minimnya minyak bumi sebagai bahan baku pembuatan bahan bakar kendaraan maupun mesin industri. Pengembangan komoditi kelapa sawit, jika dikuatkan keterkaitan dengan sektor industri yang ada di Kabupaten Nunukan, akan menguatkan perekonomian daerah secara merata.

c. Industri Penggilingan Beras dan Tepung Beras dan Olahan Beras

Wilayah Krayan merupakan penghasil beras terbesar di Kabupaten Nunukan, yaitu beras adan yang merupakan padi unggul organik, yang banyak dipasarkan ke Malaysia dan Brunei. Daerah ini juga memiliki

komoditi unik yaitu garam gunung hasil dari pengolahan sumur air bergaram. Sebagian wilayah kecamatan ini berupa Taman Nasional Kayan Mentarang(TNKM) yang kaya dengan keanekaragaman hayati.

Padi Adan begitu biasa disebut adalah merupakan beras yang diproduksi oleh petani di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara yang merupakan salah satu kawasan terluar yang berbatasan langsung dengan Serawak Malaysia.

Saat ini, beras sudah tidak lagi menjadi produk yang berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan pangan manusia. Sudah berkembang beras organik yang memiliki nilai tambah, yaitu lebih menyehatkan manusia dan lingkungan dibandingkan beras konvensional selain sebagai pangan. Beras organik merupakan beras yang dihasilkan dari budidaya dengan prinsip pertanian organik atau tanpa pengaplikasian bahan kimia berdasarkan standar tertentu dan telah mendapatkan sertifikasi dari lembaga mandiri (*International Rice Research Institute* 2004). Beras organik pada dasarnya serupa dengan beras konvensional. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada proses budidaya, pengolahan hingga pemasaran ke konsumen akhir. Proses yang dilakukan terhadap beras organik menggunakan prinsip organik yang harus dijaga dari ketika masih benih hingga dikonsumsi konsumen akhir.

Beras organik merupakan hasil proses pascapanen dari tanaman padi yang dibudidayakan secara organik, yaitu setelah tangkai dan kulit malainya dilepaskan dan digiling. Dalam proses penggilingan gabah organik dikenal beberapa istilah, diantaranya gabah yang merupakan biji padi organik setelah dilepaskan dari tangkai malainya, kariopsis atau beras pecah kulit organik (*organic brown rice*) dan sekam yang merupakan hasil proses penggilingan dengan mesin atau alat pemecah kulit. Dalam penyosohan beras pecah kulit organik akan diperoleh beras giling organik dan dedak yang berasal dari lapisan perikarp, aleuron, dan sebagian endosperm bagian luar. Lapisan aleuron adalah lapisan dalam dari lapisan nucellus yang membungkus baik endosperm maupun lembaga. Lapisan ini tersusun dari satu sampai tujuh lapis yang pada sisi dorsal lebih tebal dari sisi ventral. Lapisan aleuron ini berbeda-beda ketebalannya berdasarkan varietas, dimana beras organik yang berbentuk bulat pendek cenderung mempunyai lapisan aleuron yang lebih tebal dibanding beras jenis lonjong panjang (Juliano 1972, diacu dalam Kusumaningrum 2009).

Padi merupakan tanaman pangan paling utama dan salah satu komoditas strategis baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Budidaya padi dengan sistem organik akan digiling dan menghasilkan beras organik. Usaha beras organik memiliki prospek yang menjanjikan ke depannya karena perubahan tren Masyarakat Indonesia yang kembali ke alam (*back to nature*) serta semakin peduli lingkungan dan kesehatan individu.

Minat masyarakat untuk terlibat dalam usaha beras organik secara bertahap meningkat walaupun produksi belum seproduktif sistem konvensional. Harga jual beras organik lebih tinggi karena image “sehat” tertanam dalam produk ini sehingga pendapatan yang diperoleh pelaku usaha lebih besar dibandingkan beras dengan sistem konvensional. Harga mahal produk ini juga tercipta karena besarnya usaha yang harus dilakukan petani dalam membudidayakan padi organik. Produk beras organik sangat eksklusif karena pengawasan produk selalu dilakukan agar tidak menyalahi prinsip organik sehingga produk tetap dapat dikatakan sebagai produk beras organik. Keeksklusifan produk ini membuat rantai pasok yang mengalirkan

produk ini haruslah eksklusif untuk membedakan antara rantai pasok beras organik dan rantai pasok beras konvensional.

Rantai pasok beras organik yang eksklusif dapat dilihat dari struktur rantai pasok yang sederhana rantai pasok beras konvensional lebih panjang dan rumit dibandingkan beras organik. Namun, walaupun rantai pasok eksklusif dan berbentuk sederhana, belum tentu proses aliran di dalamnya berjalan lancar. Konsumen saat ini menjadi sangat kritis karena ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih. Konsumen menginginkan beras organik yang lebih berkualitas, murah, dan cepat (*better, cheaper, faster*). Keinginan tersebut dapat diatasi dengan diterapkannya manajemen yang baik di dalam rantai pasok beras.

d. Industri Pengolahan Kopi

Kopi masuk ke Indonesia dibawa oleh Belanda pada 1699 yang didatangkan langsung dari Malabar, India, ke pulau Jawa. Pada tahun 1706 Belanda mulai melakukan upaya meneliti tanaman kopi yang di Indonesia. Lalu, pada 1711 tanaman kopi hasil penelitian tersebut disebar ke seluruh Indonesia seperti, Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Nusa Tenggara, hingga Papua.

Varietas yang banyak ditanam di Indonesia yaitu kopi arabika. Tidak heran jika sangat beragam jenis-jenis kopi di Indonesia mulai dari, kopi Aceh Gayo, kopi Sumatra Mandheling, kopi Lintong, kopi Kalosi Toraja, kopi Lampung, kopi Kintamani Bali, kopi Jawa Prenger, hingga kopi Wamena Bajawa (Papua). Selain itu terdapat pula kopi luwak yang terkenal akan harganya yang cukup mahal.

Saat ini Kabupaten Nunukan menjadi salah satu daerah penghasil kopi berjenis Arabika dimana lahan yang dikembangkan sebagai produksi kopi berada di Kecamatan Krayan, Krayan Barat, Krayan Timur, Krayan Selatan dan krayan Tengah. Akan tetapi pemasaran kopi krayan masih sebatas dalam skala lokal, hal ini dikarenakan keterbatasan akses yang cukup sulit.

Lahan kopi Arabika masih tergolong sangat sedikit yaitu sekitar 6-10 Ha / Kecamatan yang ada di krayan. Hal ini dikarenakan biaya operasional dan pengelolaan kebun yang sangat tinggi, Dengan luas tanaman petani hanya 0,1-0,2 Ha atau sama dengan 100-250 pokok kopi yang dapat di tanam Per- orang (Petani). sedangkan lahan kopi yang telah di rencanakan perluasan sebanyak 200-350 ha, dari 5 (Lima) kecamatan krayan yang ada.



Petani kopi di 5 (lima) kecamatan kerayan yang ada pada saat ini hanya sekitar \pm 58 Orang dengan memiliki tanaman kopi kisaran mulai 100-250 pokok /orang (Petani) sedangkan

petani yang siap berkebun kopi arabika berkisar \pm 850 Orang (Petani) di 5(lima) kecamatan krayan.

Panen kopi adalah salah satu usaha petani untuk memungut hasil dari tanaman kopi, hasil yang di panen pada tanaman kopi adalah buah kopi merah siap panen. Panen kopi di kerayan saat ini masih dilakukan se-bulan 2-3 kali dengan hasil panen kopi yang cukup baik yaitu per-pokok tanaman kopi sekali panen bisa mencapai 1,8 -2,2 Kg

Glondongan merah Dengan umur tanaman 3- 4 Tahun. Panen kopi seluas 1 Ha, dengan jumlah tanaman 1.600 pokok sekali panen bisa mencapai 2,8 -3,5 Ton/ha sesuai umur produktif tanaman kopi 3-6 tahun dan masa puncak produktif 7-9 tahun, Tergantung pada terknis perawatan tanaman yang baik dan terkontrol sesuai kebutuhan proses perawatan tanaman kopi.

Pasca panen adalah suatu proses yang di lakukan petani krayan pada posisi setelah melewati proses panen buah kopi di lahan kebun. Sesuai pengamatan petani Kopi krayan dengan hasil panen buah kopi gelondongan merah 1,8-2,2 kg bisa menghasilkan *Green Bean* sebanyak 1,2-1,5 kg dari hasil per-pokok tanaman kopi, ini setelah melewati proses penjemuran biji kopi dan pengupasan kulit tanduk dan kulit ari. Sedangkan pada saat biji kopi melewati proses Rosting biji kopi akan menyusut sekitar 20% atau sama dengan 1-1,3 kg dari 1 (Satu) pokok Tanaman Kopi mulai dari Tahapan Panen-Pascapanen-Produksi.



Kopi Krayan telah di tetapkan oleh Bapak Presiden Ir. JOKO WIDODO pada tanggal 19 Desember 2019. Saat kunjungan kerja ke Kalimantan Utara tepat ya di kecamatan krayan kabupaten

nunukan bersama rombongan Gubernur provinsi Kalimantan utara dan Rombongan Bupati kabupaten nunukan disertai kepala Dinas pertanian dan ketahanan pangan provinsi Kalimantan utara yang ikut serta mendukung program perkebunan kopi krayan yang jadi salah satu potensi unggulan sektor perkebunan dan yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat petani krayan.

Kopi Arabika yang di tanam di dataran tinggi krayan Kabupaten Nunukan mempunyai ke unggulan tersendiri di karenakan proses pemeliharaan kopi krayan tanpa bahan kimia yang di kenal dengan (Organik) dan mampu menjadi penghasil kopi dengan kualitas Ekspor Kaltara. Maka dari itu di diharapkan Mampu menjadi daerah penghasil kopi Indonesia, dan dapat menjadi kawasan perkebunan kopi di dataran tinggi Borneo Kalimantan Utara dengan mempertahankan proses budidaya Non Kimia (Organik), dengan tetap menjaga kelestarian alam dataran tinggi Borneo Kalimantan Utara.

Sesuai dengan hasil analisis bahwa Program Pengembangan Industri Unggulan yang dapat meningkatkan ketahanan ekonomi daerah sebagai berikut:

- ↳ Industri yang diproyeksikan maju dan tumbuh pesat, antara lain:
 - Industri Olahan Rumput Laut;
 - Industri Olahan Ikan, Pangan, dan Pengawetan ;
 - Industri Pengolahan Kakao;
 - Industri Pengolahan Sawit; dan
 - Industri Penggilingan Beras dan Tepung Beras dan Beras Organik Lainnya.
- ↳ Industri yang diproyeksikan potensial atau masih dapat dikembangkan, antara lain:

- Industri Pengolahan Rotan dan Bambu (Kerajinan Anyaman);
 - Industri Olahan Ubi; dan
 - Industri Pakan.
- ↳ Industri yang diproyeksikan maju akan tetapi masih mendapatkan tekanan, adalah industri olahan jagung.
- ↳ Industri yang diproyeksikan relative mengalami ketertinggalan, adalah industri olahan kopi.
2. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Unggulan Kabupaten Nunukan
- Sasaran dan program-program dari masing-masing industri unggulan di atas dijabarkan sebagai berikut:
- a. Industri Pengolahan Rumput Laut
- Potensi dan permasalahan atau gap dari target yang ingin dicapai untuk pengembangan industri berbasis komoditas rumput laut adalah sebagai berikut.

Tabel IV-62 Potensi dan Permasalahan Pengembangan Industri Olahan Rumput Laut

Potensi Pengembangan	
1.	Potensi sumber daya alam yang tinggi diperairan Nunukan dan Sebatik dengan daya dukung lingkungan perairan yang tinggi terhadap budidaya rumput laut yang tidak rentan terhadap perubahan iklim
2.	Tingkat kompetensi tenaga kerja budidaya yang terampil
3.	Dukungan kebijakan Pemerintah
4.	Pemasaran yang luas
5.	Mampu meningkatkan kesejahteraan
6.	Berperan dalam menjaga ekologi
Gap dari target yang dicapai (Permasalahan)	
1.	Dukungan infrastruktur energi belum mencukupi
2.	Pengelolaan rumput laut masih tradisional
3.	Kurangnya diverifikasi dan inovasi produk olahan rumput laut dimana perdagangan hanya pada produk hulu.
4.	Kurangnya kontinuitas penyuluhan dalam alih teknologi
5.	Fluktuasi harga

Berdasarkan potensi dan permasalahan diatas, maka sasaran dan program industri berbasis komoditas rumput laut adalah sebagai berikut.

Tabel IV-63 Sasaran dan Strategi Pembangunan Industri Pengolahan Rumput Laut 2022 - 2042

No	Sasaran	Tahun			
		2022 - 2026	2027 - 2032	2033 - 2038	2039 - 2042
1	Memantapkan zonasi pemanfaatan budidaya rumput laut yang berkelanjutan				
2	Peningkatan ketersediaan bahan baku dan penolong serta meningkatkan kapasitas produksi melalui pengembangan sektor hulu industri pengolahan rumput laut				
3	Menyiapkan SDM yang ahli dan siap pakai dalam industri pengolahan rumput laut				
4	Peningkatan peran perguruan tinggi dan lembaga penelitian dalam implementasi hasil penelitian dan pengembangan				
5	Peningkatan iklim investasi, pengendalian dan pengawasan harga.				
6	Pengembangan kawasan pengembangan budidaya dan olahan rumput laut terpadu dalam rangka percepatan sentra produksi dan sentra industri				
7	Terpenuhinya standarisasi produk rumput laut dan pengolahannya				

No	Sasaran	Tahun			
		2022 - 2026	2027 - 2032	2033 - 2038	2039 - 2042
8	Pembentukan dan penguatan kelembagaan interkasi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan				
9	Peningkatan promosi produk olahan rumput laut				
10	Peningkatan efesiensi produk dengan peningkatan sarana prasarana dan bantuan peralatan produksi				
11	Peningkatan standarisasi SDM dan jaminan mutu produk aneka olahan rumput laut				
12	Pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efesiensi dan distribusi produk olahan rumput laut				
13	Peningkatan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses produksi olahan rumput laut				
14	Terbangunnya industri pengolahan rumput laut yang modern dan ramah lingkungan				
15	Pengembangan klaster pengolahan rumput laut yang modern dalam rangka percepatan pertumbuhan industri				
Strategi					
<ol style="list-style-type: none"> Memelihara keunikan alamiah lingkungan dalam meningkatkan sumber daya Menjamin ketersediaan dan pasokan baku dalam pengolahan industri rumput laut Menyiapkan dan meningkatkan SDM siap pakai dalam teknik pengolahan rumput laut dan manajemen mutu Memperkuat prasarana penunjang dan sistem logistik Menarik minat para pengusaha dalam pengembangan klaster industri dan memperluas penetrasi pasar dan promosi produk olahan rumput laut Memperkuat keterkaitan pada semua rantai nilai pada siklus pengolahan Menerapkan industri pengolahan rumput laut yang modern berbasis inovasi teknologi dan ramah lingkungan 					

Tabel IV-64 Rencana Aksi Pembangunan Industri Pengolahan Rumput Laut 2022 - 2042

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2022 - 2026	2027 - 2032	2033 - 2038	2039 - 2042
1	Menyusun rencana zonasi budidaya pengembangan rumput laut	Dinas Perikanan				
2	Intensifikasi dan ekstensifikasi budidaya rumput laut menuju implementasi teknologi budidaya yang intensif	Dinas Perikanan				
3	Fasilitasi inovasi baru dalam pembibitan, pembudidayaan rumput laut dalam penerapan teknologi	Dinas Perikanan				
4	Membangun sekolah kejuruan(vokasi) dan penerapan jurusan dalam Pendidikan akademi dalam pengelolaan dan pengolahan hasil laut dan perikanan	Disprindakop dan Dinas Pendidikan				
5	Training/diklat intensifikasi budidaya rumput laut	Dinas Perikanan dan UKM				
6	Pendampingan usaha baik teknis maupun manajerial industri pengolahan rumput laut	Disprindakop dan UKM				
7	Kerjasama riset, pengembangan industri dan teknologi pengolahan rumput laut	Disprindakop, UKM dan Lembaga pendidikan				
8	Memberikan insentif pajak, kemudahan perizinan bagi pengusaha dalam pengembangan	Disprindakop, Dinas PMPTSP				

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2022 - 2026	2027 - 2032	2033 - 2038	2039 - 2042
	produk rumput laut dari hulu sampai hilir					
9	Pembangunan kawasan marine technopark di Mansapa dengan penyediaan fasilitas yang terintegrasi (hulu, infrastuktur pendukung, industri pengolahan, Pendidikan dan pemasaran)	Disprindakop, Dinas Perikanan, Dinas PUPR				
10	Penerapan Standar mutu (SNI atau standar lainnya yang relevan) baik terhadap produk, system produksi dan SDM	Disprindakop dan UKM				
11	Peningkatan prasarana (khususnya untuk energi dan kebutuhan air) dan logistik dalam rangka meningkatkan efesiensi dan kualitas olahan rumput laut	PLN, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Disprindakop				
12	Perluasan dan fasilitasi digitalisasi pemasaran	Diskominfo, Disprindakop dan UKM				
13	Fasilitasi Promosi produk olahan rumput laut	Diskominfo, Disprindakop dan UKM				
14	Peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dalam pengembangan produk, teknologi, market dan penjaminan mutu antara instansi pemerintah, Lembaga swasta, perguruan tinggi, dunia usaha dan Lembaga riset	Disprindakop, UKM dan Lembaga Pendidikan, Lembaga litbang, pelaku industri				
15	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan dilembaga finansial	Disprindakop, Lembaga Keuangan				
16	Program pembangunan infrastruktur pengelolaan lingkungan	Disprindakop, Dinas PUPR				
17	Meningkatkan nilai tambah limbah industri dan penerapan system produksi bersih (reduce, reuse, recycle) berbasis inovasi dan teknologi ramah lingkungan	Disprindakop				

b. Industri Pengolahan Perikanan

Potensi dan permasalahan atau gap dari target yang ingin dicapai untuk pengembangan industri berbasis komoditas perikanan adalah sebagai berikut.

Tabel IV-65 Potensi dan Permasalahan Pengembangan Industri Pengolahan Perikanan

Potensi Pengembangan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan baku perikanan melimpah 2. Tingkat kompetensi tenaga kerja yang terampil 3. Dukungan pemerintah yang intens 4. Penerapan inovasi yang tepat guna 5. Mampu meningkatkan kesejahteraan
Gap dari target yang dicapai (Permasalahan)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak seimbangna potensi dengan kapasitas pelabuhan yang ada 2. Harga jual ikan murah 3. Ukuran kapal nelayan masih kecil sehingga kapasitas produksi dan jenis ikan produksi yang rendah 4. Rendahnya penyerapan tenaga kerja 5. Industri pengolahan hanya pada pengawetan dan belum ada inovasi industri hilir

Berdasarkan potensi dan permasalahan diatas, maka sasaran dan program industri berbasis komoditas perikanan adalah sebagai berikut.

Tabel IV-66 Sasaran dan Strategi Pembangunan Industri Pengolahan Perikanan 2022 - 2042

No	Sasaran	Tahun			
		2022 - 2026	2027 - 2032	2033 - 2038	2039 - 2042
1	Mengembangkan skala pelabuhan perikanan yang lebih besar				
2	Peningkatan sarana dan prasarana alat tangkap perikanan, pengawetan dan sentra pemasaran perikanan dalam meningkatkan kapasitas produksi melalui pengembangan sektor hulu industri pengolahan ikan				
3	Menyiapkan SDM yang ahli dan siap pakai dalam industri pengolahan ikan				
4	Peningkatan peran perguruan tinggi dan lembaga penelitian dalam implementasi hasil penelitian dan pengembangan				
5	Terbentuknya klaster nelayan perikanan tangkap dan industri pengolahan ikan dalam rangka percepatan sentra produksi dan sentra industri pengolahan ikan				
6	Terpenuhinya standarisasi produk pengolahan ikan				
7	Pembentukan dan penguatan kelembagaan interkasi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan				
8	Peningkatan promosi produk olahan ikan				
9	Peningkatan efisiensi produk dengan peningkatan sarana prasarana dan bantuan peralatan produksi				
10	Pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi dan distribusi produk olahan ikan				
11	Peningkatan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses produksi olahan ikan				
12	Pengembangan klaster pengolahan ikan yang modern dalam rangka percepatan pertumbuhan industri				
Strategi					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan fungsi dan skala pelayanan pelabuhan dan pengembangan sarana dan prasarana penangkapan, pengawetan dan pemasaran ikan. 2. Memperkuat kelembagaan pada sentra-sentra produksi serta fasilitasi pada sentra perikanan 3. Menjamin ketersediaan dan pasokan produk ikan dari nelayan untuk industri 4. Menyiapkan SDM produksi perikanan dan industri perikanan 5. Menerapkan industri pengolahan ikan berbasis inovasi teknologi dan ramah lingkungan 					

Tabel IV-67 Rencana Aksi Pembangunan Industri Pengolahan Perikanan 2022 - 2042

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2022 - 2026	2027 - 2032	2033 - 2038	2039 - 2042
1	Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Mansapa	Dinas Perikanan				
2	Memfasilitasi dan membentuk kelompok usaha nelayan dalam memperoleh ukuran kapal > 60 GT	Dinas Perikanan				
3	Fasilitasi bantuan alat tangkap ikan dan cold storage untuk kelompok nelayan	Dinas Perikanan				
4	Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan	Dinas Perikanan, Dinas PUPR				
5	Fasilitas Training/diklat kepada kelompok nelayan dalam penerapan teknologi	Dinas Perikanan				
6	Membangun sekolah kejuruan(vokasi) dan	Dinas Perikanan, Disprindakop dan				

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2022 - 2026	2027 - 2032	2033 - 2038	2039 - 2042
	penerapan jurusan dalam Pendidikan akademi dalam pengelolaan dan pengolahan hasil laut dan perikanan	Dinas Pendidikan				
7	Pendampingan usaha baik teknis maupun manajerial industri pengolahan ikan	Disprindakop dan UKM				
8	Sosialisasi intensif penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pengolahan ikan					
9	Kerjasama riset, pengembangan industri dan teknologi pengawetan dan pengolahan ikan	Disprindakop, UKM dan Lembaga pendidikan				
10	Memberikan insentif pajak, kemudahan perizinan bagi pengusaha dalam pengembangan produk perikanan tangkap dari hulu sampai hilir	Disprindakop, Dinas PMPTSP				
11	Pembangunan kawasan marine technopark di Mansapa untuk pengembangan perikanan tangkap terpadu dengan penyediaan fasilitas yang terintegrasi yaitu : <ul style="list-style-type: none"> • Pusat Penelitian, pengembangan teknologi produk dan Pelatihan • Pusat Informasi produksi dan paska produksi • Lab dan Balai sertifikasi • Pusat Transaksi perikanan dan hasil pengolahan • Usaha Industri Perikanan tangkap • Sarana dan Prasarana perikanan • Pusat Pemasaran 	Disprindakop, Dinas Perikanan, Dinas PUPR				
12	Penerapan Standar mutu (SNI atau standar lainnya yang relevan) baik terhadap produk, system produksi dan SDM	Disprindakop dan UKM				
13	Perluasan dan fasilitasi digitalisasi pemasaran	Diskominfo, Disprindakop dan UKM				
14	Fasilitasi Promosi produk olahan ikan	Diskominfo, Disprindakop dan UKM				
15	Peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dalam pengembangan produk, teknologi, market dan penjaminan mutu antara instansi pemerintah, Lembaga swasta, perguruan tinggi, dunia usaha dan Lembaga riset	Disprindakop, UKM dan Lembaga Pendidikan, Lembaga litbang, pelaku industri				
16	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan dilembaga finansial	Disprindakop, Lembaga Keuangan				
17	Program pembangunan infrastruktur pengelolaan	Disprindakop, Dinas PUPR				

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2022 - 2026	2027 - 2032	2033 - 2038	2039 - 2042
	lingkungan					
18	Meningkatkan nilai tambah limbah industri pengolahan ikan dan penerapan system produksi bersih (reduce, reuse, recycle) berbasis inovasi dan teknologi ramah lingkungan	Disprindakop				

c. Industri Pengolahan Kopi

Potensi dan permasalahan atau gap dari target yang ingin dicapai untuk pengembangan industri berbasis komoditas kopi adalah sebagai berikut.

Tabel IV-68 Potensi dan Permasalahan Pengembangan Industri Pengolahan Kopi

Potensi Pengembangan	
1. Kesesuaian lahan tanaman kopi menjadi kekhasan; 2. Minat budidaya kopi cukup signifikan; 3. Dukungan Pemerintah 4. Penerapan inovasi yang tepat guna 5. Mampu meningkatkan kesejahteraan; 6. Mampu mengangkat kebanggaan daerah; 7. Memiliki kekhasan;	
Gap dari target yang dicapai (Permasalahan)	
1. Nilai produktifitas relative rendah; 2. Rendahnya aksesibilitas jaringan jalan; 3. Keterhambatan pola pemasaran; 4. Belum tersedia balai pelatihan pengolahan kopi; 5. Persaingan yang tinggi; 6. Rendahnya keterampilan pengolahan kopi; 7. Penerapan Teknologi konvensional;	

Berdasarkan potensi dan permasalahan diatas, maka sasaran dan program industri berbasis komoditas kopi adalah sebagai berikut.

Tabel IV-69 Sasaran dan Strategi Pembangunan Industri Pengolahan Kopi 2022 - 2042

No	Sasaran	Tahun			
		2022 - 2026	2027 - 2032	2033 - 2038	2039 - 2042
1	Pemantapan klaster sentra kopi organik di Wilayah Krayan dalam menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas)				
2	Memperkuat infrastruktur dan aksesibilitas produksi, distribusi dan pemasaran olahan kopi				
3	Terwujudnya sentra/klaster industri pengolahan kopi				
4	Peningkatan SDM ahli di bidang budidaya kopi organik dan pengolahan kopi				
5	Peningkatan penerapan sertifikasi dan standarisasi				
6	Meningkatkan wirausaha pengolahan kopi				
7	Peningkatan efisiensi produk dengan peningkatan sarana prasarana dan bantuan peralatan produksi				
8	Peningkatan kemitraan antara pelaku usaha budidaya, industri, Lembaga Pendidikan dan riset dan instansi pemerintah				
9	Peningkatan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses produksi olahan kopi				
10	Diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah				
11	Peningkatan pangsa pasar makanan dalam				

No	Sasaran	Tahun			
		2022 - 2026	2027 - 2032	2033 - 2038	2039 - 2042
	negeri dan ekspor produk olahan kopi				
12	Peningkatan mutu produk makanan hasil pengolahan kopi dalam kemasan				
Strategi					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan produktifitas dalam menjamin ketersediaan dan pasokan produk kopi organik pada klaster pengembangan kopi di Krayan 2. Pengembangan aksesibilitas dalam mendukung usaha budidaya dan industri kopi 3. Mengembangkan klaster industri pengolahan kopi 4. Mengembangkan balai pelatihan pengembangan budidaya dan olahan kopi 5. Menyiapkan dan meningkatkan jumlah SDM siap pakai dan kompeten dalam budidaya dan industri pengolahan kopi dalam meningkatkan wirausaha kopi 6. Pengembangan teknologi untuk pengolahan kopi sehingga produk sesuai dengan standarisasi 7. Membentuk dan Memperkuat kelembagaan pemasaran dan memperluas penetrasi pasar dalam negeri dan luar negeri 					

Tabel IV-70 Rencana Aksi Pembangunan Industri Pengolahan Kopi 2022 - 2042

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2022 - 2026	2027 - 2032	2033 - 2038	2039 - 2042
1	Menyusun konsep pengembangan pengembangan kawasan terpadu pengembangan produk kopi dari hulu sampai hilir di Wilayah Krayan	Bappeda				
2	Pengembangan kawasan budidaya kopi organik di Wilayah Krayan	Dinas Perkebunan				
3	Fasilitasi peningkatan produksi (intensifikasi) kopi organik secara berkelanjutan	Dinas Perkebunan				
4	Membangun aksesibilitas produksi dan distribusi pengembangan produk kopi organik di Wilayah Krayan	Dinas Perkebunan, Dina PUPR				
5	Penelitian dan pengembangan diversifikasi produk untuk menciptakan inovasi baru produk dalam menjaga kualitas dan kekhasan cita rasa kopi	Dinas Perkebunan, Disprindakop, Lembaga pendidikan				
6	Fasilitasi Skill Advocation melalui pelatihan implementasi penerapan teknologi pengolahan kopi dalam meningkatkan wirausaha kopi	Disprindakop dan Lembaga pendidikan				
7	Batuan unit mesin kopi grinder	Disprindakop				
8	Mengembangkan industri berbasis olahan kopi dengan Memberikan insentif pajak, kemudahan perizinan bagi pengusaha dalam pengembangan produk kopi dari hulu sampai hilir	Disprindakop, Dinas PMPTSP				
9	Sosialisasi intensif penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pengolahan kopi	Disprindakop				
10	Kerjasama riset, pengembangan industri dan teknologi pengolahan kopi	Disprindakop, UKM dan Lembaga pendidikan				
11	Penerapan Standar mutu produk pangan kemasan kopi (SNI atau standar lainnya yang relevan) baik terhadap produk, system	Disprindakop dan UKM				

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2022 - 2026	2027 - 2032	2033 - 2038	2039 - 2042
	produksi dan SDM					
12	Perluasan dan fasilitasi digitalisasi pemasaran kopi organik	Diskominfo, Disprindakop dan UKM				
13	Fasilitasi Promosi produk olahan kopi organik melalui misi dan promosi dagang	Diskominfo, Disprindakop dan UKM				
14	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga finansial	Disprindakop, Lembaga Keuangan				

d. Industri Pengolahan Coklat

Potensi dan permasalahan atau gap dari target yang ingin dicapai untuk pengembangan industri berbasis komoditas coklat adalah sebagai berikut.

Tabel IV-71 Potensi dan Permasalahan Pengembangan Industri Pengolahan Coklat

Potensi Pengembangan	
1.	Ketersediaan/Supply Bahan Baku
2.	Koninuitas dan Kualitas Bahan Baku
3.	Jangkauan Pasar Internasional-Nasional
4.	Dukungan Infrastruktur Pemasaran
5.	Ketersediaan Tenaga Kerja
6.	Kemampuan Dan Keterampilan Tenaga Kerja
7.	Ditetapkan sebagai produk andalan
Gap dari target yang dicapai (Permasalahan)	
1.	Rendahnya penyerapan tenaga kerja
2.	Rendahnya motifasi petani kakao karena masuknya komoditas sawit pada sentra produksi kakao
3.	Masih belum tersedia Fasilitas Pendidikan Dan Balai Latihan
4.	Rendahnya pengembangan teknologi dan inovasi dalam pengolahan coklat
5.	Industri pengolahan kakao belum terjadi

Berdasarkan potensi dan permasalahan diatas, maka sasaran dan program industri berbasis komoditas coklat adalah sebagai berikut.

Tabel IV-72 Sasaran dan Strategi Pembangunan Industri Pengolahan Coklat 2022 - 2042

No	Sasaran	Tahun			
		2022 - 2026	2027 - 2032	2033 - 2038	2039 - 2042
1	Pemantapan klaster sentra coklat di Wilayah Sebatik dalam menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas)				
2	Terwujudnya sentra/klaster industri pengolahan coklat				
4	Peningkatan SDM ahli di bidang budidaya coklat dan pengolahan coklat				
5	Peningkatan penerapan sertifikasi dan standarisasi				
6	Meningkatkan wirausaha pengolahan coklat				
7	Peningkatan efisiensi produk dengan peningkatan sarana prasarana dan bantuan peralatan produksi				
8	Peningkatan kemitraan antara pelaku usaha budidaya, industri, Lembaga Pendidikan dan riset dan instansi pemerintah				
9	Peningkatan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses produksi olahan coklat				
10	Diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah				

No	Sasaran	Tahun			
		2022 - 2026	2027 - 2032	2033 - 2038	2039 - 2042
11	Peningkatan pangsa pasar makanan dalam negeri dan ekspor produk olahan coklat				
12	Peningkatan mutu produk makanan hasil pengolahan coklat dalam kemasan				
Strategi					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan produktifitas dalam menjamin ketersediaan dan pasokan produk coklat pada klaster Wilayah Sebatik. 2. Menarik minat para pengusaha, pengolahan kakao dalam menciptakan iklim usaha yang kompetitif 3. Membentuk dan Memperkuat kelembagaan pemasaran 4. Menyiapkan dan meningkatkan jumlah SDM siap pakai dan kompeten dalam budidaya dan industri pengolahan coklat dalam meningkatkan wirausaha coklat 5. Mendorong pengembangan litbang industri pengolahan coklat dalam rangka meningkatkan diversifikasi produk 6. Pengembangan teknologi untuk pengolahan coklat sehingga produk sesuai dengan standarisasi dan food safety 7. Membentuk dan Memperkuat kelembagaan pemasaran dan memperluas penetrasi pasar dalam negeri dan luar negeri 					

Tabel IV-73 Rencana Aksi Pembangunan Industri Pengolahan Coklat 2022 - 2042

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2022 - 2026	2027 - 2032	2033 - 2038	2039 - 2042
1	Menyusun konsep pengembangan kawasan terpadu pengembangan produk Coklat dari hulu sampai hilir di Wilayah Sebatik	Bappeda				
2	Pengembangan kawasan budidaya Coklat di Wilayah Sebatik	Dinas Perkebunan				
4	Fasilitasi peningkatan produksi (intensifikasi) coklat secara berkelanjutan	Dinas Perkebunan				
5	Penelitian dan pengembangan diverifikasi produk untuk menciptakan inovasi baru produk coklat khususnya untuk pangan dan kosmetik	Dinas Perkebunan, Disprindakop, Lembaga pendidikan				
6	Fasilitasi Skill Advocation melalui pelatihan implementasi penerapan teknologi pengolahan coklat dalam meningkatkan wirausaha coklat	Disprindakop dan Lembaga pendidikan				
7	Mengembangkan industri berbasis olahan kopi dengan Memberikan insentif pajak, kemudahan perizinan bagi pengusaha dalam pengembangan produk kopi dari hulu sampai hilir	Disprindakop, Dinas PMPTSP				
8	Sosialisasi intensif penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pengolahan coklat	Disprindakop				
9	Kerjasama riset, pengembangan industri dan teknologi pengolahan kopi	Disprindakop, UKM dan Lembaga pendidikan				
10	Mengembangkan industri berbasis coklat pangan (bubuk coklat) dan non pangan (kosmetik)					

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2022 - 2026	2027 - 2032	2033 - 2038	2039 - 2042
11	Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan menjamin mutu produk, sertifikasi SNI dan halal	Disprindakop dan UKM				
12	Memperluas promosi produk coklat tingkat nasional dan internasional dan Perluasan digitalisasi utk pemasaran produk khususnya untuk IKM	Diskominfo, Disprindakop dan UKM				
13	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga finansial	Disprindakop, Lembaga Keuangan				

e. Industri Penggilingan Beras dan Tepung Beras dan Olahan Beras Organik Lainnya

Potensi dan permasalahan atau gap dari target yang ingin dicapai untuk pengembangan industri Penggilingan Beras dan Tepung Beras dan Olahan Beras Organik Lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel IV-74 Potensi dan Permasalahan Pengembangan Industri Penggilingan Beras dan Tepung Beras dan Olahan Beras Organik Lainnya

Potensi Pengembangan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan/Supply Bahan Baku 2. Koninuitas dan Kualitas Bahan Baku 3. Jangkauan Pasar Internasional-Nasional 4. Dukungan Infrastruktur Pemasaran 5. Ketersediaan Tenaga Kerja 6. Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Dan Latihan 7. Kemampuan Dan Keterampilan Tenaga Kerja 8. Produk Unggulan
Gap dari target yang dicapai (Permasalahan)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya penyerapan tenaga kerja 2. Rendahnya motifasi petani 3. Belum terintegrasinya sistem agribisnis yang menyatukan system on farm – hilir – pendukung 4. Inovasi industri hilir belum terjadi

Berdasarkan potensi dan permasalahan diatas, maka sasaran dan program industri Penggilingan Beras dan Tepung Beras dan Olahan Beras Organik Lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel IV-75 Sasaran dan Strategi Pembangunan Industri Penggilingan Beras dan Tepung Beras dan Olahan Beras Organik Lainnya 2022 - 2042

No	Sasaran	Tahun			
		2022 - 2026	2027 - 2032	2033 - 2038	2039 - 2042
1	Pemantapan klaster pengembangan pangan organik di Sentra Wilayah Krayan dalam menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas)				
2	Memperkuat infrastruktur dan aksesibilitas produksi, distribusi dan pemasaran produk				
3	Terwujudnya iklim usaha yang berdaya saing dalam menarik minat pembangunan industri tepung beras dan olahan beras organik lainnya				
4	Peningkatan SDM ahli di bidang budidaya padi Adan dan pengolahan tepung beras dan olahan beras organik lainnya				
5	Peningkatan penerapan sertifikasi dan standarisasi				
6	Peningkatan jumlah industri pengolahan,				

No	Sasaran	Tahun			
		2022 - 2026	2027 - 2032	2033 - 2038	2039 - 2042
	produktivitas dan kualitas secara kontinyu				
7	Peningkatan efisiensi produk dengan peningkatan sarana prasarana dan bantuan peralatan produksi				
8	Peningkatan kemitraan antara pelaku usaha budidaya, industri, Lembaga Pendidikan dan riset dan instansi pemerintah				
9	Pengembangan serta penguatan penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan diverifikasi, jaminan mutu dan keamanan produk				
10	Diverifikasi produk dan peningkatan nilai tambah				
11	Peningkatan pangsa pasar makanan dalam negeri dan ekspor				
12	Peningkatan mutu produk makanan beras organik hasil pengolahan dalam kemasan				
13	Terjadi peningkatan kemitraan antar pemasok bahan baku dengan industri dan pengelola wisata				
Strategi					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan produktifitas dalam menjamin ketersediaan dan pasokan produk beras organik pada klaster Wilayah Krayan 2. Menarik minat para pengusaha, pengolahan beras dalam menciptakan iklim usaha yang kompetitif 3. Meningkatkan produktivitas dan utilitas kapasitas industri yang ada 4. Membentuk dan memperkuat kelembagaan pemasaran 5. Menyiapkan dan meningkatkan jumlah SDM siap pakai dan kompeten dalam budidaya dan industri pengolahan pangan beras organik dalam meningkatkan wirausaha 6. Mendorong pengembangan litbang industri pengolahan beras organik dalam rangka meningkatkan diversifikasi produk 7. Pengembangan teknologi untuk pengolahan beras organik menjadi produk yang bervariasi dan kompetitif 					

Tabel IV-76 Rencana Aksi Pembangunan Industri Penggilingan Beras dan Tepung Beras dan Olahan Beras Organik Lainnya 2022 – 2042

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2022- 2026	2027- 2032	2033- 2038	2039- 2042
1	Menyusun konsep pengembangan pengembangan klaster kawasan terpadu pengembangan produk beras organik dari hulu sampai hilir di Wilayah Krayan	Bappeda				
2	Pengembangan kawasan budidaya padi Adan (roganik) di Wilayah Krayan	Dinas Pertanian				
4	Penyediaan investasi lahan dalam Kawasan food estate yang akan dikembangkan baik dalam budidaya dan lahan industri (land banking) dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang	Dinas Pertanian				
5	Fasilitasi peningkatan produksi (intensifikasi) padi Adan (roganik) secara berkelanjutan	Dinas Pertanian				
6	Membangun aksesibilitas produksi dan distribusi pengembangan produk beras organik di Wilayah Krayan	Dinas Pertanian, Dina PUPR				
7	Mewujudkan klaster pengembangan beras organik di Sentra Wilayah Krayan dalam pembangunan Technopark	Dinas Pertanian, Disprindakop				

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2022-2026	2027-2032	2033-2038	2039-2042
	Pertanian Organik baik produk hulu – hilir - pendukung					
8	Pengembangan Litbang dalam diversifikasi yang bersumber dari beras organic menjadi produk pangan lainnya (bubur bayi , dll) yang kompetitif	Disprindakop, Disprindakop, Lembaga pendidikan				
9	Memperkuat permodalan dan promosi investasi serta memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri olahan beras organik skala kecil dan menengah	Disprindakop dan Lembaga keuangan				
10	Fasilitasi Skill Advocation melalui pelatihan implementasi penerapan teknologi pengolahan beras organik dalam meningkatkan wirausaha	Disprindakop dan Lembaga pendidikan				
11	Bantuan sarana pengolahan beras organik	Disprindakop				
12	Mengembangkan industri berbasis beras organik dengan Memberikan insentif pajak, kemudahan perizinan bagi pengusaha dalam pengembangan produk beras organik dari hulu sampai hilir	Disprindakop, Dinas PMPTSP				
13	Sosialisasi intensif penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pengolahan beras organik	Disprindakop				
14	Kerjasama riset dalam meningkatkan efisiensi proses pengolahan dengan pengembangan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan daya saing harga	Disprindakop, UKM dan Lembaga pendidikan				
15	Penerapan Standar mutu produk pangan kopi organic dan halal (SNI atau standar lainnya yang relevan) baik terhadap produk, system produksi, kemasan dan SDM	Disprindakop				
16	Promosi dalam bentuk pengembangan etalase produk dan Perluasan digitalisasi utk pemasaran produk khususnya untuk IKM	Diskominfo, Disprindakop dan UKM				
17	Membangun pusat informasi dan workshop industri olahan beras organik di lokasi klaster pengeolahan beras organik					
18	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan dilembaga finansial	Disprindakop, Lembaga Keuangan				
19	Mengembangkan jejaring pemasaran IKM melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern dan dalam Kawasan wisata	Disprindakop, UKM				

f. Industri Pengolahan Ubi

Potensi dan permasalahan atau gap dari target yang ingin dicapai untuk pengembangan industri pengolahan ubi adalah sebagai berikut.

Tabel IV-77 Potensi dan Permasalahan Pengembangan Industri Pengolahan Ubi

Potensi Pengembangan	
1. Ketersediaan/Supply Bahan Baku 2. Koninuitas dan Kualitas Bahan Baku 3. Ketersediaan Tenaga Kerja 4. Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Dan Latihan 5. Kemampuan Dan Keterampilan Tenaga Kerja 6. Produk Unggulan 7. Ketersediaan teknologi dan inovasi	
Gap dari target yang dicapai (Permasalahan)	
1. Rendahnya penyerapan tenaga kerja 2. Belum terbukanya pasar ekspor 3. Infrastruktur pemasaran masih rendah 4. Terbatasnya ketersediaan inovasi, teknologi dan Lembaga pengembangan dan pendidikan	

Berdasarkan potensi dan permasalahan diatas, maka sasaran dan program industri pengolahan ubi adalah sebagai berikut.

Tabel IV-78 Sasaran dan Strategi Pembangunan Industri Pengolahan Ubi 2022 - 2042

No	Sasaran	Tahun			
		2022 - 2026	2027 - 2032	2033 - 2038	2039 - 2042
1	Pemantapan klaster pengembangan budidaya ubi di Sentra Wilayah Dataran Lumbis dan Nunukan dalam menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas)				
2	Memperkuat infrastruktur dan aksesibilitas produksi, distribusi dan pemasaran produk				
3	Terwujudnya iklim usaha yang berdaya saing dalam menarik minat pembangunan industri olahan ubi				
4	Peningkatan SDM ahli dan kompeten dalam industri olahan ubi				
5	Peningkatan penerapan sertifikasi dan standarisasi				
6	Peningkatan jumlah industri pengolahan, produktivitas dan kualitas secara kontinyu				
7	Peningkatan efisiensi produk dengan peningkatan sarana prasarana dan bantuan peralatan produksi				
8	Peningkatan kemitraan antara pelaku usaha budidaya, industri, Lembaga Pendidikan dan riset dan instansi pemerintah				
9	Pengembangan serta penguatan penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan diverifikasi, jaminan mutu dan keamanan produk				
10	Diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah				
11	Peningkatan pangsa pasar makanan dalam negeri dan ekspor				
12	Terjadi peningkatan kemitraan antar pemasok bahan baku dengan industri dan pengelola wisata				
Strategi					
1. Meningkatkan produktifitas dalam menjamin ketersediaan dan pasokan produk beras organik pada klaster Dataran Lumbis dan Nunukan 2. Menarik minat para pengusaha, pengolahan ubi dalam menciptakan iklim usaha yang kompetitif 3. Membentuk dan memperkuat kelembagaan pemasaran dan distribusi antara petani, pelaku industri dan pasar 4. Menyiapkan dan meningkatkan jumlah SDM siap pakai dan kompeten dalam budidaya dan industri pengolahan pangan ubi dalam meningkatkan wirausaha 5. Mendorong pengembangan litbang industri pengolahan ubi dalam rangka meningkatkan					

No	Sasaran	Tahun			
		2022 - 2026	2027 - 2032	2033 - 2038	2039 - 2042
6.	diverifikasi produk Pengembangan teknologi untuk pengolahan ubi menjadi produk yang bervariasi dan kompetitif				

Tabel IV-79 Rencana Aksi Pembangunan Industri Pengolahan Ubi 2022 - 2042

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2022-2026	2027-2032	2033-2038	2039-2042
1	Pengembangan kawasan budidaya ubi pada klaster Dataran Lumbis dan Nunukan	Dinas Pertanian				
2	Penyediaan investasi lahan dalam Kawasan food estate yang akan dikembangkan baik dalam budidaya ubi dan lahan industri (land banking) dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang	Dinas Pertanian				
4	Fasilitasi peningkatan produksi (intensifikasi) ubi secara berkelanjutan	Dinas Pertanian				
5	Membangun aksesibilitas produksi dan distribusi pengembangan produk ubi di Wilayah Dataran Lumbis dan Nunukan	Dinas Pertanian, Dina PUPR				
6	Mewujudkan klaster pengembangan produk ubi di Sentra Dataran Lumbis dan Nunukan produk hulu - hilir - sarana dan prasarana pendukung	Dinas Pertanian, Disprindakop				
7	Pengembangan Lembaga Litbang dalam diverifikasi yang bersumber dari ubi mejadi produk pangan lainnya (tepung, kripik, dll) yang kompetitif	Disprindakop, Disprindakop, Lembaga pendidikan				
8	Memperkuat permodalan dan promosi investasi serta memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri olahan ubi skala kecil dan menengah	Disprindakop dan Lembaga keuangan				
9	Fasilitasi Skill Advocation melalui pelatihan implementasi penerapan teknologi pengolahan ubi dalam meningkatkan wirausaha	Disprindakop dan Lembaga pendidikan				
10	Melakukan upaya penumbuhan wiraswata baru melalui kegiatan magang di beberapa pabrik pengolahan pangan ubi					
11	Bantuan sarana pengolahan ubi untuk IKM	Disprindakop				
12	Memberikan insentif pajak, kemudahan perizinan bagi pengusaha dalam pengembangan produk beras organik dari hulu sampai hilir	Disprindakop, Dinas PMPTSP				
13	Sosialisasi intensif penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pengolahan ubi	Disprindakop				
14	Kerjasama riset dalam meningkatkan efisiensi proses	Disprindakop, UKM dan				

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2022-2026	2027-2032	2033-2038	2039-2042
	pengolahan dengan pengembangan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan daya saing harga	Lembaga pendidikan				
15	Penerapan Standar mutu produk pangan olahan ubi dan halal (SNI atau standar lainnya yang relevan) baik terhadap produk, sistem produksi, kemasan dan SDM	Disprindakop				
16	Promosi dalam bentuk pengembangan etalase produk dan Perluasan digitalisasi untuk pemasaran produk khususnya untuk IKM	Diskominfo, Disprindakop dan UKM				
17	Membangun pusat informasi dan workshop industri olahan ubi di lokasi klaster pengolahan pangan olahan ubi					
18	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga finansial	Disprindakop, Lembaga Keuangan				
19	Mengembangkan jejaring pemasaran IKM melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern dan dalam Kawasan wisata	Disprindakop, UKM				

g. Industri Pengolahan Jagung

Potensi dan permasalahan atau gap dari target yang ingin dicapai untuk pengembangan industri pengolahan jagung adalah sebagai berikut.

Tabel IV-80 Potensi dan Permasalahan Pengembangan Industri Pengolahan Jagung

Potensi Pengembangan	
1.	Ketersediaan bahan baku dan potensi lahan yang tinggi
2.	Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Dan Latihan
3.	Kemampuan Dan Keterampilan Tenaga Kerja
4.	Termasuk Produk Unggulan
Gap dari target yang dicapai (Permasalahan)	
1.	Produktifitas produksi jagung relatif rendah
2.	Rendahnya infrastruktur pemasaran
3.	Rendahnya penyerapan tenaga kerja
4.	Masih belum tersedia Fasilitas Pendidikan dan Balai Latihan
5.	Rendahnya pengembangan teknologi dan inovasi dalam pengolahan jagung
6.	Industri pengolahan jagung belum terjadi

Berdasarkan potensi dan permasalahan diatas, maka sasaran dan program industri pengolahan jagung adalah sebagai berikut.

Tabel IV-81 Sasaran dan Strategi Pembangunan Industri Pengolahan Jagung 2022 - 2042

No	Sasaran	Tahun			
		2022 - 2026	2027 - 2032	2033 - 2038	2039 - 2042
1	Pemantapan klaster pengembangan budidaya jagung di Sentra Wilayah Dataran Lumbis dan Nunukan dalam menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas)				
2	Memperkuat infrastruktur dan aksesibilitas produksi, distribusi dan pemasaran produk				
3	Terwujudnya iklim usaha yang berdaya saing dalam menarik minat pembangunan				

No	Sasaran	Tahun			
		2022 - 2026	2027 - 2032	2033 - 2038	2039 - 2042
	industri olahan jagung				
4	Peningkatan SDM ahli dan kompeten dalam industri olahan jagung				
5	Peningkatan penerapan sertifikasi dan standarisasi				
6	Peningkatan jumlah industri pengolahan, produktivitas dan kualitas secara kontinyu				
7	Peningkatan efisiensi produk dengan peningkatan sarana prasarana dan bantuan peralatan produksi				
8	Peningkatan kemitraan antara pelaku usaha budidaya, industri, Lembaga Pendidikan dan riset dan instansi pemerintah				
9	Pengembangan serta penguatan penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan diverifikasi, jaminan mutu dan keamanan produk				
10	Diverifikasi produk dan peningkatan nilai tambah				
11	Peningkatan pangsa pasar makanan dalam negeri dan ekspor				
12	Terjadi peningkatan kemitraan antar pemasok bahan baku dengan industri dan pengelola wisata				
Strategi					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan produktifitas dalam menjamin ketersediaan dan pasokan produk jagung pada klaster Wilayah Sebatik, Krayan dan Dataran Lumbis 2. menarik minat para pengusaha, pengolahan jagung dalam menciptakan iklim usaha yang kompetitif 3. Membentuk dan memperkuat kelembagaan pemasaran dan distribusi antara petani, pelaku industri dan pasar 4. Menyiapkan dan meningkatkan jumlah SDM siap pakai dan kompeten dalam budidaya dan industri pengolahan jagung dalam meningkatkan wirausaha jagung 5. Mendorong pengembangan litbang industri pengolahan jagung dalam rangka meningkatkan diverifikasi produk 6. Pengembangan teknologi untuk pengolahan jagung sehingga produk sesuai dengan standarisasi dan food safety 					

Tabel IV-82 Rencana Aksi Pembangunan Industri Pengolahan Jagung 2022 - 2042

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2022- 2026	2027- 2032	2033- 2038	2039- 2042
1	Pengembangan kawasan budidaya ubi pada klaster Wilayah Sebatik, Krayan dan Dataran Lumbis	Dinas Pertanian				
2	Penyediaan investasi lahan dalam Kawasan food estate yang akan dikembangkan baik dalam budidaya jagung dan lahan industri (land banking) dan penyediaan sarana dan prasarna penunjang	Dinas Pertanian				
4	Fasilitasi peningkatan produksi (intensifikasi) ubi secara berkelanjutan	Dinas Pertanian				
5	Membangun aksesibilitas produksi dan distribusi pengembangan produk jagung (jalan usaha tani) di Wilayah Sebatik, Krayan dan Dataran Lumbis	Dinas Pertanian, Dina PUPR				
6	Mewujudkan klaster sentra jagung di Sebatik, Krayan dan Dataran Lumbis dalam menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan	Dinas Pertanian, Disprindakop				

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2022-2026	2027-2032	2033-2038	2039-2042
	kontinuitas) dengan koordinasi dari berbagai stakeholder					
7	Pengembangan Lembaga Litbang dalam diverifikasi yang bersumber dari jagung menjadi produk pangan lainnya (tepung, kripik, dll) yang kompetitif	Disprindakop, Disprindakop, Lembaga pendidikan				
8	Memperkuat permodalan dan promosi investasi serta memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri olahan ubi skala kecil dan menengah	Disprindakop dan Lembaga keuangan				
9	Fasilitasi Skill Advocation melalui pelatihan implementasi penerapan teknologi pengolahan ubi dalam meningkatkan wirausaha	Disprindakop dan Lembaga pendidikan				
10	Melakukan upaya penumbuhan wiraswata baru melalui kegiatan magang di beberapa pabrik pengolahan pangan jagung					
11	Bantuan sarana mesin pemipil jagung untuk IKM	Disprindakop				
12	Memberikan insentif pajak, kemudahan perizinan bagi pengusaha dalam pengembangan produk olahan jagung dari hulu sampai hilir	Disprindakop, Dinas PMPTSP				
13	Sosialisasi intensif penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pengolahan jagung	Disprindakop				
14	Kerjasama riset dalam meningkatkan efisiensi proses pengolahan jagung dengan pengembangan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan daya saing harga	Disprindakop, UKM dan Lembaga pendidikan				
15	Penerapan Standar mutu produk pangan olahan ubi dan halal (SNI atau standar lainnya yang relevan) baik terhadap produk, sistem produksi, kemasan dan SDM	Disprindakop				
16	Promosi dalam bentuk pengembangan etalase produk dan Perluasan digitalisasi untuk pemasaran produk khususnya untuk IKM	Diskominfo, Disprindakop dan UKM				
17	Membangun pusat informasi dan workshop industri olahan jagung di lokasi klaster pengolahan pangan olahan jagung					
18	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga finansial	Disprindakop, Lembaga Keuangan				
19	Mengembangkan jejaring pemasaran IKM melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern dan dalam Kawasan wisata	Disprindakop, UKM				

h. Industri Pengolahan Sawit

Potensi dan permasalahan atau gap dari target yang ingin dicapai untuk pengembangan industri pengolahan sawit adalah sebagai berikut.

Tabel IV-83 Potensi dan Permasalahan Pengembangan Industri Pengolahan Sawit

Potensi Pengembangan	
1.	Ketersediaan/Supply Bahan Baku
2.	Koninuitas dan Kualitas Bahan Baku
3.	Jangkauan Pasar Internasional-Nasional
4.	Kondisi Persaingan
5.	Dukungan Infrastruktur Pemasaran
6.	Ketersediaan Tenaga Kerja
7.	Kemampuan Dan Keterampilan Tenaga Kerja
8.	Dukungan Lembaga Pemerintah
9.	Penciptaan Nilai Tambah/Diverifikasi Produk
10.	Ketersediaan Teknologi
11.	Ketersediaan Sumber Energi
12.	Penyerapan Tenaga Kerja
13.	Peningkatan Kesejahteraan
Gap dari target yang dicapai (Permasalahan)	
1.	Keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan
2.	Rendahnya peranan kelestarian lingkungan
3.	Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Dan Latihan
4.	Dorongan Inovasi untuk peningkatan nilai tambah

Berdasarkan potensi dan permasalahan diatas, maka sasaran dan program industri pengolahan sawit adalah sebagai berikut.

Tabel IV-84 Sasaran dan Strategi Pembangunan Industri Pengolahan Sawit 2022 - 2042

No	Sasaran	Tahun			
		2022 - 2026	2027 - 2032	2033 - 2038	2039 - 2042
1	Tersedianya pasokan bahan baku industri sawit secara berkelanjutan dari sentra produksi di Wilayah Sei Manggaris, Sebatik, Sebuku dan Lumbis baik untuk perkebunan rakyat dan perkebunan besar swasta				
2	Optimalisasi potensi perkebunan melalui intensifikasi lahan perkebunan yang ada dan pemanfaatan lahan marginal				
3	Terwujudnya keseimbangan pasokan komodita hulu agro sesuai dengan kebutuhan ekspor dan kebutuhan industri pengolahan				
4	Terwujudnya iklim usaha yang berdaya saing dalam menarik minat pembangunan industri olahan sawit				
5	Peningkatan SDM ahli dan kompeten dalam industri pengolahan dan turunan sawit				
6	Peningkatan penerapan sertifikasi dan standarisasi produk				
7	Peningkatan jumlah industri pengolahan, produktivitas dan kualitas secara kontinyu				
8	Peningkatan nilai ekspor komoditi sawit dan turunannya				
9	Peningkatan jaringan kemitraan antara petani dan industri secara menguntungkan				
10	Terbentuknya kelembagaan yang dapat menampung hasil sawit dengan pengaturan harga yang wajar dan terbuka				
11	Terwujudnya aturan pemerintah tentang pengendalian dampak produk olahan sawit yang komprehensif dan berimbang guna menciptakan kepastian				
12	Terbentuknya sentra-sentra industri hasil turunan pengolahan sawit (oleofood, oleokimia dan kemurgi)				
Strategi					
1. Meningkatkan produktifitas dalam menjamin keseimbangan pasokan pada klaster pengembangan Nunukan, Sebatik, Sembakung, Tulin, Sebuku dan Sei Manggaris					

No	Sasaran	Tahun			
		2022 - 2026	2027 - 2032	2033 - 2038	2039 - 2042
2.	Meningkatkan kualitas SDM, kelembagaan dan kemitraan petani dalam mendorong peningkatan mutu				
3.	Meningkatkan penguasaan teknologi dalam inovasi produk sawit (tidak hanya CPO)				
4.	Meningkatkan penguasaan teknologi dalam pengurangan dampak lingkungan				
5.	Melibatkan industri olahan sawit dalam penyusunan aturan pemerintah terkait pengendalian dampak dan resiko proses produksi				

Tabel IV-85 Rencana Aksi Pembangunan Industri Pengolahan Sawit 2022 - 2042

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2022-2026	2027-2032	2033-2038	2039-2042
1	Mewujudkan kluster sentra perkebunan sawit rakyat dan perkebunan besar swasta (inti dan plasma) di wilayah Sei Manggaris, Sebatik, Sebuku dan Lumbis	Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan				
2	intensifikasi lahan perkebunan yang ada dan pemanfaatan lahan marginal	Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan				
4	Menyediakan investasi lahan yang akan dikembangkan baik dalam budidaya dan lahan industri (land banking) dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang	Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan, Disprindakop dan Dinas PMPTSP				
5	Mempermudah akses kredit bagi petani sawit	Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan, Lembaga Keuangan				
6	Terwujudnya iklim usaha yang berdaya saing dengan memberikan insentif pajak, kemudahan perizinan bagi pengusaha dalam pengembangan produk sawit dari hulu sampai hilir	Disprindakop, Dinas PMPTSP				
7	Inovasi produk dan teknologi melalui peningkatan R & D turunan kelapa sawit yang terintegrasi	Disprindakop dan Lembaga pendidikan				
8	Fasilitasi Skill Advocation melalui pelatihan implementasi penerapan teknologi pengolahan komoditi sawit	Disprindakop dan Lembaga pendidikan				
9	Peningkatan linkage antara industri kecil menengah dengan industri besar dalam rangka alih teknologi	Disprindakop dan Lembaga pendidikan				
10	Pengembangan penelitian pasar guna mencari orientasi dan pasar yang baru	Disprindakop				
11	Diverifikasi produk oleokimia dan olefood yang bernilai tambah tinggi	Disprindakop dan Lembaga pendidikan				
12	Penerapan Standar mutu produk dan SDM	Disprindakop				
13	Pengembangan industri turunan CPO ke arah industri pelumas, surfaktan dan biodiesel	Disprindakop				
14	Pengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan yang berasal dari limbah padat maupun limbah cair sawit	Disprindakop, Dinas LH				
15	Meningkatkan nilai tambah	Disprindakop,				

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2022-2026	2027-2032	2033-2038	2039-2042
	limbah industri dan penerapan system produksi bersih (reduce, reuse, recycle) berbasis inovasi dan teknologi ramah lingkungan	Dinas LH				

i. Industri Anyaman Rotan dan Bambu

Potensi dan permasalahan atau gap dari target yang ingin dicapai untuk pengembangan industri anyaman rotan dan bambu adalah sebagai berikut.

Tabel IV-86 Potensi dan Permasalahan Pengembangan Industri Anyaman Rotan dan Bambu

Potensi Pengembangan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan/Supply Bahan Baku 2. Koninuitas dan Kualitas Bahan Baku 3. Jangkauan Pasar Nasional 4. Ketersediaan Tenaga Kerja 5. Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Dan Latihan 6. Kemampuan Dan Keterampilan Tenaga Kerja 7. Posisi Produk Dalam Kebijakan Daerah 8. Dukungan Lembaga Pemerintah
Gap dari target yang dicapai (Permasalahan)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedia teknologi, inovasi dan pengembangan desain 2. Dukungan infrastruktur pemasaran belum optimal 3. Rendahnya keterkaitan antar kelembagaan khususnya litbang 4. Rendahnya penyerapan tenaga kerja

Berdasarkan potensi dan permasalahan diatas, maka sasaran dan program industri anyaman rotan dan bambu adalah sebagai berikut.

Tabel IV-87 Sasaran dan Strategi Pembangunan Industri Anyaman Rotan dan Bambu 2022 - 2042

No	Sasaran	Tahun			
		2022 - 2026	2027 - 2032	2033 - 2038	2039 - 2042
1	Tersedianya pasokan bahan baku untuk anyaman rotan dan bambu secara berkelanjutan dari sentra produksi di Wilayah Krayan dan wilayah Sei Manggaris-Mansalong				
2	Terwujudnya sistem pembinaan dan pengembangan industri barang anyaman rotan dan bambu				
4	Meningkatnya kerjasama antar sektor terkait dalam rangka pengembangan industri barang anyaman rotan dan bambu demi terciptanya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah				
4	Peningkatan produktivitas, efisiensi, mutu dan desain yang inovatif industri barang anyaman rotan dan bambu				
5	Terwujudnya brand product untuk industri barang anyaman rotan dan bambu yang mampu bersaing di pasar dalam negeri dan luar negeri				
6	Peningkatan jejaring pemasaran yang lebih luas dari industri barang anyaman rotan dan bambu				
7	Terbentuknya basis kompetensi inti industri barang anyaman rotan dan bambu				
Strategi					
1. Mengembangkan klaster industri dengan penetapan produk Champion di Krayan dan wilayah Sei Manggaris-Mansalong					

No	Sasaran	Tahun			
		2022 - 2026	2027 - 2032	2033 - 2038	2039 - 2042
2.	Mengembangkan sentra dan revitalisasi UPT IKM Kerajinan sebagai pusat penyediaan bahan baku, teknologi, produksi, desain serta peningkatan SDM				
3.	Mengembangkan industri kerajinan melalui OVOP (satu produk satu desa)				
4.	Meningkatkan kerjasama antar stakeholder				
5.	Mendorong kelembagaan pemasaran				
6.	Terwujudnya brand product untuk industri barang anyaman rotan dan bambo yang mampu bersaing di pasar dalam negeri dan luar negeri berdasarkan basis kompetensi inti industri barang anyaman rotan dan bambo				

Tabel IV-88 Rencana Aksi Pembangunan Industri Anyaman Rotan dan Bambu 2022 - 2042

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2022 - 2026	2027 - 2032	2033 - 2038	2039 - 2042
1	Perwujudan ketersediaan bahan baku di sekitar sentra industri kerajinan anyaman rotan dan bambo di wilayah Sei Manggaris-Mansalong	Disprindakop				
2	Melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk menjamin pasokan bahan baku.	Disprindakop				
3	Melakukan pendampingan pemilihan dan penyimpanan bahan baku dan bahan penolong industri kerajinan	Disprindakop				
4	Menyelenggarakan diklat terapan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM	Disprindakop dan Lembaga pelatihan dan balai Diklat				
5	Memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan HAKI	Disprindakop dan Lembaga pelatihan dan balai Diklat				
6	Mendorong dan merevitalisasi UPT IKM Kerajinan sebagai pusat penyediaan bahan baku, teknologi, produksi, desain serta peningkatan SDM	Disprindakop dan Lembaga pelatihan dan balai Diklat				
7	Mewujudkan sentra-sentra kerajinan pada produk Champion di setiap desa	Disprindakop				
8	Memfasilitasi terbangunnya pusat pelatihan dan pengembangan kerajinan anyaman rotan dan bambo	Disprindakop dan Lembaga pelatihan dan balai Diklat				
9	Meningkatkan peran kelembagaan klaster untuk memperkuat kemitraan diantara para pelaku usaha industri anyaman rotan dan bambo dan pelaku usaha industri terkait lainnya.	Disprindakop dan Lembaga usaha				
10	Memfasilitasi promosi yang intensif untuk produk industri tenun melalui media elektronik, CD, katalog dan brosur	Disprindakop dan Dinas Kominfo				
11	Membangun etalase (workshop) pemasaran khususnya di 3 PPLBN	Disprindakop dan Dinas Kominfo				
12	Memfasilitasi benchmarking produk, tren dan peluang pasar	Disprindakop				
13	Memfasilitasi temu usaha dan kemitraan dengan prospektif	Disprindakop				

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2022 - 2026	2027 - 2032	2033 - 2038	2039 - 2042
	buyer					
14	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga finansial	Disprindakop dan Lembaga keuangan				

j. Industri Pakan

Potensi dan permasalahan atau gap dari target yang ingin dicapai untuk pengembangan industri pakan adalah sebagai berikut.

Tabel **Error! No text of specified style in document.**-89 Potensi dan Permasalahan Pengembangan Industri Pakan

Potensi Pengembangan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan/Supply Bahan Baku 2. Koninuitas dan Kualitas Bahan Baku 3. Jangkauan Pasar Internasional-Nasional 4. Kondisi Persaingan 5. Ketersediaan sumber energi
Gap dari target yang dicapai (Permasalahan)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya peranan kelestarian lingkungan 2. Masih belum tersedia Fasilitas Pendidikan dan Balai Latihan 3. Rendahnya pengembangan teknologi dan inovasi dalam pengolahan pakan 4. Industri pengolahan pakan belum terjadi baik dari sisi inovasi dan teknologi 5. Belum menciptakan Nilai Tambah/Diverifikasi Produk dari produk sumber pakan

Berdasarkan potensi dan permasalahan diatas, maka sasaran dan program industri pakan adalah sebagai berikut.

Tabel IV-90 Sasaran dan Strategi Pembangunan Industri Pakan 2022 - 2042

No	Sasaran	Tahun			
		2022 - 2026	2027- 2032	2033 - 2038	2039 - 2042
1	Pemantapan klaster pengembangan budidaya jagung sebagai bahan baku utama industri pakan di Sentra Wilayah Dataran Lumbis dan Nunukan dalam menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas)				
2	Memperkuat rantai nilai pengolahan industri pakan dari hulu sampai hilir				
3	Terwujudnya iklim usaha yang berdaya saing dalam menarik minat pembangunan industri pakan				
4	Peningkatan SDM ahli dan kompeten dalam industri pakan				
5	Peningkatan penerapan sertifikasi dan standarisasi				
6	Peningkatan jumlah industri, produktivitas dan kualitas secara kontinyu				
8	Peningkatan kemitraan antara pelaku usaha budidaya, industri, Lembaga Pendidikan dan riset dan instansi pemerintah				
9	Pengembangan serta penguatan penelitian dalam pengembangan inovasi dan teknologi dalam rangka meningkatkan diverifikasi, jaminan mutu dan keamanan produk				
11	Peningkatan pangsa pasar pakan dalam negeri				
12	Terjadi peningkatan kemitraan antar pemasok bahan baku dengan industri				
Strategi					
1. Meningkatkan produktifitas dalam menjamin ketersediaan dan pasokan produk untuk					

No	Sasaran	Tahun			
		2022 - 2026	2027- 2032	2033 - 2038	2039 - 2042
	<p>pakan khususnya jagung</p> <p>2. menarik minat para pengusaha, industri pakan dalam menciptakan iklim usaha yang kompetitif</p> <p>3. Membentuk dan Memperkuat kelembagaan pemasaran</p> <p>4. Menyiapkan dan meningkatkan jumlah SDM siap pakai dan kompeten dalam industri pakan</p> <p>5. Mendorong pengembangan litbang (teknologi) industri pakan dalam rangka meningkatkan diversifikasi produk</p> <p>6. Pengembangan teknologi untuk pengolahan industri pakan sehingga produk sesuai dengan standarisasi</p>				

Tabel IV-91 Rencana Aksi Pembangunan Industri Pakan 2022 - 2042

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2022 - 2026	2027 - 2032	2033 - 2038	2039 - 2042
1	Mewujudkan klaster sentra jagung di Sebatik, Krayan dan Dataran Lumbis dalam menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) untuk bahan baku pakan	Dinas Pertanian				
2	Pengembangan Lembaga Litbang dalam pengolahan pakan dari basis komoditi jagung	Disprindakop, Lembaga pendidikan				
3	Mengembangkan dan membangun industri pemipilan jagung	Disprindakop dan Lembaga keuangan				
4	Fasilitasi Skill Advocation melalui pelatihan implementasi penerapan teknologi industri pakan	Disprindakop dan Lembaga pendidikan				
5	Memberikan insentif pajak, kemudahan perizinan bagi pengusaha dalam pengembangan produk industri pakan dari hulu sampai hilir	Disprindakop, Dinas PMPTSP				
6	Sosialisasi intensif penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi industri pakan	Disprindakop				
7	Kerjasama riset dalam meningkatkan efisiensi proses industri pakan dengan pengembangan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan daya saing harga	Disprindakop, UKM dan Lembaga pendidikan				
8	Penerapan Standar mutu produk (SNI atau standar lainnya yang relevan) baik terhadap produk, sistem produksi, kemasan dan SDM	Disprindakop				
9	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga finansial	Disprindakop, Lembaga Keuangan				
10	Meningkatkan nilai tambah limbah industri dan penerapan system produksi bersih (reduce, reuse, recycle) berbasis inovasi dan teknologi ramah lingkungan	Disprindakop, Dinas LH				

4.2.2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi melakukan percepatan, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia. Guna mencapai sasaran dilakukan melalui pengembangan perwilayahan industri. Pembangunan industri tidak hanya dilakukan melalui pendekatan sektoral yang diwujudkan melalui penguatan struktur industri dan berdaya saing, tetapi juga perlu melalui pendekatan spasial yang dilaksanakan melalui pengembangan perwilayahan industri.

Pembangunan WPPI ini berbasis pada pengembangan industri dengan pendayagunaan potensi sumber daya wilayah, penguatan infrastruktur industri, dan konektivitas yang memiliki keterkaitan ekonomi kuat dengan wilayah sekitar. Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), pembangunan Kawasan Industri (KI) dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM).

1. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)

Dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dalam rangka memudahkan sinergi dan koordinasi dalam pembangunan industri di daerah, maka secara administratif wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi ke dalam 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan Industri (WPI). WPI ditentukan berdasarkan keterkaitan ke belakang (*backward*) dan keterkaitan ke depan (*forward*) sumberdaya dan fasilitas pendukungnya, serta memperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan pembangunan industri.

Wilayah Kabupaten Nunukan Termasuk kedalam Wilayah Pengembangan Industri (WPI) Kalimantan Bagian Timur dengan cakupan Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.

Wilayah Kabupaten Nunukan termasuk dalam WPPI Tarakan – Nunukan dengan pengembangan industri prioritas yaitu :

- ↳ Industri pangan;
- ↳ Industri hulu agro.

Oleh karena itu, maka program-program harus disusun, diantaranya adalah:

- ↳ Percepatan pembangunan penyiapan fasilitas terkait WPPI untuk Kabupaten Nunukan.
- ↳ Pengembangan Kawasan peruntukan industri untuk pendukung WPPI di Kabupate Nunukan.

Kabupaten Nunukan yang syarat dengan melimpahnya potensi sumber daya menjadi Kabupaten Nunukan memiliki berbagai produk unggulan sehingga membentuk klasterisasi Produk Unggulan. Istilah “klaster (*cluster*)” mempunyai pengertian harfiah sebagai kumpulan, kelompok, himpunan, atau gabungan obyek tertentu yang memiliki keserupaan atau atas dasar karakteristik tertentu. Dalam konteks ekonomi “klaster industri (*industrial cluster*) merupakan terminologi yang mempunyai pengertian khusus tertentu. Menurut Porter (2000) mengartikan klaster sebagai “*a geographically proximate group of interconnected enterprises and associated institutions in a particular field, linked by commonality and complementarity*”.

Klaster merupakan konsentrasi geografis perusahaan dan institusi yang saling berhubungan pada sektor tertentu. Klaster mendorong industri untuk bersaing satu sama lain. Selain industri, klaster termasuk juga pemerintah dan industri yang memberikan dukungan pelayanan seperti pelatihan,

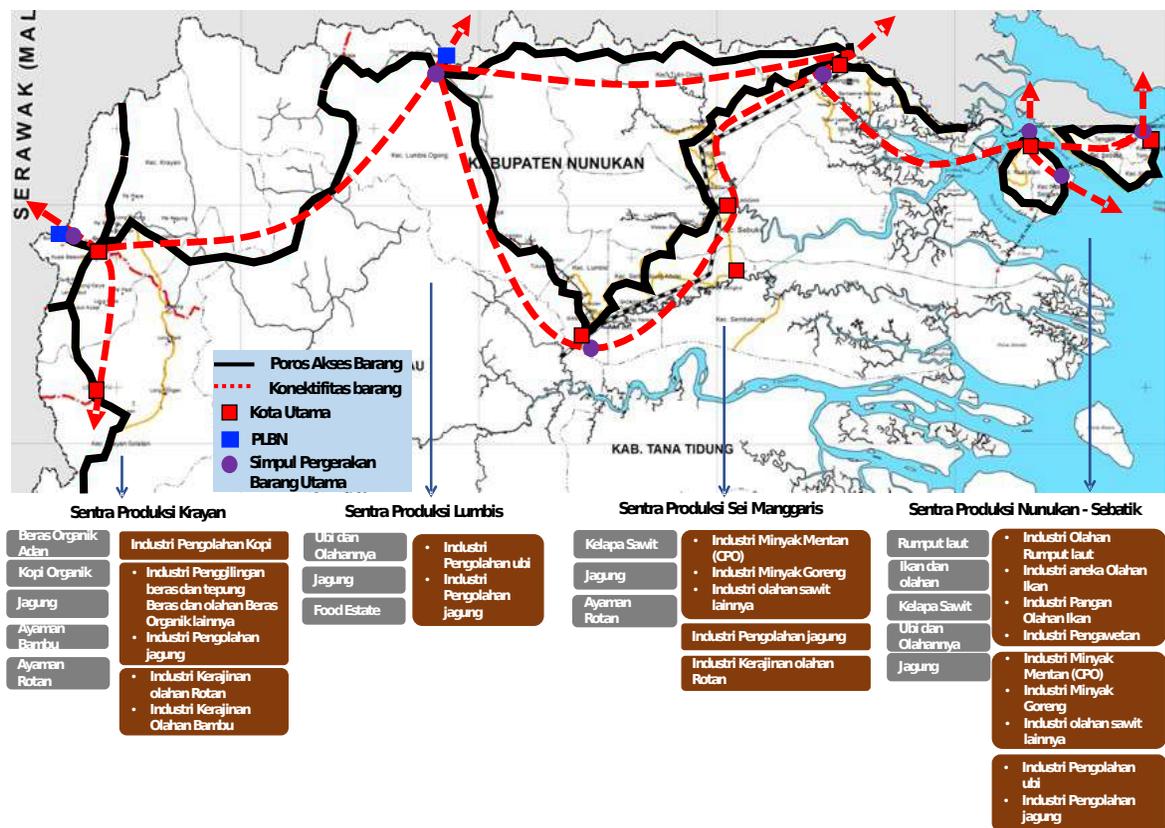
pendidikan, informasi, penelitian dan dukungan teknologi. Secara sempit Schmitz (1997) mendefinisikan klaster sebagai grup perusahaan yang berkumpul pada satu lokasi dan bekerja pada sektor yang sama. Sementara JICA (2004) memberi batasan klaster sebagai pemusatan geografis industri-industri terkait dan kelembagaan-kelembagaannya.

Klaster memiliki pengertian lebih luas dari "sentra" yang telah dikenal umum. Sentra lebih merupakan pengelompokan aktivitas bisnis yang serupa/sejenis disuatu lokasi. Satu atau beberapa sentra bisa merupakan bagian integral dan sebagai "titik masuk (entry point)" dari upaya pengembangan (perkuatan) suatu klaster industri.

Sebelumnya secara spesifik Scorsone (2002) mengungkapkan bahwa klaster membawa keuntungan sebagai berikut :

- ↳ Lokalisasi ekonomi. Melalui klaster, dengan memanfaatkan kedekatan lokasi, industri yang menggunakan input (informasi, teknologi atau layanan jasa) yang sama dapat menekan biaya perolehan dalam penggunaan jasa tersebut. Misalnya pendirian pusat pelatihan di klaster akan memudahkan akses industri pelaku klaster tersebut.
- ↳ Pemusatan tenaga kerja. Klaster akan menarik tenaga kerja dengan berbagai keahlian yang dibutuhkan klaster tersebut, sehingga memudahkan industri pelaku klaster untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya dan mengurangi biaya pencarian tenaga kerja.
- ↳ Akses pada pertukaran informasi dan patokan kinerja. industri yang tergabung dalam klaster dapat dengan mudah memonitor dan bertukar informasi mengenai kinerja supplier dan nasabah potensial. Dorongan untuk inovasi dan teknologi akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan perbaikan produk.
- ↳ Produk komplemen. Karena kedekatan lokasi, produk dari satu pelaku klaster dapat memiliki dampak penting bagi aktivitas usaha industri yang lain. Disamping itu kegiatan usaha yang saling melengkapi ini dapat bergabung dalam pemasaran bersama.

Pendekatan klaster telah digunakan dalam rangka pengembangan UMKM. Melalui pendekatan klaster ini akan tercipta lingkungan usaha yang kondusif bagi para pelaku usaha termasuk di dalamnya UMKM, dalam meningkatkan daya saingnya. Kedekatan lokasi dapat menekan biaya perolehan dalam penggunaan jasa. Berikut disajikan klasterisasi (sentra) produk unggulan Kabupaten Nunukan.



Gambar IV-28 Klasterisasi/Sentra-Sentra Produk Unggulan Kabupaten Nunukan

2. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Pengembangan perwilayahan industri erat kaitannya dengan rencana tata ruang wilayah, di mana lokasi industri maupun kawasan industri wajib berlokasi di dalam Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Berdasarkan (RANCANGAN) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2022-2042, telah menetapkan pemanfaatan ruang yang tertuang dalam Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Nunukan dengan luas kurang lebih 456 hektar, meliputi:

- a. Kecamatan Lumbis arah pengembangan industri berbasis olahan kelapa sawit, olahan jagung dan olahan ubi;
- b. Kecamatan Nunukan Selatan arah pengembangan industri berbasis olahan rumput laut dan perikanan dengan konsep pengembangan **Kawasan Industri Perikanan Terpadu (Marine Technopark) dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)** di Masapa;
- c. Kecamatan Sebatik Barat arah pengembangan industri berbasis perikanan dan hasil laut, olahan kelapa sawit dan olahan jagung;
- d. Kecamatan Sebuku arah pengembangan industri berbasis olahan kelapa sawit, olahan jagung, industri pakan dan industri kerajinan anyaman rotan-bambu;
- e. Kecamatan Sei Manggaris arah pengembangan industri berbasis olahan kelapa sawit, olahan jagung, industri pakan dan industri kerajinan anyaman rotan-bambu;
- f. Kecamatan Krayan dan sekitarnya arah pengembangan industri berbasis olahan beras organik, olahan kopi organik, olahan jagung, industri pakan dan industri kerajinan anyaman rotan-bambu dengan konsep **Kawasan Technopark Pertanian Organik**.

3. Pengembangan Sentra IKM

Selain pengembangan Kawasan peruntukan industri diarahkan juga untuk pengembangan sentra industri kecil dan menengah yang tersebar pada ibu kota kecamatan serta pusat-pusat pemukiman di wilayah kabupaten.

Adapun komoditas unggulan/produk industri kecil dan menengah disajikan pada tabel berikut.

Tabel IV-92 Pengembangan Sentra IKM di Kabupaten Nunukan

Sentra IKM pada Ibukota Kecamatan dan Pusat Permukiman	Produk Industri Unggulan Sentra IKM
Nunukan	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra IKM pengeringan dan pengolahan rumput laut • Sentra IKM pengawetan ikan • Sentra IKM makanan hasil olahan rumput laut dan ikan, ubi dan jagung • Sentra IKM pengolahan ubi • Sentra IKM pengolahan jagung
Sebatik	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra IKM pengeringan dan pengolahan rumput laut • Sentra IKM pengawetan ikan • Sentra IKM makanan hasil olahan rumput laut dan ikan, dan jagung • Sentra IKM pengolahan jagung
<ul style="list-style-type: none"> • Krayan • Krayan Selatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra IKM penggilingan padi dan pengolahan beras • Sentra IKM pengolahan makanan hasil olahan beras, jagung dan kopi • Sentra IKM pengolahan kopi • Sentra IKM anyaman rotan dan bambu • Sentra IKM industri pakan
<ul style="list-style-type: none"> • Sembakung • Sembakung Atulai • Tulin Onsoi • Sebuku • Sei Manggaris 	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra IKM pengolahan makanan hasil olahan jagung • Sentra IKM pengolahan jagung • Sentra IKM anyaman rotan dan bambu • Sentra IKM industri pakan
<ul style="list-style-type: none"> • Lumbis Ogong • Lumbis Pansiangan • Lumbis Hulu 	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra IKM pengolahan makanan hasil olahan beras, jagung dan ubi • Sentra IKM pengolahan ubi • Sentra IKM pengolahan jagung

4. Program Pengembangan Perwilayahan Industri 2022 – 2042

Adapun Program Pengembangan Perwilayahan Industri 2022 – 2042 di Kabupaten Nunukan disajikan pada tabel berikut.

Tabel IV-93 Program Pengembangan Perwilayahan Industri 2022 – 2042

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2022-2026	2027-2032	2033-2038	2039-2042
A	Pengembangan WPPI Nunukan					
1	Pengusulan Penambahan WPPI ke arah Nunukan Selatan dalam pengembangan Kawasan Industri Perikanan Terpadu	Kemenperin				
2	Koordinasi dengan kementerian dan Lembaga terkait infrastruktur pendukung (jalan, pelabuhan, sumber daya air) menuju Kawasan Industri Perikanan Terpadu di Mansapa	Kemenperin, KKP dan Kementerian PUPR				
B	Pengembangan KPI					
1	Pengembangan KPI Perikanan Terpadu di Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan	Bappeda, Disprindakop, Dinas PUPR, Dinas Perikanan				
	a. Penyusunan Dokumen perencanaan pengembangan KPI di Kecamatan Nunukan Selatan					
	b. Pembentukan Kelembagaan KPI di Kecamatan Nunukan Selatan					
	c. Pembangunan infrastruktur penunjang KPI di Kecamatan					

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2022-2026	2027-2032	2033-2038	2039-2042
	Nunukan Selatan					
	d. Perwujudan KPI di Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan					
2	Pengembangan KPI untuk pengembangan perikanan dan hasil laut, olahan kelapa sawit dan olahan jagung di Kecamatan Sebatik Barat	Bappeda, Disprindakop, Dinas PUPR, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian				
	a. Penyusunan Dokumen perencanaan pengembangan KPI di Kecamatan Sebatik Barat					
	b. Pembentukan Kelembagaan KPI di Kecamatan Sebatik Barat					
	c. Pembangunan infrastruktur penunjang KPI di Kecamatan Sebatik Barat					
	d. Perwujudan KPI di Kecamatan Sebatik Barat					
3	Pengembangan KPI untuk pengembangan olahan kelapa sawit, olahan jagung dan industri pakan di Kecamatan Sebuku	Bappeda, Disprindakop, Dinas PUPR, Dinas Pertanian				
	a. Penyusunan Dokumen perencanaan pengembangan KPI di Kecamatan Sebuku					
	b. Pembentukan Kelembagaan KPI di Kecamatan Sebuku					
	c. Pembangunan infrastruktur penunjang KPI di Kecamatan Sebuku					
	d. Perwujudan KPI di Kecamatan Sebuku					
4	Pengembangan KPI untuk pengembangan olahan kelapa sawit, olahan jagung dan industri pakan di Kecamatan Sei Manggaris	Bappeda, Disprindakop, Dinas PUPR, Dinas Pertanian				
	a. Penyusunan Dokumen perencanaan pengembangan KPI di Kecamatan Sei Manggaris					
	b. Pembentukan Kelembagaan KPI di Kecamatan Sei Manggaris					
	c. Pembangunan infrastruktur penunjang KPI di Kecamatan Sei Manggaris					
	d. Perwujudan KPI di Kecamatan Sei Manggaris					
5	Perwujudan KPI untuk pengembangan olahan kelapa sawit, olahan jagung dan olahan ubi di Kecamatan Lumbis	Bappeda, Disprindakop, Dinas PUPR, Dinas Pertanian				
	a. Penyusunan Dokumen perencanaan pengembangan KPI di Kecamatan Lumbis					
	b. Pembentukan Kelembagaan KPI di Kecamatan Lumbis					
	c. Pembangunan infrastruktur penunjang KPI di Kecamatan Lumbis					
	d. Perwujudan KPI di Kecamatan Lumbis					
6	Perwujudan KPI untuk pengembangan olahan beras organik, olahan kopi organik,	Bappeda, Disprindakop, Dinas PUPR,				

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2022-2026	2027-2032	2033-2038	2039-2042
	olahan jagung dan industri pakan di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan	Dinas Pertanian				
	a. Penyusunan Dokumen perencanaan pengembangan KPI di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan					
	b. Pembentukan Kelembagaan KPI di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan					
	c. Pembangunan infrastruktur penunjang KPI di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan					
	d. Perwujudan KPI di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan					
C	Pengembangan Sentra IKM					
1	Pengembangan Sentra IKM pengeringan dan pengolahan rumput laut, Sentra IKM pengawetan ikan, Sentra IKM makanan hasil olahan rumput laut dan ikan, ubi dan jagung, Sentra IKM pengolahan ubi, Sentra IKM pengolahan jagung di Ibukota Kecamatan dan Pusat Permukiman Nunukan	Disprindakop, Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan				
2	Pengembangan Sentra IKM pengeringan dan pengolahan rumput laut, Sentra IKM pengawetan ikan, Sentra IKM makanan hasil olahan rumput laut dan ikan, dan jagung Sentra IKM pengolahan jagung di Ibukota Kecamatan dan Pusat Permukiman Sebatik					
3	Pengembangan Sentra IKM penggilingan padi dan pengolahan beras, Sentra IKM pengolahan makanan hasil olahan beras, jagung dan kopi, Sentra IKM pengolahan kopi, Sentra IKM anyaman rotan dan bamboo, Sentra IKM industri pakan di Ibukota Kecamatan dan Pusat Permukiman Krayan dan Krayan Selatan					
4	Pengembangan Sentra IKM pengolahan makanan hasil olahan jagung, Sentra IKM pengolahan jagung, Sentra IKM anyaman rotan dan bamboo, Sentra IKM industri pakan di Ibukota Kecamatan dan Pusat Permukiman, Sembakung, Sembakung Atulai, Tulin Onsoi, Sebuku dan Sei Manggaris					
5	Pengembangan Sentra IKM pengolahan makanan hasil olahan beras, jagung dan ubi, Sentra IKM pengolahan ubi, Sentra IKM pengolahan jagung di Ibukota Kecamatan dan Pusat Permukiman Lumbis Ogongm Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu					

4.2.3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumber daya industri daerah adalah merupakan syarat betumbuhnya industri di duatu daerah. Tanpa sumber daya ini maka industri tidak akan tumbuh. Sumber daya bukanlah semata-mata kekayaan alam (SDA), melainkan juga sumberdaya manusia (SDM), sumber permodalan, teknologi tepat guna dan pendukung lainnya.

Oleh karena itu, pembangunan sumber daya ini dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia industri, pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dan penyediaan sumber daya manusia.

4.2.3.1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Pengembangan SDM industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja industri kompeten yang siap bekerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri dan/ atau perusahaan KI, meningkatkan produktivitas tenaga kerja industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri serta memberikan jalinan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja industri. Berikut program pengembangan SDM industri Kabupaten Nunukan Tahun 2022 sampai dengan tahun 2042.

Tabel IV-94 Program Pengembangan SDM Industri 2022 - 2042

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2022-2026	2027-2032	2033-2038	2039-2042
1	Pengembangan pendidikan vokasi industri menuju dual system	Disprindakop, Lembaga pendidikan				
2	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan, balai pendidikan dan pelatihan seperti penyediaan laboratorium dan workshop	Disprindakop				
3	Pembinaan dan pelatihan Pengembangan keterampilan personal (Self Efikasi)	Disprindakop				
4	Fasilitasi sertifikasi kompetensi dengan melakukan kerjasama antara pemerintah, asosiasi industri, asosiasi profesi, Kamar Dagang Industri (KADIN), serta perusahaan industri	Disprindakop, Lembaga Pendidikan dan asosiasi				
5	Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan dalam menghadapi digilitasasi industri	Disprindakop				

4.2.3.2. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam (SDA)

Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam (SDA) diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik. Tujuannya adalah menjamin penyediaan dan penyaluran SDA tersebut dapat diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan produk yang berdaya saing. Berikut program yang dilakukan pemerintah Kabupaten Nunukan.

Tabel IV-95 Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam (SDA) 2022 - 2042

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2022-2026	2027-2032	2033-2038	2039-2042
1	Penyusunan rencana pemanfaatan SDA	Dinas perikanan, dinas pertanian				
2	Manajemen pengolahan SDA	Dinas perikanan, dinas pertanian				
3	Penerapan pemanfaatan SDA yang efisien melalui sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan penerapan teknologi budidaya pertanian	Dinas perikanan, dinas pertanian				
4	Diversifikasi lahan guna meningkatkan ketersediaan dan keberlanjutan bahan baku	Dinas perikanan, dinas pertanian				
5	Penerapan pemanfaatan SDA yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan limbah (reduce), penggunaan kembali (reuse), pengolahan kembali (recycle), dan pemulihan (recovery)	Dinas perikanan, dinas pertanian, Dinas LH				
6	Penguatan dan penjaminan pasokan serta keberlangsungan bahan baku yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan melalui penelitian dan pengemabangan	Dinas perikanan, dinas pertanian, Disprindakop				
7	Inventarisasi dan datalisasi lahan sebagai sumber bahan baku industri berbasis aplikasi	Dinas perikanan, dinas pertanian				
8	Monitoring, evaluasi dan pengendalian pemanfaatan lahan sebagai bahan baku industri	Dinas perikanan, dinas pertanian, Disprindakop				
9	Konservasi SDA	Dinas perikanan, dinas pertanian				
10	Pengelolaan data distribusi bahan baku industri	Dinas perikanan, dinas pertanian, Disprindakop				
11	Penerapan kebijakan diversifikasi energi terbarukan	Disprindakop, Dinas LH				

4.2.3.3. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Program pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri. Penguasaan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri dalam negeri agar dapat bersaing di pasar dalam negeri dan pasar global.

Tabel IV-96 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri 2022 - 2042

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2022-2026	2027-2032	2033-2038	2039-2042
1	Peningkatan sinergi dan program kerjasama penelitian dan pengembangan	Disprindakop, Lembaga litbang dan lembaga pendidikan				
2	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	Disprindakop				
3	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri baru dalam pengolahan hasil laut dan perikanan, pengolahan sawit, pengolahan olahan tanaman pangan dan pengolahan hasil perkebunan	Disprindakop				
4	Penerapan standar mutu	Disprindakop				

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2022-2026	2027-2032	2033-2038	2039-2042
	(SNI/ISO/HACCP atau setandar lainnya yang relevan					
5	Penerapan teknologi produksi sederhana dan mudah dikuasai untuk diversifikasi produk dan desain dalam membuat inovasi untu IKM potensial	Disprindakop				
6	Pemberian insentif fiskal untuk badan usaha dan atau perorangan yang melaksanakan penelitian dan pengembangan secara mandiri di bidang industri	Disprindakop				
7	Mmelakukan audit energi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk pengembangan industri	Disprindakop, Dinas LH				
8	Pemberian jaminan risiko terhadap pemanfaatan teknologi	Disprindakop				
9	Penggunaan teknologi dalam meningkatkan nilai tambah limbah industri yang dihasilkan dengan penerapan sistem produksi bersih dan zero waste (reduce, reuse, recycle) berbasis teknologi ramah lingkungan	Disprindakop, Dinas LH				

4.2.3.4. Program Pengembangan Inovasi

Program pengembangan kreatifitas dan inovasi bertujuan untuk memberdayakan budaya industri dan/ atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif, meningkatkan daya saing dan agretifits pasar.

Tabel IV-97 Program Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi 2022 - 2042

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2022-2026	2027-2032	2033-2038	2039-2042
1	Penelitian dan pengembangan dalam penguatan inovasi industri dalam pengemasan dan pemasaran	Disprindakop, Lembaga litbang dan lembaga pendidikan				
2	Kajian Inovasi dan Kreatifitas Industri berbasis aplikasi	Disprindakop				
3	Sosialiasi aplikasi Inovasi dan Kreatifitas Industri	Disprindakop				
4	Pengembangan Inovasi dan Kreatifitas Industri berbasis aplikasi	Disprindakop dan Balai Pelatihan				
5	Pembangunan dan Pengembangan sentra industri kreatif	Disprindakop dan Balai Pelatihan				
6	Pelatihan teknologi dan desain	Disprindakop dan Balai Pelatihan				
7	Konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan HAKI khususnya untuk industri kecil	Disprindakop, Kementerian Hukum dan HAM				
8	Fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam dan luar negeri.	Disprindakop, Dinas Kominfo				
9	Penerapan konsep model technopark dalam pengembangan industri berbasis hasil laut, perikanan dan olahan tanaman pangan yang memadukan kerjasama antar Lembaga perguruan tinggi, pemerintah daerah, pelaku usaha dalam	Disprindakop				

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2022-2026	2027-2032	2033-2038	2039-2042
	pengembangan Kawasan terpadu.					

4.2.3.5. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan

Dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan industri nasional dibutuhkan pembiayaan investasi di sektor industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing serta penanaman modal pemerintah khususnya untuk pengembangan industri strategis. Pembiayaan industri dapat diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit perbankan. Berikut program-program dalam rangka penyediaan sumber pembiayaan.

Tabel IV-98 Program Penyediaan Sumber Pembiayaan 2022 - 2042

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2022-2026	2027-2032	2033-2038	2039-2042
1	Pembentukan Lembaga Pembiayaan Industri	Disprindakop,				
2	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Disprindakop				
3	Fasilitasi modal usaha dengan bekerjasama dengan lembaga pembiayaan	Disprindakop dan Lembaga Keuangan				
4	Mengadakan kerjasama dengan investor nasiona dan luar negeri untuk pembangnan pabrik pengolahan	Disprindakop				
5	Koordinasi penggunaan dana pemerintahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Disprindakop				
6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Disprindakop				
7	Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian berbasis aplikasi	Disprindakop				
8	Permbinaan dan pengawasan koperasi, KSP/USP, kopdit/CU, dan KJKS/UJKS	Disprindakop				
9	Penerapan system resi Gudang untuk peningkatan aksesibilitas perbankan	Disprindakop				

4.2.4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Dalam pembangunan sarana dan prasarana industri dilakukan melalui pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standarisasi industri.

4.2.4.1. Program Pengelolaan Lingkungan

Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan pada kawasan industri dan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan ke area masyarakat, harus memiliki komitmen kuat dalam menjaga pengelolaan lingkungan sekitar, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung pada aktifitas lingkungan hidup.

Tabel IV-99 Program Pengelolaan Lingkungan 2022 – 2042

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2022-2026	2027-2032	2033-2038	2039-2042
1	Penyusunan Masterplan Kawasan industri Berbasis Ekologi	Disprindakop				
2	Penerapan standar Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001	Disprindakop, DLH				
3	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri	Disprindakop dan Lembaga Diklat				
4	Peningkatan kinerja perusahaan/kegiatan terhadap penataan Peraturan Perundang-undangan di Bidang LH dan penanganan sengketa lingkungan	Disprindakop				
5	Penanganan Sumber Pencemar dari usaha/kegiatan menengah/besar dan industri kecil	Disprindakop				
6	Pengujian dan Pemantauan Kualitas Air Limbah dan Air Permukaan	Disprindakop				
7	Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Laboratorium Pengujian Kualitas Air, Udara, Biologi dan Tanah bagi Industri dan Masyarakat	Disprindakop				

4.2.4.2. Program Penyediaan Lahan

Pengembangan kawasan industri di suatu daerah membutuhkan dasar berupa Rencana Tata Ruang Wilayah yang merupakan pedoman dalam implementasi pemanfaatan ruang. Oleh karena itu RTRW merupakan ujung tombak dalam penyediaan lahan khususnya bagi pengembangan kawasan industri serta bahan baku industri.

Tabel IV-100 Program Penyediaan Lahan 2022 – 2042

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2022-2026	2027-2032	2033-2038	2039-2042
1	Sinkronisasi penyediaan lahan kawasan industri	Disprindakop, Bappeda, Dinas PUPR				
2	Fasilitasi perizinan pembangunan dan perluasan kawasan industri	Disprindakop				
3	Fasilitasi penyediaan lahan bagi IKM dalam Kawasan Industri	Disprindakop				
4	Fasilitasi penyediaan utilitas, infrastruktur, dan layanan pendukung industri lainnya.	Disprindakop				

4.2.4.3. Program Pengembangan Transportasi, Energi, Telekomunikasi, Sumber Daya Air, dan Sanitasi

Kawasan Industri memerlukan infrastruktur yang memadai untuk membantu operasional kegiatan industri dan meningkatkan pelayanan Kawasan Industri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, infrastruktur Kawasan Industri disediakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah serta perusahaan Kawasan Industri. Setiap Kawasan Industri memiliki kebutuhan akan infrastruktur yang berbeda-beda. Hal ini didasarkan oleh jenis industri yang terdapat pada Kawasan Industri tersebut.

a. Pengembangan Transportasi

Jaringan transportasi bagi kegiatan industri memiliki fungsi yang sangat penting terutama dalam rangka kemudahan mobilitas pergerakan dan tingkat pencapaian (aksesibilitas) baik dalam penyediaan bahan baku, pergerakan manusia dan pemasaran hasil-hasil produksi. Jaringan transportasi terbagi atas transportasi darat, laut dan udara.

Untuk jaringan transportasi darat berupa jaringan jalan. Jaringan jalan yang baik untuk kegiatan industri, harus memperhitungkan kapasitas dan jumlah kendaraan yang akan melalui jalan tersebut sehingga dapat diantisipasi sejak awal kemungkinan terjadinya kerusakan jalan dan kemacetan. Hal ini penting untuk dipertimbangkan karena dari kenyataan yang ada dari keberadaan Kawasa Industri pada suatu daerah ternyata tidak mudah untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan industri terhadap masalah transportasi. Berdasarkan arahan dalam dokumen (rancangan) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2022-2042, berikut program pengembangan transportasi sebagai pendukung kegiatan industri di Kabupaten Nunukan.

Tabel IV-101 Program Pengembangan Transportasi Pendukung Industri 2022 – 2042

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2022-2026	2027-2032	2033-2038	2039-2042
1	Perwujudan pengembangan jaringan arteri primer dengan ruas jalan trans kalimantan	Dinas PUPR				
2	Perwujudan pengembangan jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan pusat pengembangan di barat – tengah dan timur yaitu dari arah Malinau - Long Layu (Krayan Selatan) – Long Bawan (Krayan) – Tau Lumbis (Lumbis Ogong) – Mansalong (Lumbis) sampai Sei Manggaris dan Perbatasan Negara	Dinas PUPR				
3	Inventarisasi jalan usaha tani	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; Disprindakop				
4	Penyusunan database jalan usaha tani	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; Disprindakop				
5	Penyusunan DED jalan usaha tani	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; Disprindakop				
6	Pembangunan jalan usaha tani	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; Disprindakop				
7	Perwujudan pembangunan terminal barang	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan				
	Perwujudan pembangunan jembatan timbang	Dinas Perhubungan				
8	Perwujudan pengembangan jaringan sungai, danau dan penyeberangan	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan				
9	Perwujudan pengembangan pelabuhan sungai dan danau	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan				
10	Perwujudan pengembangan pelabuhan penyeberangan	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan				
11	Perwujudan pengembangan	Dinas PUPR,				

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2022-2026	2027-2032	2033-2038	2039-2042
	pelabuhan laut	Dinas Perhubungan				
12	Perwujudan pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, KKP				
13	Perwujudan pengembangan jaringan kereta api	Dinas Perhubungan, KAI				
14	Perwujudan pengembangan sistem transportasi udara	Dinas Perhubungan, Angkasa Pura				

b. Pengembangan Energi/Kelistrikan

Jaringan listrik adalah sistem listrik yang terdiri dari hantaran dan peralatan listrik yang terhubung satu sama lain untuk menyalurkan tenaga listrik. Ketersediaan jaringan listrik menjadi syarat yang terpenting untuk kegiatan industri. Hal tersebut dikarenakan proses produksi kegiatan industri sangat membutuhkan energi yang bersumber dari listrik, untuk keperluan mengoperasikan alat – alat produksi. Standar pelayanan listrik untuk kegiatan industri tidak sama dengan kegiatan domestik, dimana ada prasyarat mutlak untuk kestabilan pasokan daya maupun tegangan. Berdasarkan arahan dalam dokumen (rancangan) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2022-2042, berikut program pengembangan energi/kelistrikan sebagai pendukung kegiatan industri di Kabupaten Nunukan.

Tabel IV-102 Program Pengembangan Energi/Kelistrikan Pendukung Industri 2022 – 2042

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2022-2026	2027-2032	2033-2038	2039-2042
1	Perwujudan pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung untuk keperluan industri sekitar 80 MW melalui PLTA, PLTD, PLTB (batu bara), PLTMG, PLTG, PLTS	PLN				
2	Perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung berupa SUTT, SUTM, SUTR dan gardu induk	PLN				
3	Perwujudan pengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan yang berasal dari limbah padat maupun limbah cair sawit	PLN, Industri Sawit				

c. Pengembangan Telekomunikasi

Kegiatan industri tidak akan lepas dari aspek bisnis, dalam rangka pemasaran maupun pengembangan usaha. Keberadaan jaringan telekomunikasi sangat membantu dalam mengakses segala informasi yang lebih informatif. Selain itu keberadaan jaringan telekomunikasi saat ini lebih memudahkan dalam melakukan kegiatan komunikasi. Untuk itulah jaringan telekomunikasi seperti telepon dan internet menjadi kebutuhan dasar bagi pelaku kegiatan industri untuk menjalankan kegiatannya.

Berdasarkan arahan dalam dokumen (rancangan) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2022-2042, berikut program pengembangan telekomunikasi sebagai pendukung kegiatan industri di Kabupaten Nunukan.

Tabel IV-103 Program Pengembangan Telekomunikasi Pendukung Industri 2022 – 2042

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2022-2026	2027-2032	2033-2038	2039-2042
1	Perwujudan pengembangan infrastruktur Jaringan tetap	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik				
2	Perwujudan jaringan bergerak selular berupa menara Base Transceiver Station (BTS) dan pemancar radio	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik				

d. Pengembangan Sumber Daya Air

Keberadaan Kawasan Industri sebaiknya mempertimbangkan jarak terhadap sumber daya air, baik yang bersumber dari sungai, gunung maupun sumber air lainnya. Karena sumber air memiliki peranan penting dalam kegiatan industri yaitu sebagai sumber air baku. Sehingga jarak terhadap sumber air harus mempertimbangkan biaya konstruksi dan pembangunan saluran-saluran air. Disamping itu jarak yang ideal seharusnya juga memperhitungkan kelestarian lingkungan daerah aliran sungai (DAS), sehingga kegiatan industri dapat secara seimbang menggunakan sungai & sumber air lainnya untuk kebutuhan kegiatan industrinya tetapi juga dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sumber air tersebut.

Berdasarkan arahan dalam dokumen (rancangan) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2022-2042, berikut program pengembangan sumber daya air sebagai pendukung kegiatan industri di Kabupaten Nunukan.

Tabel IV-104 Program Pengembangan Sumber Daya Air Pendukung Industri 2022 – 2042

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2022-2026	2027-2032	2033-2038	2039-2042
1	Perwujudan pengembangan Sistem jaringan irigasi	Dinas PUPRPKP				
2	Perwujudan bangunan pengendalian banjir	Dinas PUPRPKP				
3	Perwujudan bangunan sumber daya air untuk kebutuhan pengembangan kawasan industri sebesar 275 lt/dt	Dinas PUPRPKP				

e. Pengembangan Sanitasi

Pembangunan sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah domestik, dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik.

Berdasarkan arahan dalam dokumen (rancangan) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2022-2042, berikut program pengembangan sanitasi atau

prasarana lingkungan sebagai pendukung kegiatan industri di Kabupaten Nunukan.

Tabel IV-105 Program Pengembangan Sanitasi Pendukung Industri
2022 – 2042

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2022-2026	2027-2032	2033-2038	2039-2042
1	Perwujudan pengembangan Sistem penyediaan air minum (SPAM)	Dinas PUPRPKP				
2	Perwujudan pengembangan sistem pengelolaan air limbah (SPAL)	Dinas PUPRPKP				
3	Perwujudan pengembangan sistem pembuangan air limbah non domestik	Dinas PUPRPKP, Dinas LH				
4	Perwujudan pengembangan sistem pembuangan air limbah domestik	Dinas PUPRPKP, Dinas LH				
5	Perwujudan pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Dinas PUPRPKP, Dinas LH				
6	Perwujudan pengembangan sistem jaringan persampahan	Dinas PUPRPKP, Dinas LH				
7	Perwujudan pengembangan sistem drainase	Dinas PUPRPKP, Dinas LH				

4.2.4.4. Program Pengembangan Sistem Informasi Industri

Sistem Informasi Industri adalah suatu mekanisme untuk mempermudah dan mempercepat proses penyampaian data yang berasal dari dunia usaha kepada pemerintah. Data tersebut merupakan input yang selanjutnya diolah, dianalisis, dan dijadikan sebagai dasar pijakan bagi pemerintah dalam menyusun rangkaian kebijakan yang pro-industri, seperti jaminan ketersediaan pasokan bahan baku dan energi, perlindungan dari serbuan barang-barang impor, pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal, serta kebijakan-kebijakan lainnya.

Tabel IV-106 Program Pengembangan Sistem Informasi Industri
2022 – 2042

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2022-2026	2027-2032	2033-2038	2039-2042
1	Pembangunan sistem informasi industri daerah	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik, Disprindakop				
2	Pelatihan operatosional sistem informasi industri daerah	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik, Disprindakop				
3	Sosialiasi sistem informasi industri daerah	Disprindakop				
4	Pengelolaan maintenance, upgrading sistem informasi industri daerah	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik, Disprindakop				

4.2.4.5. Program Penunjang Standarisasi Industri

Standarisasi industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri dalam rangka penguasaan pasar dalam negeri maupun ekspor. Standarisasi industri juga dapat dimanfaatkan untuk melindungi keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengembangan produk industri hijau serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Pengembangan standarisasi industri meliputi perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan untuk Standar Nasional Indonesia (SNI), Spesifikasi Teknis (ST) dan Pedoman Tata Cara (PTC).

Sasaran pengembangan standarisasi industri adalah : a. terlaksananya penyusunan dan pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC sesuai kebutuhan industri prioritas; dan b. tersedianya infrastruktur standarisasi meliputi pembentukan lembaga sertifikasi produk, penyediaan laboratorium pengujian, lembaga inspeksi, laboratorium kalibrasi, auditor/asesor, petugas pengujian, petugas inspeksi, dan petugas kalibrasi untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian, serta penyediaan petugas pengawas standar industri (PPSI) dan penyidik pegawai negeri sipil industri (PPNS-I) untuk pelaksanaan pengawasan penerapan SNI, ST dan/atau PTC.

Tabel IV-107 Program Penunjang Standarisasi Industri 2022 – 2042

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2022-2026	2027-2032	2033-2038	2039-2042
1	Pengembangan standarisasi industri dalam rangka peningkatan kemampuan daya saing industri	Disprindakop				
2	Pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian mutu produk industri dengan kebutuhan dan permintaan pasar	Disprindakop				
3	Pengembangan lembaga penilai kesesuaian mutu produk industri	Disprindakop dan Lembaga Diklat				
4	Penyediaan dan pengembangan laboratorium pengujian standar industri di wilayah pusat pertumbuhan industri	Disprindakop				
5	Peningkatan kompetensi komite teknis, auditor/asesor, petugas pengujian, petugas inspeksi, petugas kalibrasi, PPSI dan PPNS-I	Disprindakop				
6	Peningkatan kerjasama antarnegara dalam rangka saling pengakuan terhadap hasil pengujian laboratorium dan sertifikasi produk.	Disprindakop				

4.2.5. Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

IKM mempunyai peran yang strategis dalam perekonomian khususnya perekonomian Kabupaten Nunukan. Selain itu IKM memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, menjadi sumber pendapatan masyarakat luas serta mampu bertahan terhadap krisis yang terjadi. Dengan karakteristik IKM yang sedemikian rupa akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh dan maju yang berciri kerakyatan. Karena itulah pemerintah daerah diharapkan melakukan pembangunan dan pemberdayaan IKM untuk mewujudkan IKM yang berdaya saing signifikan sebagai penguatan struktur industri nasional, ikut berperan

dalam pengentasan kemiskinan serta penyerapan tenaga kerja dan menghasilkan barang/jasa industri untuk diekspor.

Target atau sasaran pengembangan industri kecil dan menengah Kabupaten Nunukan dalam jangka waktu 20 tahun kedepan dan gap dari target yang dicapai (permasalahan) dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel IV-108 Sasaran Pengembangan IKM 2022 – 2042

No	Sasaran	Tahun				
		2021 *	2022-2026	2027-2032	2033-2038	2039-2042
1	Pertumbuhan IKM (%)	5,95	17,83	18,39	19,59	20,47
2	Kontribusi IKM terhadap Sektor Industri tanpa migas(%)	1,51	1,61	1,74	1,92	2,10
3	Nilai Produksi IKM (Rp Milyar)	8,7	10,93	17,27	27,36	43,32
4	Jumlah Tenaga Kerja tanpa migas (orang)	2.184	3.784	6.028	9.644	15.370
5	Penambahan Populasi IKM	753	946	1.507	2.411	3.843

Keterangan : * Base line data, Sumber dari Renstra Dinasi Kopersai, UKM, Perindag dan analisis 2022

Tabel IV-109 Permasalahan Pengembangan IKM (gap dari Sasaran)

Belum optimalnya Pengembangan Kewirausahaan & keunggulan kompetitif usaha kecil	Minimnya Pelatihan Kewirausahaan
	Masih terbatasnya Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha IKM
	Penyelenggaraan Promosi secara langsung terkait Produk Usaha IKM masih kurang
	Masih terbatasnya fasilitasi jaringan kerjasama antar lembaga
	Masih kurangnya perluasan penerapan SNI / Sertifikasi Halal, untuk mendorong daya saing industri.
Belum optimalnya Pengembangan IKM	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta besar masih rendah
	Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri kecil dan menengah belum terlaksana
	Belum optimalnya pengembangan dan pelayanan teknologi industri

Berdasarkan sasaran pengembangan industri kecil dan menengah Kabupaten Nunukan dalam jangka waktu 20 tahun kedepan dan gap dari target yang dicapai (permasalahan) diatas, maka program pemberdayaan industri Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel IV-110 Program Pemberdayaan Industri 2022 - 2042

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2022-2026	2027-2032	2033-2038	2039-2042
1	Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Disprindakop,				
2	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Disprindakop				
3	Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah	Disprindakop Dinas DMPTSP				
4	Pendirian unit penanganan pengaduan	Disprindakop				
5	Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah	Disprindakop				
6	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Disprindakop				
7	Fasilitasi Permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah	Disprindakop				
8	Pemberian Fasilitasi Pengamanan kawasan Usaha Kecil Menengah	Disprindakop				
9	Fasilitasi peningkatan kemitraan investasi Usaha Kecil Menengah dengan perusahaan asing	Disprindakop				

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2022-2026	2027-2032	2033-2038	2039-2042
10	Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Disprindakop				
11	Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi	Disprindakop				
12	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Disprindakop				
13	Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan Usaha Mikro Kecil Menengah	Disprindakop dan Dinas LH				
14	Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Disprindakop dan Dinas Kominfo				
15	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Disprindakop dan Dinas Kominfo				
16	Penyiapan data base kuota setiap jenis barang dan jasa	Disprindakop				
17	Penyebarluasan informasi database kuota setiap jenis barang dan jasa	Disprindakop				
18	Fasilitasi Kerjasama dengan lembaga Pendidikan dan penelitian pengembangan dalam rangka pengembangan produk	Disprindakop				
19	Promosi Produk Expo Daerah	Disprindakop dan Dinas Kominfo				

BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Nunukan tahun 2023-2043, pada dasarnya adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing industri Kabupaten Nunukan. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Nunukan tahun 2023-2043 tidak dapat dilepaskan dari visi dan misi pembangunan Industri Nasional dan Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, juga merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Nunukan tahun 2032-2043 menjadi pedoman untuk dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan dalam mendukung pembangunan sektor industri dan bahan evaluasi atas implementasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Nunukan tahun 2023-2043. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Nunukan tahun 2023-2043 ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi masyarakat dan Lembaga/Instansi terkait dalam melaksanakan pembangunan sektor industri.

15.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil kajian mulai bab 2 (dua) sampai dengan 5 (lima), maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa berdasarkan kajian teoritis dan kesesuaian secara empiris diperlukan adanya pembangunan industri yang disusun secara terencana, terarah dan sistematis.
2. Bahwa dalam melakukan analisis hasil evaluasi normatif perlu adanya kesesuaian sebagai sinkronisasi dengan produk hukum lain yaitu berupa Perda RTRW, RDTR, RPJPD, dan RPJMD.
3. Bahwa secara hukum, substansi pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah memiliki dasar untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Industri Kabupaten Nunukan Tahun 2023 – 2043.

15.2. Saran-saran/Rekomendasi

1. Perlu untuk pembahasan secara teknis dan rinci dalam menentukan strategi dan program pembangunan industri dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
2. Diperlukan sinkronisasi dengan program terkait industri dalam pemenuhan sarana dan prasana industri pada perangkat daerah lain yang terkait.

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,



HASRUNI, S.H., M.A.P
NIP. 19710608 200212 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2023-2043

I. UMUM

Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Salah satu tujuan Nasional Bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melalui pembangunan ekonomi dan industri. Secara umum, alasan yang mendasari suatu Negara ataupun daerah perlu mengembangkan sektor industri antara lain karena Industri berpotensi besar dalam:

- a. Memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan;
- b. Menciptakan iklim bisnis yang positif;
- c. Membangun citra dan identitas bangsa/daerah;
- d. Mengembangkan ekonomi berbasis kepada sumber daya yang terbarukan;
- e. Menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan.

Pemerintah Pusat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Undang-Undang ini telah meletakkan Industri sebagai salah satu pilar ekonomi yang memberikan peran yang cukup besar kepada Pemerintah untuk mendorong kemajuan Industri nasional secara terencana. Untuk memperkuat dan memperjelas peran Pemerintah dalam Pembangunan Industri nasional, maka telah disusun perencanaan Pembangunan Industri nasional yang sistematis, komprehensif dan futuristik yang dimuat dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (RPIN Tahun 2015-2035).

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan kepada setiap Bupati/Walikota untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Daerah dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Industri Nasional dan kebijakan industri nasional. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Nunukan Tahun 2023-2043 disusun paling sedikit dengan memperhatikan :

- a. Potensi sumber daya industri daerah;
- b. Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Nunukan; dan
- c. Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan Pembangunan Industri di Kabupaten Nunukan serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Nunukan Tahun 2023-2043 merupakan prioritas dari Bupati di bidang Pembangunan Industri yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Nunukan, melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut, Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Nunukan Tahun 2023-2043 ini dibentuk untuk memberikan arah, acuan dan landasan Pembangunan Industri di Kabupaten Nunukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,



HASRUNI, S.H., M.A.P
NIP. 19710608 200212 1 007